

**ANALISIS KEBIJAKAN TATA RUANG KAWASAN BENCANA
KECAMATAN PANTI KABUPATEN JEMBER KAITANNYA
DENGAN KONSEP TATA RUANG TANGGAP BENCANA**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi
Universitas Jember

21 JAN 2008

Oleh

ALVIN NUR MUHAMMAD
NIM 030810101090

S

Klass
338.95983
MUH
a

C.1

**ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS JEMBER**
2007

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Alvin Nur Muhammad

NIM : 030810101090

Jurusan : Ilmu Ekonomi

Fakultas : Ekonomi

Judul Skripsi : **ANALISIS KEBIJAKAN TATA RUANG KAWASAN
BENCANA KECAMATAN PANTI KABUPATEN JEMBER
KAITANNYA DENGAN KONSEP TATA RUANG
TANGGAP BENCANA**

Dengan sadar dan penuh tanggung jawab, menyatakan bahwa skripsi sederhana yang telah saya susun merupakan hasil karya sendiri. Apabila dikemudian hari ditemukan dan/atau merupakan hasil dari plagiat atau penjiplakan, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan dan sekaligus menerima sanksi berdasarkan aturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sadar dan sebenar-benarnya.

Jember, 17 Desember 2007


Alvin Nur Muhammad)

TANDA PERSETUJUAN

Judul Skripsi

**ANALISIS KEBIJAKAN TATA RUANG KAWASAN BENCANA
KECAMATAN PANTI KABUPATEN JEMBER KAITANNYA
DENGAN KONSEP TATA RUANG TANGGAP BENCANA**

Nama : ALVIN NUR MUHAMMAD
Nim : 030810101090
Jurusan : ILMU EKONOMI
Konsentrasi : EKONOMI REGIONAL

Disetujui tanggal: 10 Desember 2007

Pembimbing I



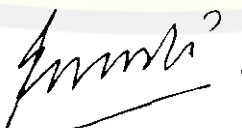
Drs. Badjuri, ME
NIP. 131 386 652

Pembimbing II



Dr. Rafael Purtomosomaji, M.Si
NIP. 131 799 384

Mengetahui,
Ketua Jurusan IESP



Dr. M. Fathorrazi, M.Si
NIP. 131 877 451

JUDUL SKRIPSI

**ANALISIS KEBIJAKAN TATA RUANG KAWASAN BENCANA
KECAMATAN PANTI KABUPATEN JEMBER KAITANNYA
DENGAN KONSEP TATA RUANG TANGGAP BENCANA**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama Mahasiswa : Alvin Nur Muhammad

NIM : 030810101090

Jurusan : Ilmu Ekonomi

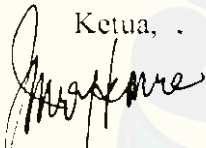
telah dipertahankan di depan Tim Penguji pada tanggal:

17 Desember 2007

dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima sebagai kelengkapan memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Ekonomi pada Fakultas Ekonomi Universitas Jember.

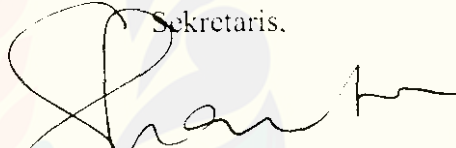
Susunan Tim Penguji

Ketua, .



Dr. Siti Komariyah, M.Si
NIP. 132 298 908

Sekretaris.




Siswoyo Hari S., SE, M.Si
NIP. 132 056 182

Anggota.



Dr. Rafael Partomo S., M.Si
NIP. 131 799 384

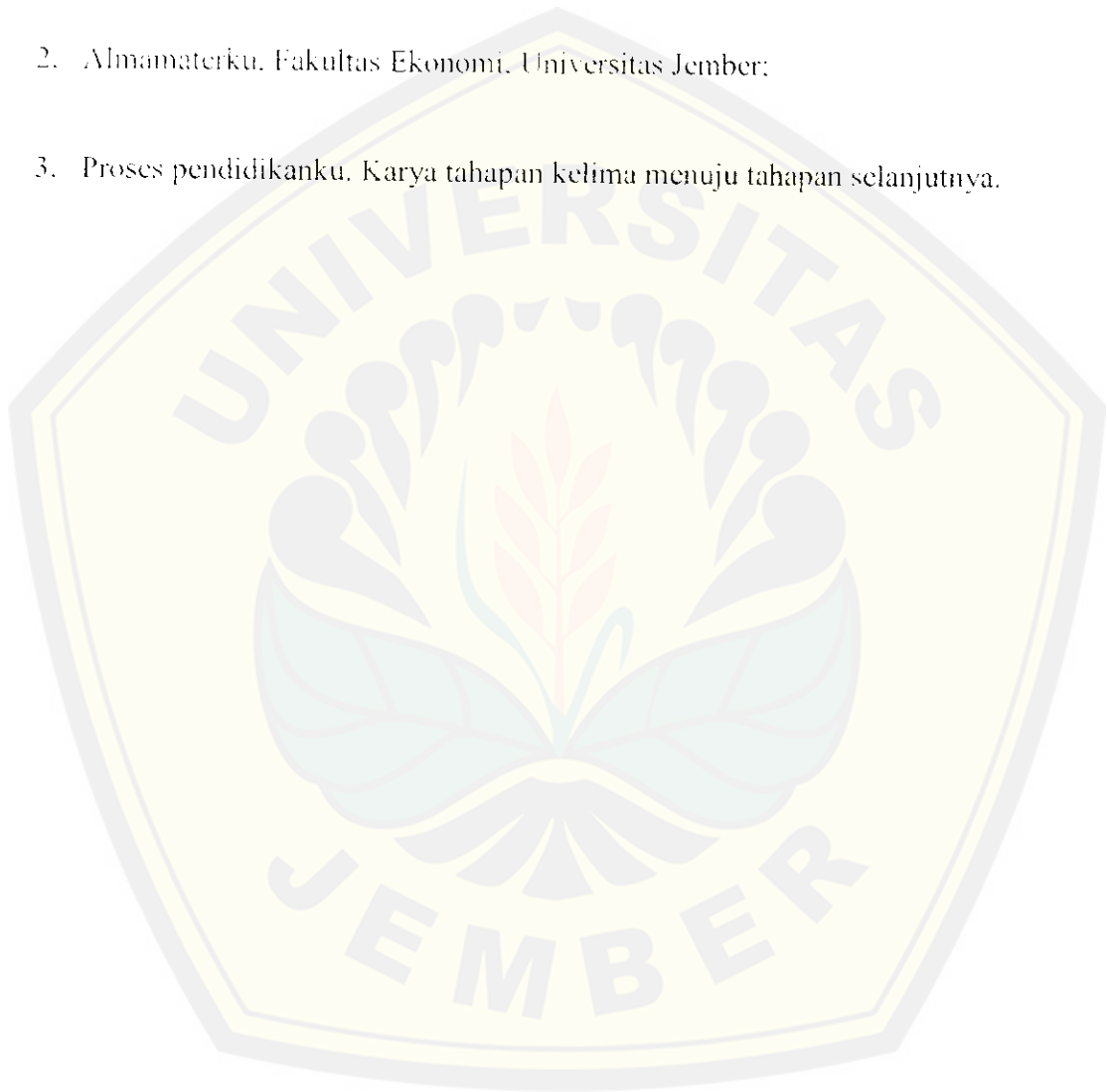
Mengetahui Menyetujui
Universitas Jember
Fakultas Ekonomi
Dekan.



Prof. Dr. H. Sarwedi, MM
NIP. 131 276 658

PERSEMBAHAN

1. Bapak Drs. H. Syamsuddin Asyrofi, MM, dan Ibu Hj. Setyani Rahendayati;
2. Almamaterku, Fakultas Ekonomi, Universitas Jember;
3. Proses pendidikanku, Karya tahapan kelima menuju tahapan selanjutnya.



MOTTO

“Berani hidup tak takut mati,
Takut mati jangan hidup,
Takut hidup mati saja”
(K.H. Ahmad Sahal)

“Hidup sekali hiduplah yang berarti”
(K.H. Imam Zarkasyi)

“Kebijakan pembangunan ekonomi sebenarnya memiliki banyak pilihan paham pembangunan ekonomi yang, tentu saja, bisa disesuaikan dengan konteks perkembangan ekonomi dan terlebih lagi eksistensi rezim penguasa sebagai pembuat kebijakan pembangunan ekonomi”
(Martin A. Staniland)

“Data are obviously in the field, and there can be found the very genuine data”
(Alvin N. Muhammad)

“Bencana itu *exist*. Terjadinya bencana sangat bergantung dari cara kita menata ruang sekitar”
(Alvin N Muhammad)

ABSTRACT

For the late few years, most Indonesian regions sustain various disasters. The high frequent disasters occurred, it appears, make Indonesia become the only nation close to various disasters. All these result in serious threat for the people.

The dominant problem appears, later, is that the disaster is noticeably caused by the out of order natural ecosystem as a result of the ignorance of space layout. Often, overlapping and misunderstanding happen in the use of certain space. Therefore, it is not surprising, if a disaster occurs, the taken decision or policy is considered in hurry and not solvable.

The study of "The analysis of space layout policy of disaster area in Panti, Jember, in relation to the concept of ready for disaster space layout" is intended to settle the mentioned problem above. Further, this study aims at (a) analyzing the space layout of disaster area in Panti, Jember, (b) describing experts's views in relation to the space layout policy toward disaster area, and (c) analyzing the concept of ready for disaster space layout according to the experts.

This study applies library research including field survey through questionnaires and interviews to the competent informant (key person). The survey is conducted in Panti disaster area located in Jember and focuses on 4 (four) villages which sustain the biggest impact of the disaster. They are Kemiri, Suci, Panti, and Glagahwero. Through AHP, the Analytical Hierarchy Process, this study employs 12 expert respondents to support discussing the primary problem ideally.

Generally, the results of this study can be concluded that environment, which is regarded as the most significant aspect, becomes the victim of the impact of disaster area space layout of Panti, Jember. Among the four levels of AHP, level 1 shows priority scale respectively obtained environment aspect measured (0.38), social aspect (0.29), economic aspect (0.20), and infrastructure aspect (0.14). Level 2, of each aspect, shows four categories of different dominant impact: ecosystem balance, people's way of thinking, income, and DAS, areas of river flow.

Furthermore, the results of level 1 and 2 above drive level 3 to give new and better alternative policies toward disaster area space layout of Panti, Jember. At the last level, the concept of ready for disaster space layout is considered vital to be applied in terms of participatory planning model locus.

Key Words: Policy of Disaster Space Layout, Descriptive Analysis, Analytical Hierarchy Process (AHP), Concept of Ready for Disaster Space Layout.

ABSTRAKSI

Beberapa tahun belakangan hampir di seluruh wilayah Indonesia tertimpa beragam bencana. Intensitas bencana yang demikian tinggi seakan menjadikan Indonesia sebagai satu-satunya bangsa yang ditakdirkan berdampingan dengan segala macam bencana marabahaya. Semua itu menjadi ancaman tersendiri bagi warga.

Persoalan dominan yang muncul kemudian, beragam bencana ternyata dipicu oleh kerusakan ekosistem alam sebagai akibat pengabaian tata ruang wilayah. Seringkali terjadi tumpang tindih dan salah kaprah dalam pemanfaatan ruang. Sehingga tak ayal ketika terjadi bencana kebijakan yang ada seringkali gagap bencana dan bukan tanggap bencana.

Penelitian dengan Judul "Analisis Kebijakan Tata Ruang Kawasan Bencana Kecamatan Panti Kabupaten Jember Kaitannya dengan Konsep Tata Ruang Tanggap Bencana", ini mencoba mengetengahkan hal tersebut di atas sebagai ujung tombak permasalahan. Selanjutnya, penelitian ini bertujuan (a) menganalisis tata ruang kawasan bencana Kecamatan Panti Kabupaten Jember, (b) mendeskripsikan pandangan expert terkait kebijakan tata ruang kawasan bencana, dan (c) menganalisa konsep tata ruang tanggap bencana menurut pandangan expert.

Pendekatan kajian ini dilakukan melalui metode studi literatur yang berhubungan serta survey lapangan baik melalui kuesioner maupun wawancara kepada nara sumber yang kompeten (*key person*). Survey dilaksanakan di kawasan bencana Kecamatan Panti dengan fokus empat desa yang paling besar terkena dampak bencana, Kemiri, Suci, Panti, dan Glagahwero. Melalui metode Analitik Hirarki Proses (AHP), penelitian ini menempatkan 12 responden ahli (*expert choise*) untuk membantu mengurai pokok permasalahan secara ideal

Secara umum hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa lingkungan menjadi aspek yang paling signifikan menerima dampak kebijakan tata ruang kawasan bencana Kecamatan Panti Kabupaten Jember. Dari 4 level dalam studi AHP, level I menunjukkan skala prioritas secara berurutan diperoleh aspek lingkungan dengan bobot nilai (0,38), berikut aspek sosial (0,29), aspek ekonomi (0,20), dan aspek infrastruktur (0,14). Adapun kriteria level 2 dari masing-masing aspek memperlihatkan 4 kriteria dampak yang dominan, yaitu keseimbangan ekosistem, pola pikir masyarakat, pendapatan masyarakat, dan daerah aliran sungai (DAS).

Selanjutnya, dari hasil level 1 dan level 2 di atas mendorong level 3 untuk memberikan alternatif perlunya kebijakan baru yang lebih baik dalam tata ruang kawasan bencana Kecamatan Panti. Pada level akhir tawaran konsep tata ruang tanggap bencana menjadi penting untuk diterapkan dengan lokus model perencanaan partisipatif (*participatory planning*).

Kata Kunci : Kebijakan Tata Ruang Kawasan Bencana, Analisis Deskriptif, Analitik Hirarki Proses (AHP), Konsep Tata Ruang Tanggap Bencana.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga Analisis kebijakan tata ruang kawasan bencana Kecamatan Panti Kabupaten Jember kaitannya dengan konsep tata ruang tanggap bencana ini dapat selesai pada waktunya. Salawat dan salam juga senantiasa terecurahkan kepada Muhammad SAW.

Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui kondisi dan dampak eksisting kebijakan perubahan tata ruang kawasan bencana Panti. Dimana selanjutnya, dirumuskan konsep tata ruang tanggap bencana. Tulisan ini juga dimaksudkan sebagai karya ilmiah, skripsi, yang menjadi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu. Selain sebagai 'sumbangan' kajian keilmuan di bidang ekonomi tata ruang dan ekonomi regional.

Dalam penyusunan karya ilmiah ini, diakui masih terdapat beberapa kekurangan terkait dengan ketersediaan data-data beserta metodenya. Namun, hal tersebut tidaklah mempunyai pengaruh signifikan terhadap isi bahasan. Selanjutnya, besar harapan kami untuk memperoleh masukan (*critical building*) dari semua pihak untuk lebih sempurnanya karya ilmiah ini.

Akhirnya, menjadi sebuah keinginan bersama untuk menjadikan karya ini lebih bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan. Kepada semua pihak yang telah membantu terselesainya karya ilmiah ini, kami ucapkan terima kasih. Adapun mereka yang diantaranya sebagai berikut:

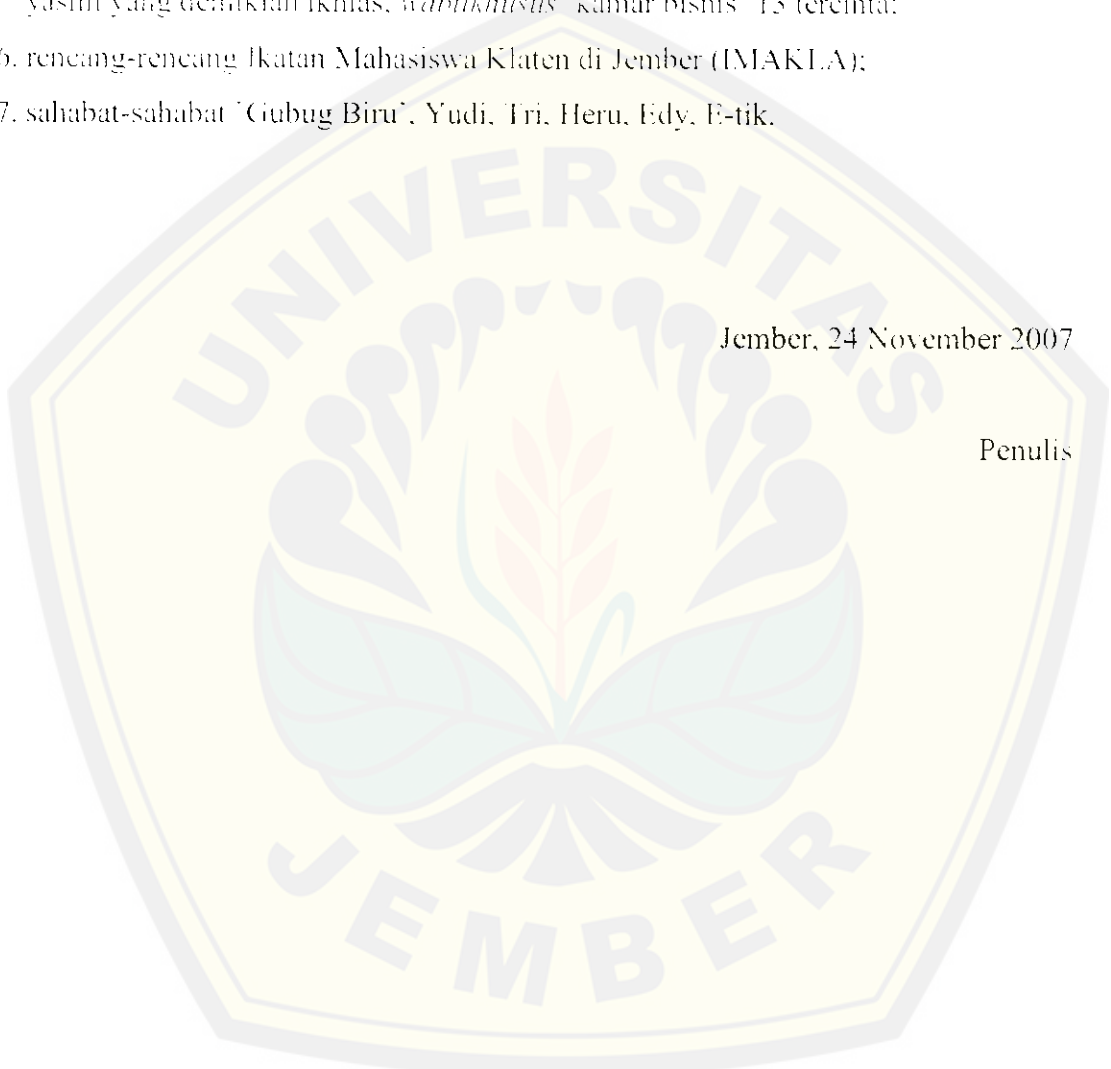
1. Dr. H. Sarwedi, MM, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Jember;
2. Drs. Badjuri, ME, selaku dosen pembimbing I. Terima kasih atas bimbingan dan kesempatannya yang luas diberikan bagi penulis untuk berkreasi;
3. Dr. Rafael Purtomosomaji, M.Si, selaku dosen pembimbing II sekaligus tim penguji skripsi. Beragam masukan dan kritik membangun menjadi pengobar jiwa penulis untuk terus berproses. Terima kasih telah menjadi rekan diskusi dan motivator penulis;

4. Bapak Drs. H. Syamsuddin Asyrofi, MM, dan Ibu Hj. Setyani Rahendayati, doa dan ketulusan dalam membimbing, membuat penulis senantiasa merdeka dari semua dan selalu menghargai dunia pendidikan-intelektual;
5. Dr. Siti Komariah, M.Si dan Siswoyo Hari S., M.Si atas metode pengujian skripsi yang diterapkan, membuat penulis sadar betul akan pentingnya pemahaman teor ekonomi dalam implementasi lapang. *Term* ekonomi harus menjadi bagian daripada nalar seorang ekonom;
6. Najib Mahfudz, adikku, penyatu rasa karsaku untuk terus berkarya;
7. Abah KH. Sahilun An-Nashir, M.Pdi dan Ibu Nyai Lilik Istiqomah, MH, terima kasih atas pangestu dan bimbingannya. Maaf, penulis sering membuat gelisah dengan posisi santri kelananya;
8. sebelas responden *expert* yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu. Terima kasih atas kesediaannya mengisi kuesioner, semoga menjadi pelengkap data penelitian penulis;
9. keluarga besar Lembaga Pers Mahasiswa Ekonomi (LPME) Epose, terima kasih atas karakter mahasiswa yang telah ditancapkan dalam sanubari penulis;
10. para punggawa Epose, Mas Didik S., Kang Giant, Mas Ghofur, Mas Teguh, Mas Cutar, Emak, Bang Tedjo, Mas NurahBoy, Kang Ulum, Erlin, Gomez, Preman, Eric, Kalbar, Rani, Bob, Sigit, Agnes, Maya, Hesti, Syafi'i, yakin pengorbanan kalian akan dituai kelak kemudian hari;
11. Reny, Fandy, Neni A., Iga, Dono, Nody, Totok, Arimacs, Andre, Aank, Agus, Indra, Vevy, Suhendra, Malik, proses itu tidak mudah dan tentunya tidak instant, tapi yakin hasil itu sangat bergantung dari cara dan besar pencarian kita;
12. kawan-kawan Perhimpunan Pers Mahasiswa Indonesia (PPMI) Dewan Kota Jember, Widi, Lutfi, Alpen, Inul, Catur, Husein, Gus Agus, Agung Sedayu, Anton CM, Afief, Abdul Suminti (*Malang*), Tinus, 'cangruk' kalian menjadi penambah *stock knowledge* penulis;
13. Sahabatku Eric, Rijal, Mbah Bub, Oedhin, Kalbar, Rifqi Ahmada (Unibraw) yakin suatu ketika kita akan menjadi orang hebat;

14. *manahle*, Laila Falaahul Hidayati, *Supportmu* senantiasa menjadi hal penting nan indah dari sebahagian prosesku di Jember;
15. laskar samiri sarungan 'Lasoerah' Pesma Al-Jauhar terima kasih pembacaan surat yasin yang demikian ikhlas, *wabillkhusus* 'kamar bisnis' 13 tercinta;
16. rencang-rencang Ikatan Mahasiswa Klaten di Jember (IMAKLA);
17. sahabat-sahabat 'Gubug Biru', Yudi, Tri, Heru, Edy, E-tik.

Jember, 24 November 2007

Penulis

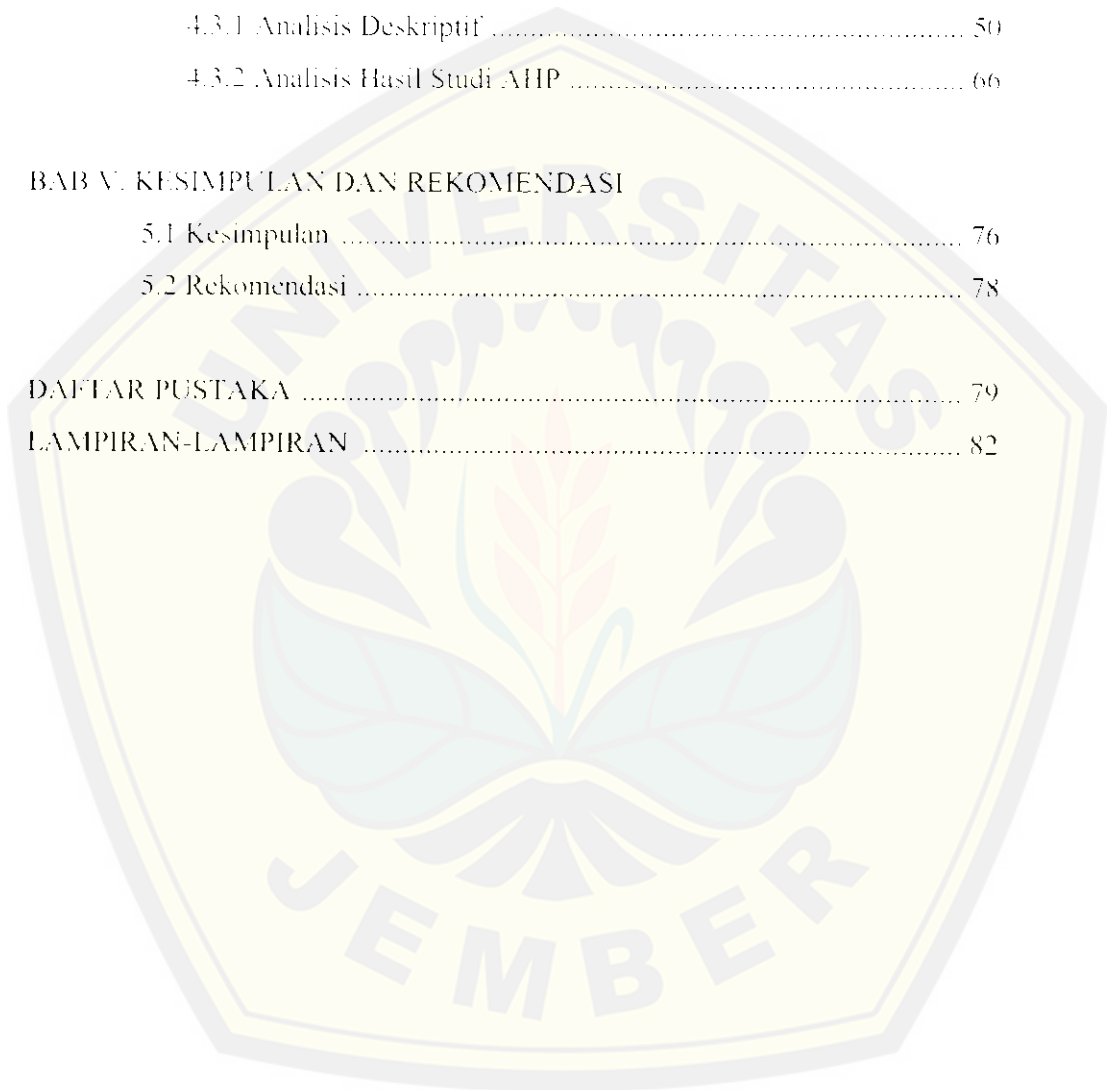


DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN SURAT PERNYATAAN.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
HALAMAN MOTTO.....	vi
ABSTRACT.....	vii
ABSTRAKSI.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xv
DAFTAR GAMBAR.....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xviii
BAB I. PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	4
1.3 Tujuan Penelitian & Manfaat Penelitian.....	4
1.3.1 Tujuan Penelitian.....	4
1.3.2 Manfaat Penelitian.....	5
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Teori Kebijakan Publik.....	6
2.1.1 Pengertian Kebijakan.....	6
2.1.2 Konsep Publik.....	7
2.1.3 Pengertian Kebijakan Publik.....	9
2.1.4 Konsep Implementasi Kebijakan Publik.....	11
2.1.5 Faktor Penghambat dan Pendukung Implementasi Kebijakan Publik.....	12

2.2 Analisis Kebijakan	16
2.3 Konsep Perencanaan	17
2.4 Unsur-Unsur Perencanaan	18
2.5 Tipe/Tipe Perencanaan	19
2.6 Aspek Perencanaan	20
2.7 Perencanaan Darurat	21
2.8 Participatory Planning	22
2.9 Sustainability Planning	23
2.10 Strategic Planning	24
2.11 Konsep Bencana	25
2.12 Disaster Management	26
2.13 Proses Hirarki Analitik (AHP)	27
BAB III. METODE PENELITIAN	
3.1 Rancangan Penelitian	34
3.2 Waktu dan Lokasi Penelitian	34
3.3 Metode Pengumpulan data	36
3.4 Metode Analisis Data	38
3.4.1 Analisis Data Deskriptif	38
3.4.2 Analisis Data AHP	39
BAB IV. PEMBAHASAN	
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian	41
4.1.1 Kabupaten Jember	41
4.1.2 Kecamatan Panti Kabupaten Jember	42
4.1.2.1 Batas Administratif dan Letak Geografis	42
4.1.2.2 Topografi, Geologi, dan Iklim	42
4.1.2.3 Tata Guna Lahan	43
4.1.2.4 Kependudukan dan Karakteristik Sosial	44
4.1.2.5 Keadaan Perekonomian Regional	45
4.1.2.6 Sistem Transportasi	46

4.1.2.7 Lingkungan Permukiman	47
4.1.2.8 Fasilitas dan Pelayanan Sosial	47
4.2 Isu Penataan Ruang Wilayah Kecamatan Pantu Pascebeneana ...	48
4.3 Hasil dan Pembahasan.....	50
4.3.1 Analisis Deskriptif	50
4.3.2 Analisis Hasil Studi AHP	66
BAB V. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI	
5.1 Kesimpulan	76
5.2 Rekomendasi	78
DAFTAR PUSTAKA	79
LAMPIRAN-LAMPIRAN	82



DAFTAR TABEL

	Halaman
2.1 Skala Banding Secara Berpasangan.....	31
2.2 Contoh Matriks Perbandingan.....	33
4.1 Hasil pembobotan jawaban prioritas aspek level 1.....	67
4.2 Hasil pembobotan jawaban prioritas kriteria level 2.....	68
4.3 Hasil pembobotan jawaban prioritas alternatif level 3.....	70
4.4 Hasil pembobotan jawaban prioritas alternatif per kriteria level 3....	70
4.5 Hasil pembobotan jawaban prioritas model level 4.....	74

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1. Proses analisis kebijakan dasar secara umum (Catanese, A. J & Syner, J. C. (ed), 1988).....	17
Gambar 2.2. Skema Perencanaan Darurat (Radjiman, 2007).....	22
Gambar 2.3. Alur mekanisme pelaksanaan partisipasi masyarakat dalam <i>participatory planning</i> (Warta Kebijakan, 2002).....	23
Gambar 2.4. Skema faktor esensial yang mempengaruhi isu-isu strategis (Kemp, dalam Djunaedi, tanpa tahun)	24
Gambar 2.5. Diagram sederhana kejadian bencana (Kodoatie & Sjarief, 2006).....	26
Gambar 2.6. Siklus kegiatan pengelolaan bencana (Radjiman, 2007:11).....	27
Gambar 2.7. Contoh penyusunan hirarki dalam studi AHP.....	29
Gambar 3.1 Hirarki Kebijakan Perubahan Tata Ruang Kawasan Bencana Kecamatan Panti Kabupaten Jember	35
Gambar 3.2 Desain penelitian	37
Gambar 4.1 Kebijakan perubahan tata ruang kawasan bencana mengakibatkan perubahan fungsi lahan	52
Gambar 4.2 Penataan tata ruang Kecamatan Panti juga berdampak pada munculnya ketidakseimbangan ekosistem (<i>unbalance ecosystem</i>) yang ada	52
Gambar 4.3 Penataan tata ruang Kecamatan Panti meningkatkan fungsi keindahan yang dirasakan masyarakat	53
Gambar 4.4 Perubahan tata ruang menyebabkan perubahan ke arah penurunan tingkat kualitas modal sosial masyarakat kawasan bencana Panti	54
Gambar 4.5 Penataan tata ruang kawasan bencana Kecamatan Panti ternyata membawa perubahan pola pikir masyarakat sekitar ...	55
Gambar 4.6 Penataan kawasan bencana Panti belum berdampak pada peningkatan kualitas keamanan masyarakat. Bahkan kecenderungan rasa tidak aman akan bencana susulan dan kriminalitas yang terus meningkat lebih dominan	56

Gambar 4.7	Perubahan kebijakan tata ruang Panti membawa pada tingkat partisipasi masyarakat yang lebih tinggi	56
Gambar 4.8	Kebijakan penataan ulang tata ruang Kecamatan Panti berakibat pada menurunnya tingkat pendapatan masyarakat kawasan bencana Panti.....	57
Gambar 4.9	Kebijakan perubahan tata ruang membawa dampak lanjutan terciptanya ruang investasi.....	58
Gambar 4.10	Penataan ulang ruang Kecamatan Panti menciptakan beragam kesempatan kerja baru masyarakat kawasan bencana	59
Gambar 4.11	Kebijakan perubahan tata ruang kawasan bencana Panti berakibat pada pergerakan barang dan jasa	60
Gambar 4.12	Kebijakan perubahan tata ruang Kecamatan Panti berdampak pada berkurangnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).....	60
Gambar 4.13	Kebijakan perubahan tata ruang kawasan bencana Panti belum optimal dalam pembangunan permukiman yang berkualitas. Beberapa permukiman masih berada pada area rawan bencana.....	62
Gambar 4.14	Penataan ulang ruang Kecamatan Panti kurang memerhatikan penataan daerah aliran sungai (DAS).....	63
Gambar 4.15	Kebijakan perubahan tata ruang kawasan bencana Kecamatan Panti membawa dampak tersedianya fasilitas umum. Meski cenderung jauh dari standar kelayakan.....	64
Gambar 4.16	Kebijakan perubahan tata ruang kawasan bencana Panti memberikan dampak terbangun dan tertatanya beberapa ruas jalan Kecamatan Panti.....	65
Gambar 4.17	Dampak lain dari kebijakan Kebijakan perubahan tata ruang kawasan bencana Panti adalah terbangunnya bangunan publik.....	66

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Judul	Halaman
1.	Urutan Hirarki dalam Studi AHP.....	82
2.	Kuesioner AHP.....	88
3.	Kuesioner Deskriptif.....	101
4.	Hasil rekapitulasi data kuesioner deskriptif.....	103
5.	Hasil rekapitulasi data AHP.....	104
6.	Gambar Hasil Rekapitulasi Data Kuesioner Secara Keseluruhan	106



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Bencana alam sebagai peristiwa baik yang disebabkan oleh alam (*natural disaster*) dan atau oleh tindakan-tindakan manusia (*man made disaster*) merupakan ancaman bagi manusia. Menurut para ahli kebumihan, bencana alam pada dasarnya merupakan fenomena alam biasa yang secara periodik akan muncul di satu wilayah dengan besaran yang bervariasi. Oleh karenanya, keberadaan bencana selalu ada (*exist*) dimana saja dan kapan saja, dan pasti menimbulkan kerugian material dan imaterial bagi kehidupan masyarakat (Kodoatie & Sjarief, 2006:2).

Intensitas bencana di Indonesia dengan beragam tipenya dari tahun ke tahun menunjukkan tren yang terus meningkat. Dari data Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi (Bakornas PBP) tahun 2006, disebutkan sejak tahun 1961 hingga awal tahun 2006 tercatat sekitar 1145 bencana terjadi di Indonesia. Bencana yang terjadi meliputi, bencana pencemaran lingkungan, kebakaran, konflik sosial, epidemi, kegagalan teknologi, kabut asap/kebakaran hutan, letusan gunung api, tsunami, gempa bumi, angin topan, tanah longsor, dan banjir. (dalam Kodoatie & Sjarief, 2006:11)

Bencana dirasakan terus mengguyur negara kepulauan terbesar di dunia yang terletak di wilayah 4 lempeng tektonik. Bencana alam yang menimpa negeri ini ternyata tidak berhenti dan tidak dicukupkan dengan data Bakornas di atas. Pada penghujung tahun 2004, tanggal 26 Desember 2004, wilayah Aceh ditimpa bencana Gempa bumi dan Tsunami. Belum hilang luka yang ditinggalkan gempa bumi dan tsunami di Aceh, beberapa bulan berikutnya, gempa terjadi di Nias. Awal Tahun 2006 lalu, kembali terjadi bencana banjir bandang dan tanah longsor di Jember, Jawa Timur. Selanjutnya diikuti bencana serupa di daerah Bohorok, Paet, Banjarnegara, Sinjai, dan beberapa kabupaten di Sulawesi Selatan dan Kalimantan Selatan (Ritonga, 2006).

Menurut fenomena di atas dapat dikatakan Indonesia mempunyai potensi bencana yang besar. Selain potensi sumber daya alam yang luar biasa. Sehingga tidak berlebihan bila dikatakan bangsa Indonesia adalah satu-satunya bangsa yang ditakdirkan berdampingan dengan segala macam bencana marabahaya (Kompas 1 Januari 2005). Sehingga, perlu penyusunan dan pengelolaan bencana sebagai bentuk pencegahan (preventif), pengurangan (mitigasi) maupun rehabilitasi dan rekonstruksi (Setyawan, *et al.*, 2006).

Walaupun setiap bencana mempunyai karakteristik yang berbeda-beda namun pada hakekatnya memiliki pola pengelolaan secara substansi yang hampir sama. Secara konsep manajemen bencana dapat dibuat siklus pengelolaan bencana yang terpadu. Siklus ini dibagi dalam lima tahap meliputi, jauh sebelum bencana, pra-bencana, saat menjelang bencana, saat bencana, dan pasca bencana (Kodoatie & Sjarief, 2006:137).

Hal terpenting dalam melakukan pengelolaan bencana dan pembangunan adalah penataan model tata ruang yang baik (Banjarmasin Pos, 2004). Kemunculan berbagai bencana ternyata dipicu oleh kerusakan ekosistem alam sebagai akibat pengabaian tata ruang (Kompas, 2007). Krisis atau buruknya tata ruang ini yang kemudian menjadi kunci utama pengelolaan bencana.

Dalam hal ini pemerintah daerah memiliki peran dan tanggungjawab yang besar dalam usaha penanggulangan bencana. Khususnya daerah yang memiliki wilayah rawan bencana, tindakan tanggap darurat bencana, rehabilitasi dan rekonstruksi, menjadi hal yang harus mendapat prioritas. Langkah utama yang meski dilakukan pemerintah daerah adalah membuat peta pemetaan daerah rawan bencana maupun pemetaan tingkat resiko bencana (Sunarto & Rahayu, 2006). Selanjutnya yang juga tidak kalah penting adalah perlunya revitalisasi Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) daerah setempat (Warta Kebijakan, 2002).

Revitalisasi RUTR yang dimaksudkan adalah pembuatan model penataan ruang wilayah tanggap bencana. Tentunya didasarkan pada daya dukung lingkungan baik dari kondisi geografis, geologis, dan faktor pendukung lainnya. Sehingga arah

tata ruang yang diterapkan tidak hanya sebagai media pencegahan penduduk dari ancaman bencana, tetapi juga tetap mengoptimalkan kegiatan orientasi ekonomi penduduk lokal (Ritonga, 2006).

Kabupaten Jember merupakan salah satu kabupaten di bagian timur Pulau Jawa yang memiliki tingkat kerawanan bencana yang tinggi. Awal tahun 2006 lalu, 2 Januari 2006, empat kecamatan di kabupaten Jember yaitu, kecamatan Panti, Tanggul, Arjasa, dan Rambipuji ditimpa bencana alam banjir bandang dan tanah longsor. Kecamatan Panti yang terletak di lereng sebelah selatan Gunung Argopuro ini merupakan kecamatan yang paling parah. Memang wilayah ini termasuk areal yang tergolong lembah curam, lebar dan dalam (lembah baranco) dan merupakan daerah konsentrasi aliran sungai utama (www.lapanrs.com). Sehingga potensi dan tingkat kerawanan bencana cukup besar.

Sejak Januari 2006 proses pengelolaan bencana Panti telah dilakukan. Berbagai tahapan pengelolaan bencana, sampai dengan rekonstruksi wilayah bencana sudah dilakukan. Namun dari peninjauan dan pengamatan awal peneliti tersimpulkan adanya beberapa keganjilan di lapangan. Keganjilan terlihat dari penataan ruang wilayah yang diterapkan pascabencana, beberapa area relokasi permukiman penduduk relatif dekat dengan kawasan bencana dan beberapa daerah aliran sungai (DAS) masih belum tertata.

Melihat realita lapangan sebagaimana di atas dan pertimbangan latar belakang bencana dari segi teori, peneliti ingin melakukan penelitian lebih lanjut. Selanjutnya, studi ini bertujuan melakukan evaluasi kebijakan perubahan tata ruang kawasan bencana Panti kecamatan Panti kabupaten Jember kaitannya dengan model perencanaan tata ruang tanggap bencana.

Secara lebih detail penelitian ini dimaksudkan untuk mendiskripsikan atau menggambarkan secara jelas mengenai permasalahan implementasi kebijakan khususnya mengenai tata ruang kawasan yang mempunyai dwifungsi yakni ekosistem dan ekonomi, yang berada di kawasan rawan bencana. Sebagai bahan kajian, dipilih secara khusus pendekatan pengelolaan ruang publik, khususnya mengenai

pengelolaan tata ruang wilayah dataran tinggi dan rendah sekaligus yang secara kebetulan juga merupakan kawasan perkebunan dan *hinterland* kota Jember. Kawasan di Kecamatan Panti merupakan kategori di mana di satu sisi merupakan kawasan penyangga ekosistem sekaligus menjadi kawasan ekonomi, dimana berdasarkan pengalaman empiris merupakan kawasan rawan bencana.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah di atas, maka secara ringkas masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. bagaimana analisis deskriptif tata ruang wilayah kecamatan Panti kabupaten Jember pascabencana Panti?
2. bagaimana pandangan *expert* terkait kebijakan tata ruang wilayah kecamatan Panti Kabupaten Jember pascabencana Panti ditinjau dari aspek Lingkungan Sosial, Ekonomi, dan Infrastruktur?
3. bagaimana konsep tata ruang wilayah tanggap bencana dalam persepsi *expert*?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. menganalisis konsep tata ruang wilayah kecamatan Panti Kabupaten Jember pasca bencana Panti;
2. mendeskripsikan pandangan *expert* terkait kebijakan tata ruang wilayah kecamatan Panti Kabupaten Jember pasca bencana Panti ditinjau dari aspek Ekonomi, Sosial, Infrastruktur, dan Lingkungan;
3. menganalisis konsep tata ruang wilayah tanggap bencana dalam persepsi *expert*.

Dimana dari ketiga tujuan di atas, diharapkan dapat diidentifikasi model perencanaan tata ruang wilayah yang tanggap bencana dalam konteks wilayah Kecamatan Panti Kabupaten Jember Jawa Timur sebagai daerah rawan bencana.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Setelah penelitian ini selesai dilakukan, diharapkan akan memberikan manfaat bagi berbagai pihak, diantaranya adalah:

1. untuk kepentingan pustaka, diharapkan dari hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang pengembangan ekonomi kewilayahan;
2. para pembuat kebijakan perencanaan pembangunan daerah pada pemerintahan daerah Jember. Setidaknya sebagai tambahan evaluasi, khususnya evaluasi tentang kebijakan tata ruang di kecamatan Panti pasca bencana yang telah diterapkan dan informasi akan pentingnya tata ruang tanggap bencana di daerah rawan bencana;
3. bagi masyarakat luas, khususnya masyarakat akademik, semoga hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi pada penelitian yang relevan.



BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Teori Kebijakan Publik

Sebelum kita memperdalam dan dalam rangka mempermudah pengertian kebijakan publik, terlebih dahulu perlu diperjelas arti dari beberapa konsep yang melingkupinya, yakni konsep "kebijakan", konsep "publik", konsep "kebijakan publik", dan konsep "implementasi kebijakan publik".

2.1.1 Pengertian Kebijakan

Kata kebijakan selama ini telah digunakan untuk menjelaskan hal-hal yang sangat beragam. Lasswell dan Kaplan (dalam Islamy, 2000:15) mendefinisikan kebijakan sebagai "*a projected program of goals, values, and practices*", yang diartikan sebagai suatu program pencapaian tujuan-tujuan, nilai-nilai dan praktek-praktek yang terarah. Definisi kebijakan lainnya dikemukakan oleh Heinz Eulau dan Kenneth Prewitt (dalam Jones, 1996:47). Kebijakan adalah "keputusan tetap" yang dicirikan oleh konsistensi dan pengulangan (*repetitiveness*) tingkah laku dari mereka yang membuat dan dari mereka yang mematuhi keputusan tersebut.

Dari dua pendapat di atas secara garis besar dapat ditarik pemahaman awal bahwa pengertian dari kebijakan adalah keputusan yang dilaksanakan oleh pembuat dan pelaksana kebijakan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Sementara itu menurut Jones (1996:25), istilah kebijakan (*policy term*) digunakan dalam praktek sehari-hari, namun untuk menggantikan kegiatan atau keputusan yang sangat berbeda. Istilah ini sering dipertukarkan dengan tujuan-tujuan (*goals*), program, keputusan-keputusan (*decisions*), standar, proposal, dan *grand design*.

Dari penjelasan di atas terlihat bahwa kata "kebijakan" sulit untuk diberi makna tunggal. Namun demikian, kebijakan dapat dibedakan dengan keputusan. Beberapa perbedaan keduanya antara lain:

- a. kebijakan memiliki ruang lingkupnya yang lebih luas dibandingkan dengan keputusan. Kebijakan terdiri atas serangkaian keputusan yang saling terkait guna mengatasi masalah tertentu;
- b. setiap kebijakan mungkin dibuat berdasarkan langkah-langkah yang panjang dan rumit. Keputusan dipilih dari berbagai alternatif yang ada;
- c. keputusan dibuat oleh *decision maker(s)* yang dapat berupa sekelompok orang ataupun suatu organisasi.

Dalam bahasa yang sederhana pada hakikatnya studi tentang kebijakan mencakup pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut: apa (*what*), mengapa (*why*), kapan (*when*), dimana (*where*), oleh dan untuk siapa (*who* atau *for whom*), serta bagaimana (*how*) Studi tentang kebijakan biasanya mencakup penelusuran terhadap interaksi yang berlangsung antar individu, kelompok, dan organisasi dalam pembuatan keputusan.

2.1.2 Konsep Publik

Kata publik banyak digunakan untuk hal-hal yang berhubungan dengan kepentingan bersama, seperti: *zoning area* untuk kawasan hutan mangrove, *public transportation*, *public facilities*, *public toilet*, dll. Istilah publik timbul karena adanya keyakinan bahwa ada wilayah yang memerlukan campur tangan dan pengaturan dari pemerintah.

Istilah "publik" menjadi lawan dari istilah "privat". Namun, batasan antara wilayah publik dan wilayah privat sulit untuk didefinisikan secara jelas. Hubungan antara keduanya pun cukup kompleks dan selalu mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Dahulu fasilitas publik seperti, sekolah, rumah sakit, dan fasilitas umum (fasum) identik dan selalu disediakan oleh pemerintah. Akan tetapi berbeda dengan dewasa ini, hampir dari pelayanan seperti di atas, fasilitas publik, justru disediakan oleh swasta.

Pada tawar ekonomi misalnya, mencoba membedakan antara sektor publik dan sektor privat dengan menganalisis "nature of goods and services". Samuelson (1994: 42) mengartikan *public goods* adalah barang dan jasa yang mempunyai sifat *jointness* (dikonsumsi secara bersama-sama oleh banyak orang) dan *non-excludable* (yang tidak membayar sulit untuk dicegah agar tidak ikut menikmatinya). Contoh *public goods* adalah pertahanan (*defense*) dan peraturan perundangan (*legal order*) yang tidak dapat disediakan melalui mekanisme pasar. *Public goods* biasanya diproduksi oleh negara dan dibiayai melalui pajak karena hubungan antara yang membayar dan yang menikmati barang dan jasa tersebut sulit dibedakan secara jelas.

Sementara itu, *private goods* adalah barang dan jasa yang mempunyai sifat *rivalry* (dikonsumsi sendiri-sendiri, dan kalau sudah digunakan bagian tersebut tidak dapat lagi digunakan oleh pihak lain) dan *excludable* (hanya orang tertentu yang dapat menikmatinya). Disamping itu, ada pula *tool goods* dan *common-pool goods*. *Toll goods* mempunyai sifat *jointness* namun *excludable*, seperti kawasan Pantai Ancol; jalan tol, TV kabel, dsb. *Common-pool goods* mempunyai sifat *rivalry* namun *non excludable*, seperti kawasan hutan mangrove, kawasan tangkapan ikan; dan kawasan pangkalan perahu. Pemanfaatan kedua jenis barang dan jasa ini biasanya juga perlu diatur oleh pemerintah.

Disamping penyediaan *public goods*, pemerintah juga melakukan intervensi dalam produksi *merit goods*, yaitu barang jasa yang nilainya melebihi biaya untuk memproduksinya, seperti: pengelolaan kawasan pantai, reboisasi hutan mangrove; pelayanan kesehatan dan pendidikan yang berkontribusi terhadap peningkatan produktivitas sumberdaya alam, SDM dan ekonomi.

2.1.3 Pengertian Kebijakan Publik

Pengertian kebijakan publik (*public policies*) menurut Dunn (2000:109) merupakan serangkaian pilihan yang kurang lebih saling berhubungan (termasuk keputusan-keputusan untuk tidak bertindak) yang dibuat oleh badan atau pejabat pemerintah. Secara singkat, pendapat senada muncul dari Thomas R. Dye yang

mengartikan kebijakan publik sebagai apapun yang dipilih/diputuskan oleh pemerintah mengenai mengerjakan atau tidak mengerjakan (mendiamkan) sesuatu.

Kebijakan publik dapat diartikan sebagai keputusan dan tindakan yang diambil dalam rangka mewujudkan tujuan tertentu atau dalam rangka merespon sesuatu keadaan tertentu. Menurut Dye (1978:3), kebijakan publik adalah pilihan dan tindakan yang dilakukan pemerintah dalam kurun waktu tertentu dalam kaitannya dengan subjek tertentu atau sebagai respon terhadap keadaan tertentu.

Demikian dapat dirangkum, bahwa kebijakan publik merupakan serangkaian pilihan yang saling berhubungan yang dipilih oleh pemerintah, diformulasikan untuk dilaksanakan dalam rangka memecahkan masalah publik. Implikasi atas "dilaksanakan" atau "tidak dilaksanakan" oleh pemerintah, pengaruhnya sama besar. Definisi-definisi yang ada, mungkin memuaskan untuk menjelaskan satu aspek, akan tetapi besar kemungkinan gagal dalam menjelaskan aspek yang lain. Oleh karena itu, proposisi yang menyatakan bahwa kebijakan publik merupakan kebijakan yang dikembangkan oleh lembaga-lembaga pemerintah dan pejabat-pejabat pemerintah harus mendapatkan perhatian sebaik-baiknya agar kita bisa membedakan kebijakan publik dengan bentuk-bentuk kebijakan yang lain, seperti misalnya kebijakan yang dikeluarkan oleh pihak swasta.

Oleh karenanya kebijakan publik merupakan serangkaian tindakan yang ditetapkan dan dilakukan (atau tidak dilakukan) pemerintah yang mempunyai tujuan tertentu demi kepentingan masyarakat. Selanjutnya Islamy (2000:20) menyetengahkan beberapa elemen penting dalam kebijakan publik, yaitu:

- (1) bahwa kebijakan publik itu dalam operasionalnya berbentuk penetapan tindakan-tindakan pemerintah;
- (2) bahwa kebijakan publik itu tidak cukup hanya dinyatakan tetapi dilaksanakan dalam bentuk yang nyata;
- (3) bahwa kebijakan publik, baik untuk melakukan ataupun tidak melakukan sesuatu, mempunyai dan dilandasi maksud dan tujuan tertentu; dan

(4) bahwa kebijakan publik itu harus senantiasa ditujukan bagi kepentingan seluruh anggota masyarakat.

Sifat-sifat kebijakan publik sebagai arah tindakan, dapat dipahami secara lebih baik apabila konsep ini dirinci menjadi beberapa kategori antara lain: tuntutan kebijakan (*policy demands*), keputusan kebijakan (*policy decisions*), pernyataan kebijakan (*policy statements*), produk kebijakan (*policy outputs*), dan dampak kebijakan (*policy outcomes*).

Tuntutan-tuntutan kebijakan (*policy demands*) adalah tuntutan yang dibuat baik oleh para aktor swasta maupun aktor pemerintah, ditujukan untuk para pejabat pemerintah dalam sebuah sistem politik. Mereka didesak untuk mengambil tindakan atau tidak mengambil tindakan mengenai suatu masalah tertentu yang dihadapi. Biasanya, diajukan oleh berbagai kelompok dalam masyarakat dan mungkin berkisar antara desakan secara umum bahwa pemerintah harus berbuat sesuatu sampai usulan agar pemerintah mengambil tindakan tertentu mengenai suatu persoalan.

Keputusan kebijakan (*policy decisions*) didefinisikan sebagai keputusan yang dibuat oleh pejabat pemerintah yang mengesahkan atau memberi arah dan substansi kepada tindakan-tindakan kebijakan publik, termasuk didalamnya adalah menetapkan undang-undang, memberikan perintah eksekutif atau pernyataan resmi, mengumumkan peraturan-peraturan administratif atau membuat interpretasi yuridis terhadap undang-undang.

Pernyataan kebijakan (*policy statements*) adalah pernyataan resmi atau artikulasi kebijakan publik yang menjelaskan maksud dan tujuan pemerintah dan apa yang akan dilakukan untuk tujuan-tujuan tersebut.

Hasil kebijakan (*policy outputs*), cenderung merujuk pada manifestasi nyata dari kebijakan publik, atau hal-hal yang dilakukan menurut keputusan atau pernyataan kebijakan. Hasil kebijakan dapat diungkapkan pula oleh suatu pemerintah, yang keberadaannya perlu dinyatakan oleh pemerintah untuk melakukan sesuatu. Penyelidikan mengenai hasil kebijakan mungkin akan menunjukkan, bahwa kebijakan dalam kenyataannya, berbeda dengan apa yang tersirat dalam pernyataan

kebijaksanaan. Dengan demikian, dapat dibedakan antara dampak kebijakan dengan hasil kebijakan.

Hasil kebijakan (*policy output*) lebih berpijak pada manifestasi nyata kebijakan publik, sedangkan dampak kebijakan (*policy outcomes*) lebih merujuk pada akibat-akibat atas kebijakan yang dihasilkan bagi masyarakat, baik yang diinginkan atau tidak diinginkan yang berasal dari tindakan tidak adanya tindakan pemerintah.

2.1.4 Konsep Implementasi Kebijakan Publik

Konsep implementasi kebijakan publik merupakan salah satu aspek yang akan dibahas dalam penelitian ini, dikarenakan implementasi merupakan aspek yang penting dari keseluruhan proses kebijakan. Dunn (2000:132) mengemukakan bahwa implementasi kebijaksanaan sesungguhnya bukanlah sekedar bersangkut paut dengan mekanisme penjabaran keputusan-keputusan politik ke dalam prosedur-prosedur rutin lewat saluran birokrasi, melainkan lebih dari itu, ia menyangkut konflik, keputusan dan siapa yang memperoleh apa dari suatu kebijakan.

Implementasi merupakan salah satu bagian dari tahap-tahap pembuatan kebijakan, secara keseluruhan tahapan tersebut berupa: penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan dan penilaian kebijakan (Dunn, 2000:24). Dari kelima tahapan pembuatan kebijakan di atas, implementasi memegang peran yang sangat penting.

Berdasarkan pengertian di atas, maka implementasi merupakan suatu proses melaksanakan kebijakan (baik di tingkatan nasional maupun tingkatan lokal) melalui satu atau serangkaian program atau proyek dengan implikasi pengaturan dan pengalokasian *resources* tertentu serta konsekuensi pengaruh atau dampak yang ditimbulkannya. Dan dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan adalah suatu proses melaksanakan atau menerapkan kebijakan melalui serangkaian tindakan operasional untuk menghasilkan *outcome* yang diinginkan.

2.1.5 Faktor Penghambat dan Pendukung Implementasi Kebijakan

Melahirkan sebuah kebijakan bukan suatu hal yang mudah dilakukan. Lahirnya kebijakan sangat dipengaruhi oleh faktor tingkat, luas cakupan, dan sasaran.

Pada tatanan implementasi pun, persoalan yang sama terjadi, bahkan menjadi lebih rumit lagi karena dalam melaksanakan satu kebijakan selalu terkait dengan kelompok sasaran dan birokrat itu sendiri. Tidak saja dalam proses implementasi, dalam realitas ditemukan juga walaupun kebijakan dengan tujuan yang jelas telah dikeluarkan tetapi mengalami hambatan dalam implementasi (tidak atau belum dapat diimplementasikan) karena dihadapkan dengan berbagai kesulitan atau hambatan.

Lebih lanjut, terdapat 5 aspek yang menentukan tingkat implementabilitas kebijakan publik, yaitu:

a. sifat kepentingan yang dipengaruhi

Dalam proses implementasi satu kebijakan publik seringkali menimbulkan konflik dari kelompok sasaran atau masyarakat, artinya terbuka peluang munculnya kelompok tertentu yang diuntungkan (*gainer*), sedangkan dipihak lain implementasi kebijakan tersebut justru merugikan kelompok lain (*looser*).

Dampak lanjutan yang muncul kemudian adalah berasal dari orang-orang yang merasa dirugikan. Upaya untuk menghalang-halangi, tindakan *complain*, bahkan benturan fisik bisa saja terjadi. Singkatnya, semakin besar konflik kepentingan yang terjadi dalam implementasi kebijakan publik, maka semakin sulit pula proses implementasi nantinya, demikian sebaliknya.

b. kejelasan manfaat

Menjadi keharusan sebuah pemerintahan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang muncul dalam masyarakat. Meski tidak bisa dikatakan seluruh persoalan dapat diselesaikan. Keterbatasan diri pemerintah sendiri tersebut yang kemudian ditutupi dengan pemberdayaan masyarakat atau melalui LSM dan organisasi lainnya untuk menyelesaikan persoalan yang muncul dalam masyarakat. Hal penting yang harus dipahami adalah upaya pemerintah dalam menyelesaikan persoalan haruslah dimaknai sebagai usaha penciptaan manfaat untuk masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung.

Jika dilihat dari aspek bermanfaat atau tidak, maka semakin bermanfaat implementasi kebijakan publik, dengan sendirinya dalam proses implementasi

nantinya akan lebih mudah, dalam artian untuk waktu yang tidak begitu lama implementasi kebijakan dilaksanakan serta mudah dalam proses implementasi, sebaliknya bila tidak bermantap maka akan sulit dalam proses implementasi lebih lanjut.

e. perubahan perilaku yang dibutuhkan

Aspek lain yang harus diperhatikan dalam implementasi kebijakan publik adalah perubahan perilaku kelompok sasaran atau masyarakat. Maksudnya, sebelum implementasi kebijakan kelompok sasaran atau masyarakat melakukan sesuatu dengan pola implementasi kebijakan terdahulu. Ketika satu kebijakan baru diimplementasikan, terjadi perubahan baik dalam finansial, cara atau tempat dan sebagainya. Perubahan tersebut akan menimbulkan resistensi dari kelompok sasaran.

Masalahnya, lebih banyak implementasi kebijakan yang menuntut perubahan perilaku, baik sedikit atau banyak, artinya pengambil kebijakan seharusnya memilih alternatif kebijakan yang paling kecil menimbulkan pengaruh pada perubahan perilaku kelompok sasaran atau masyarakat. Dalam hal ini pengambil kebijakan perlu menghindari pengambilan kebijakan yang menuntut perubahan perilaku terlalu jauh, dan tentunya tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, atau pola hidup masyarakat yang sudah turun temurun.

d. aparat pelaksana

Aparat pelaksana atau implementor merupakan faktor lain yang menentukan apakah satu kebijakan publik sulit atau tidak diimplementasikan. Komitmen untuk berperilaku sesuai tujuan kebijakan penting dimiliki oleh aparat pelaksana. Dalam hal ini diperlukan pengembangan aturan yang jelas dan sistem monitoring dan kontrol yang efektif dan transparan yang dapat mencegah kemungkinan terjadinya perilaku aparat yang berlawanan dengan tujuan publik tersebut. Selain itu, masyarakat perlu diberdayakan agar lebih kritis dalam mensikapi perilaku aparat yang menyimpang. pilihan program merupakan upaya mengimplementasikan kebijakan *in-built* mekanisme yang menjamin transparansi dan pengawasan, hal ini penting untuk mengarahkan perilaku aparat. Selain itu, kualitas aparat dalam melaksanakan proses

implementasi pun menjadi kendala yang sering dijumpai. Terutama, menyangkut implementasi kebijakan yang membutuhkan ketrampilan khusus.

Dengan demikian memberikan indikasi bahwa aparat pelaksana kebijakan menjadi salah satu aspek untuk menilai sulit tidaknya implementasi kebijakan. Komitmen, kualitas dan persepsi yang baik nantinya akan memudahkan dalam proses implementasi kebijakan dan sebaliknya.

e. Dukungan sumber daya

Suatu program akan dapat terimplementasi dengan baik jika didukung oleh sumber daya yang memadai, dalam hal ini dapat berbentuk dana, peralatan teknologi, dan sarana serta prasarana lainnya. Kesulitan untuk melaksanakan satu program terkait erat dengan beberapa hal yang disebut terakhir, bila sumber daya yang ada tidak mendukung maka implementasi program tersebut nantinya dalam implementasi program tersebut akan menemui kesulitan.

Kelima faktor yang menentukan sulit atau tidaknya proses implementasi kebijakan publik di atas oleh William Dunn yang dialih bahasakan oleh Muhajir Darwin (2000:112) nampaknya diuraikan secara umum, dalam pengertian tidak dibedakan mana aspek organisasi serta mana faktor lingkungan. Dikatakan bahwa perbedaan antara studi implementasi dengan penelitian ilmiah biasa terletak di dalam variabel penelitian (khususnya variabel independen). Dimana, penelitian ilmiah biasa bebas menentukan variabel independen, artinya variabel yang secara teoritis penting, dapat dijadikan variabel independen atau dependen sebagai obyek atau topik penelitian. Sedangkan studi implementasi, ada keharusan dimana variabel penelitian (independen) adalah variabel yang *comparable* (dapat diimplementasikan), disebabkan oleh variabel-variabel independen tersebut digunakan untuk memperbaiki implementasi kebijakan, karenanya tidak semua variabel dapat dijadikan topik untuk studi implementasi.

Lebih lanjut Dunn menyatakan bahwa ada tiga variabel independen (faktor pengaruh), yaitu :

a. variabel kebijakan

Yang termasuk variabel kebijakan adalah kejelasan tujuan kebijakan, transmisi (penyampaian kebijakan). Tujuan yang tidak jelas dan penyampaian kebijakan kepada implementor menimbulkan perbedaan persepsi. Kondisi ini akan menyulitkan dalam proses implementasi kebijakan nantinya.

b. Variabel atau faktor organisasi

Satu kebijakan publik harus dilaksanakan melalui sebuah instrumen atau alat serta wahana tertentu, singkatnya tidak ada kebijakan publik tanpa terkait dengan alat tertentu. Instrumen untuk melaksanakan kebijakan publik ini dalam konteks administrasi negara dilaksanakan melalui organisasi atau organisasi publik. Organisasi yang dimaksudkan penulis bukanlah struktur organisasi tetapi lebih pada personil (aparatur pelaksana).

c. Variabel atau faktor lingkungan implementasi

Suatu kebijakan yang dilaksanakan oleh organisasi atau sekelompok organisasi tidak terjadi pada ruang hampa, tetapi terjadi pada lingkungan implementasi tertentu. Lingkungan implementasi bisa berbentuk kondisi pendidikan masyarakat, kondisi sosial dimana kebijakan itu diimplementasikan serta kondisi politik.

Pernyataan di atas mengasumsikan, jika satu kebijakan dilaksanakan dalam dua lingkungan yang berbeda akan memberikan hasil yang berbeda pula. Artinya, penerapan kebijakan harus memperhatikan lingkungan kebijakan dimana dia diimplementasikan. Ketiga variabel di atas, walaupun disebut sebagai variabel yang mempengaruhi keberhasilan atau untuk mengukur kinerja implementasi kebijakan, artinya untuk mengukur sejauh mana kebijakan yang telah diimplementasikan mencapai tujuan kebijakan. Tetapi variabel tersebut dapat dimodifikasi sebagai faktor-faktor yang menghambat implementasi kebijakan, dalam pengertian faktor-faktor yang mempersulit sehingga implementasi kebijakan tidak bisa atau belum dapat direalisasikan.

2.2 Analisis Kebijakan

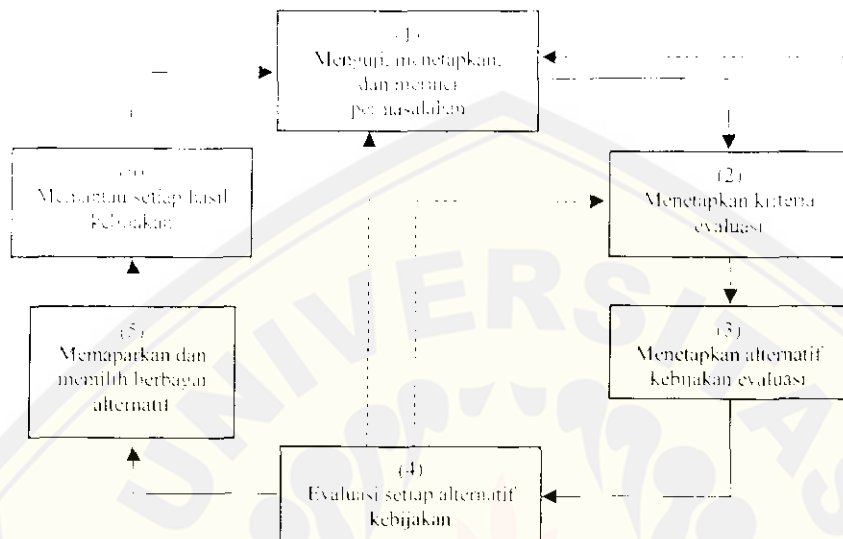
Analisis Kebijakan merupakan proses mencipta, menilai, dan mengomunikasikan pengetahuan (yang relevan dengan kebijakan) dalam satu atau lebih tahap proses pembuatan kebijakan (Anharuddin, 2007). Lebih jelas hal tersebut diterangkan William N. Dunn, pakar analisis kebijakan Amerika Serikat, dalam bukunya *Public Policy Analysis: An Introduction*, melalui kutipan di bawah ini (Dunn, 2000:25):

"...suatu bentuk analisis yang menghasilkan dan menyajikan informasi sedemikian rupa sehingga dapat memberikan landasan bagi para pembuat kebijakan dalam membuat keputusan... Dalam analisis kebijakan, kata analisis digunakan dalam pengertian yang paling umum; termasuk penggunaan intuisi, pengungkapan pendapat, dan mencakup tidak hanya pengujian kebijakan dengan memilah-milahnya ke dalam sejumlah komponen, tetapi juga perancangan dan sintesis alternatif baru. Kegiatan-kegiatan yang tercakup dapat direntangkan mulai dari penelitian untuk menjelaskan, atau (sekedar) memberikan pandangan-pandangan terhadap isu-isu atau masalah-masalah yang terantisipasi... sampai dengan mengevaluasi suatu program yang lengkap. Beberapa analisis kebijakan bersifat informal, meliputi tidak lebih dari proses berpikir yang keras dan cermat, sementara lainnya memerlukan pengumpulan data yang ekstensif dan penghitungan yang teliti dengan menggunakan proses matematis yang canggih."

A. J. Catanese & J. C. Syner memetakan analisis kebijakan dalam struktur umum analisis kebijakan, meliputi (Catanese, 1988:66):

1. Penentuan masalah, kemungkinan dan pokok bahasan.
2. Penentuan berbagai kriteria evaluasi.
3. Pencarian berbagai alternatif.
4. Pengevaluasian setiap alternatif.
5. Pemaparan dan pemilihan berbagai alternatif.
6. Pemantauan dan pengevaluasian hasil.

Proses analisis kebijakan secara mudah dapat disajikan dalam bagan seperti Gambar 2.1.



Sumber: Catanese, A. J & Syner, J. C. (ed), 1988

Gambar 2.1. Proses analisis kebijakan dasar secara umum

2.3 Konsep Perencanaan

Konsep perencanaan diartikan secara berbeda oleh para ekonom. Hampir semua buku teks perencanaan mendefinisikan perencanaan secara berbeda. Lebih dari itu para pakar ekonomi pun belum ada kesepakatan tentang pengertian istilah perencanaan (Arsyad, 2005:19).

Menurut Tarigan (2005:3) perencanaan adalah mengetahui dan menganalisis kondisi saat ini, meramalkan perkembangan berbagai faktor *noncontrollable* yang relevan, memperkirakan faktor-faktor pembatas, menetapkan tujuan dan sasaran yang diperkirakan dapat dicapai, menetapkan langkah-langkah untuk mencapai tujuan tersebut, serta menetapkan lokasi dari berbagai kegiatan yang akan dilaksanakan.

Conyers & Hills (dalam Arsyad, 2005:19) mengartikan perencanaan sebagai suatu proses yang berkesinambungan yang mencakup keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan berbagai alternatif penggunaan sumberdaya untuk mencapai tujuan-

tujuan tertentu pada masa yang akan datang. Dari pengertian ini Moekijat (dalam Tarigan, 2005:4) menerjemahkannya menjadi empat elemen dasar perencanaan, yaitu:

1. perencanaan adalah hal memilih dan menghubungkan fakta-fakta serta hal membuat dan menggunakan dugaan-dugaan mengenai masa yang akan datang dalam hal menggambarkan dan merumuskan kegiatan-kegiatan yang diusulkan, yang dianggap perlu untuk mencapai hasil-hasil yang diinginkan.
2. perencanaan adalah suatu usaha untuk membuat suatu rencana tindakan, artinya menentukan apa yang dilakukan, siapa yang melakukan, dan dimana hal itu dilakukan.
3. perencanaan adalah penentuan suatu arah tindakan untuk mencapai suatu hasil yang diinginkan.
4. perencanaan adalah suatu penentuan sebelumnya dari tujuan-tujuan yang diinginkan dan bagaimana tujuan tersebut dicapai.

Pada hakekatnya, perencanaan merupakan sebuah upaya untuk mengantisipasi ketidakseimbangan yang terjadi dan bersifat akumulatif. Artinya, perubahan yang terjadi pada sebuah keseimbangan awal dapat menyebabkan perubahan pada sistem sosial yang kemudian akan membawa sistem yang ada menjauhi keseimbangan pula (Widodo, 2006:2). Dimana perubahan-perubahan yang mengarah pada *disequilibrium system* akan direduksi dan diselesaikan melalui perencanaan yang efektif dan efisien.

2.4 Unsur-Unsur Perencanaan

Ragam perencanaan tentu saja memiliki unsur-unsur penting di dalamnya. Unsur-unsur itulah yang sebenarnya menjadi "jiwa" dari perencanaan. Menurut Tarigan (2005:7), sebuah perencanaan setidaknya memerlukan unsur sebagai berikut:

1. gambaran kondisi saat ini dan identifikasi persoalan, baik jangka pendek, menengah dan panjang. Untuk dapat menggambarkannya diperlukan kegiatan pengumpulan data terlebih dahulu, baik data sekunder maupun data primer;
2. tetapkan visi, misi, dan tujuan umum;

3. identifikasi pembatas dan kendala yang sudah ada saat ini maupun yang diperkirakan akan muncul pada masa yang akan datang;
4. proyeksikan berbagai variabel yang terkait, baik yang bersifat dapat dikendalikan (*controllable*) maupun bersifat di luar jangkauan pengendalian pihak perencana (*non-controllable*);
5. tetapkan sasaran yang diperkirakan dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu, yaitu berupa tujuan yang dapat diukur;
6. mencari dan mengevaluasi berbagai alternatif untuk mencapai sasaran tersebut. Dalam mencari alternatif perlu diperhatikan keterbatasan dana dan faktor produksi yang tersedia;
7. menetapkan lokasi dari berbagai kegiatan yang akan dilaksanakan;
8. menyusun kebijakan dan strategi agar kegiatan pada tiap lokasi berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

2.5 Tipe-tipe Perencanaan

Di Indonesia dikenal tipe-tipe perencanaan sebagai berikut (Tarigan, 2005:14):

1. perencanaan fisik versus perencanaan ekonomi;
2. perencanaan alokatif versus perencanaan inovatif;
3. perencanaan bertujuan jamak versus perencanaan bertujuan tunggal;
4. perencanaan bertujuan jelas versus perencanaan bertujuan laten;
5. perencanaan indikatif versus perencanaan imperatif;
6. *top down* versus *bottom up planning*;
7. *vertical* versus *horizontal planning*;
8. perencanaan yang melibatkan masyarakat secara langsung versus yang tidak melibatkan masyarakat secara langsung.

2.6 Aspek Perencanaan

Sebuah perencanaan harus memiliki daya dukung dari berbagai aspek. Oleh karenanya perhatian khusus terhadap beberapa aspek penting menjadi penentu utama kesuksesan perencanaan. Widodo (2006:24) mengemukakan aspek-aspek yang harus menjadi perhatian dalam perencanaan, antara lain:

1. aspek lingkungan

Aspek lingkungan menjadi aspek pertama dan penting dalam perencanaan. Hal ini dikarenakan segala perencanaan, perencanaan pembangunan khususnya, yang dilakukan akan sangat dipengaruhi oleh kondisi lingkungan. Dimana pada tahap selanjutnya, perencanaan yang dilakukan saat ini pun kemudian akan berpengaruh terhadap kondisi lingkungan di masa mendatang. Sehingga perencanaan yang baik harus memperhatikan aspek lingkungan yang berada pada wilayah perencanaan. Dengan kata lain, perencanaan yang baik harus dapat memotret kondisi lingkungan, baik lingkungan alam atau pun lingkungan sosial masyarakat setempat.

2. aspek kekuatan dan hambatan

Menjadi keharusan dalam perencanaan untuk mengetahui informasi mengenai segala sesuatu yang dapat mendukung dan segala sesuatu yang berpotensi menghambat terselenggaranya sebuah perencanaan. Semisal faktor bencana baik alami ataupun non alami, yang dapat menghambat laju perencanaan. Oleh karenanya daya dukung kekuatan dan hambatan harus menjadi variabel dalam penyusunan perencanaan.

3. aspek sumber daya perencana

Sumber daya perencana, dalam hal ini Badan Perencana Pembangunan baik pusat atau daerah, haruslah terdiri dari sumber daya yang handal. Hal ini penting karena tidak sedikit perencanaan yang baik dan tepat, gagal di tangan perencana yang kurang handal. Lebih lanjut sebuah perencanaan harus disusun berdasar masukan berbagai pihak (*stakeholders*). Hal ini diterjemahkan sebagai penyediaan ruang publik bagi masyarakat umum untuk berpartisipasi. Sehingga perencanaan yang dibuat tepat bagi daerah yang tepat pula.

4. aspek ruang dan waktu

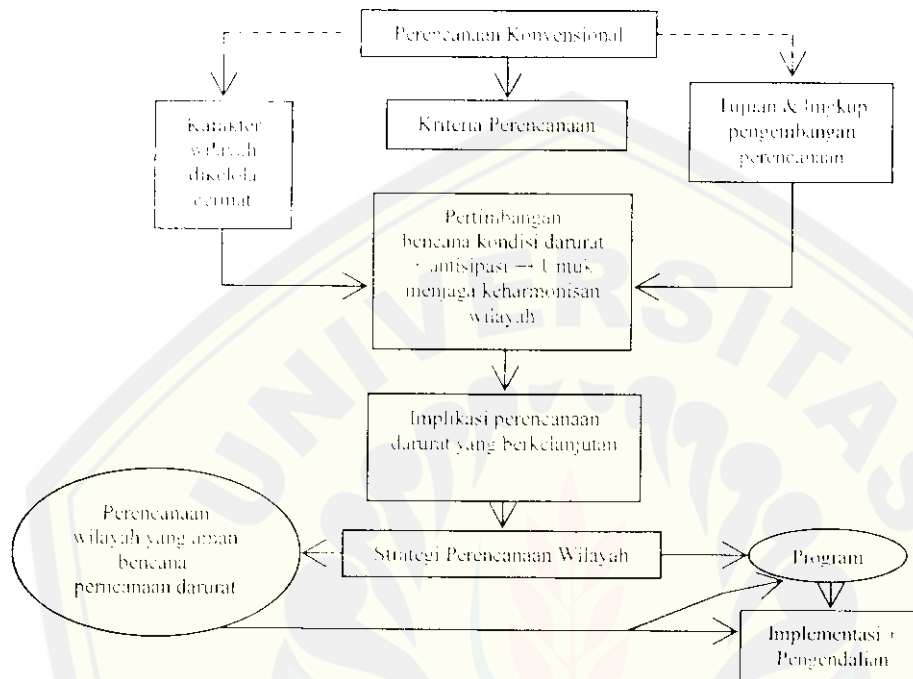
Aspek ruang dan waktu tidaklah dimaksudkan sebagai pembatasan perencanaan dalam membuat perencanaan. Melainkan bertujuan untuk mengarahkan perencanaan dalam membuat rencana agar mencakup berbagai bidang lingkungan seperti sosial, budaya, ekonomi. Bahkan termasuk didalamnya harus mencakup bidang fisik seperti tata letak ruang, tata guna lahan, kondisi tanah hingga kualitas lingkungan udara dan air.

2.7 Perencanaan Darurat

Keinginan daerah atau bangsa untuk mencapai pembangunan dan tingkat pertumbuhan yang tinggi sangat bergantung pada konsep perencanaannya. Perencanaan dikatakan baik bilamana mencakup semua sektor dengan tingkat kelayakan dalam berbagai kondisi. Artinya perencanaan tidak hanya bersifat menciptakan hal baru (*progress*), namun juga harus bersifat antisipatif, seperti munculnya bencana yang *unpredictable*. Sehingga menjadi penting pertimbangan darurat dalam perencanaan.

Menurut Radjiman (2007:3) perencanaan darurat (*emergency planning*) dalam konteks pembangunan daerah didefinisikan sebagai aksi-aksi yang diambil daerah untuk melindungi masyarakatnya dan aset-aset daerah, dari ancaman yang tercipta oleh kemungkinan bencana alam (*natural disaster*) dan bencana buatan manusia (*man made disaster*).

Secara skematik model perencanaan darurat dalam konteks perencanaan pembangunan daerah dapat digambarkan dengan jelas, dalam Gambar 2.2.



Sumber: Radjiman, G. 2007:10

Gambar 2.2 Skema Perencanaan Darurat

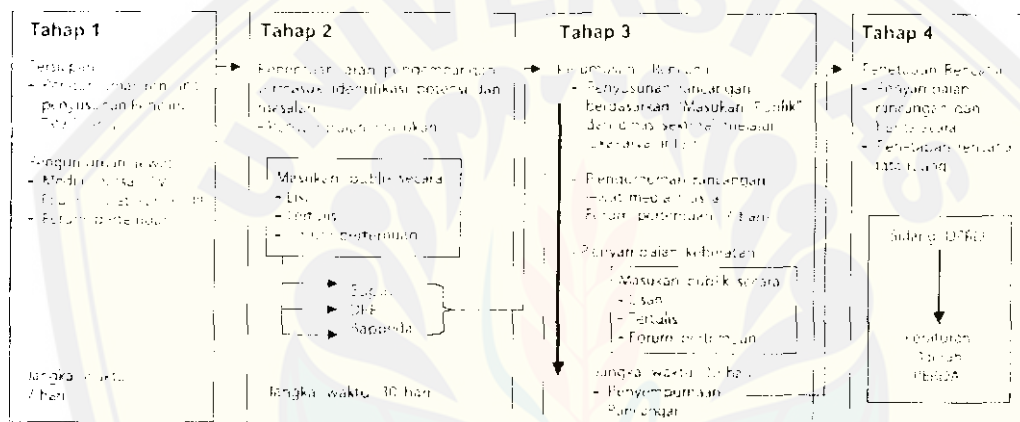
2.8 Participatory Planning

Tuntutan perencanaan dewasa ini adalah adanya peran aktif para *stakeholder* dalam penentuan kebijakan dan strategi pembangunan. Dengan kata lain terjadi pergeseran dari pola perencanaan yang sentralistik (*top-down*) menuju pola perencanaan yang partisipatif (*bottom-up*). Abe (2001:114) mendefinisikan perencanaan partisipatif (*participatory planning*) sebagai perencanaan yang dalam tujuannya melibatkan kepentingan rakyat baik secara langsung maupun tidak langsung.

Abe (2002) melihat adanya dampak positif dari perencanaan yang melibatkan banyak kalangan yaitu:

1. Terbinder dan peluang adanya manipulasi keterlibatan rakyat akan memperjelas apa sebetulnya dikehendaki masyarakat;
2. Memberi nilai tambah pada legitimasi rumusan perencanaan. Semakin banyak yang terlibat semakin baik;
3. Meningkatkan kesadaran dan keterampilan politik masyarakat.

Secara teknis mekanisme partisipasi masyarakat dalam perencanaan tata ruang kota wilayah dapat dilihat pada Gambar 2.3.



Sumber: Warta Kebijakan, 2002

Gambar 2.3 Alur mekanisme pelaksanaan partisipasi masyarakat dalam *partisipatory planning*

2.9 Sustainability Planning

Pearce dan Barbier (dalam Sugandhy, 2002), menyebutkan bahwa maksud perencanaan berkelanjutan adalah untuk memastikan bahwa dengan upaya pembangunan, kesejahteraan generasi mendatang paling tidak akan mempunyai potensi dan peluang ekonomi dan stok kapital baik sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan sama dengan peluang yang diperoleh generasi sekarang.

Sustainability planning bukan hanya terkait dengan faktor lingkungan, ekonomi, bahkan yang lebih penting lagi adalah terselenggaranya sebuah integrasi

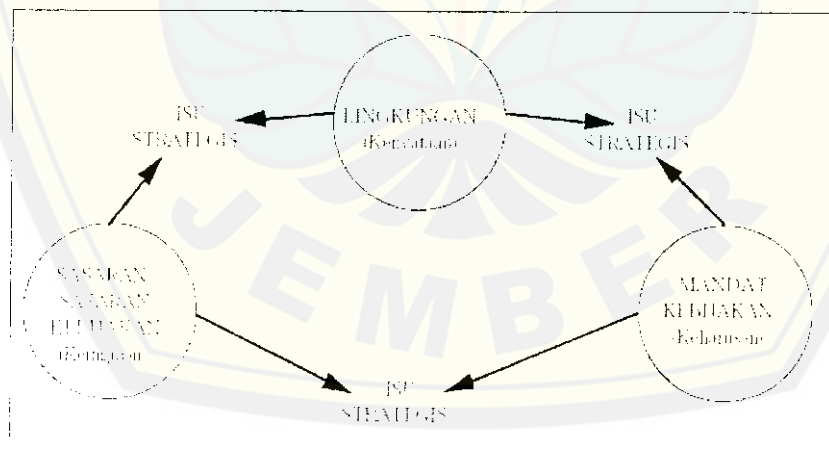
sosial melalui pembaruan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang didalamnya memberikan wadah partisipasi bagi masyarakat.

2.10 Strategic Planning

Perencanaan strategis mempunyai karakter, lebih proaktif berdasar konsensus *stakeholders* mendasarkan diri pada kekuatan dan kelemahan yang ada untuk memanfaatkan peluang dengan mengantisipasi ancaman, berfokus pada beberapa isu strategis saja, dan berorientasi ke implementasi (Djunaedi, tanpa tahun).

Isu-isu strategis muncul dari konflik antar tiga faktor esensial, yaitu:

- 1 tujuan kebijakan kabupaten (hal-hal yang kabupaten ingin mencapainya, dalam arti layanan, keuangan, atau sasaran-sasaran manajemen)
- 2 mandat (penugasan) pelayanan (hal-hal yang harus dilakukan menurut peraturan perundang-undangan)
- 3 kecenderungan dalam lingkungan (perubahan nyata dan dirasakan dalam hal kependudukan, ekonomi, sosial-politik, kebutuhan layanan, dan sebagainya).



Sumber: Kemp, dalam Djunaedi, tanpa tahun

Gambar 2.4 Skema faktor esensial yang mempengaruhi isu-isu strategis

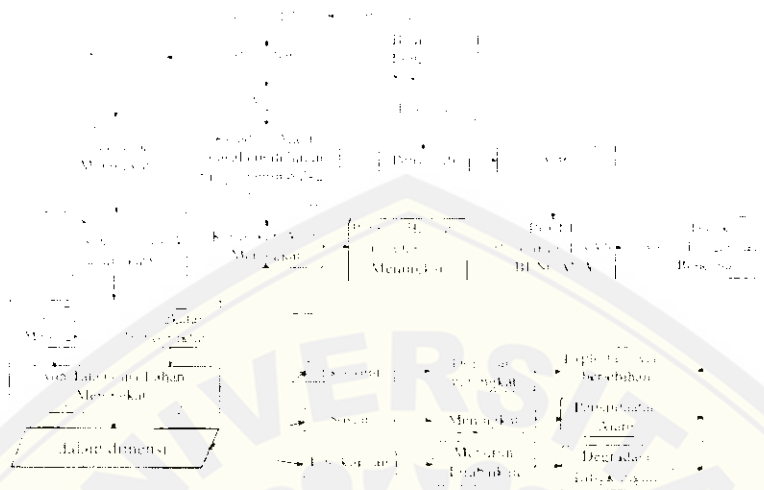
2.11 Konsep Bencana

Dalam buku *Disaster Management A Disaster Manager's Handbook* yang ditulis oleh Carter, bencana didefinisikan sebagai suatu kejadian, alam atau buatan manusia, tiba-tiba atau *progesive*, yang menimbulkan dampak yang dasyat (hebat) sehingga komunitas (masyarakat) yang terkena atau terpengaruh harus merespon dengan tindakan-tindakan luar biasa (Kodoatie & Sjarief, 2006:67). Definisi lain tentang bencana (*disaster*), diambil dari naskah Akademik RUU Tentang Penanganan Bencana (Panja Komisi VIII DPR RI, 2005), adalah suatu gangguan serius terhadap keberfungsian suatu masyarakat sehingga menyebabkan kerugian yang meluas pada kehidupan manusia dari segi materi, ekonomi atau lingkungan dan yang melampaui kemampuan masyarakat tersebut untuk mengatasi dengan menggunakan sumber data-sumber data sendiri.

Namun demikian, Carter (dalam Kodoatie & Sjarief, 2006:67), menerangkan beberapa definisi cenderung merefleksikan karakteristik berikut ini:

1. Gangguan atau kekacauan pada pola normal kehidupan. Gangguan atau kekacauan ini biasanya hebat, terjadi tiba-tiba, tidak disangka, dan wilayah cakupannya cukup luas.
2. Dampak ke manusia seperti kehilangan jiwa, luka-luka, dan kerugian harta benda
3. Dampak ke penduduk utama struktur sosial dan ekonomi seperti kerusakan infrastruktur: sistem jalan, sistem air bersih, listrik, komunikasi, dan pelayanan fasilitas penting lainnya.

Dari uraian tersebut, bencana dan penyebabnya serta pengelolaannya secara sederhana dapat diilustrasikan dalam Gambar 2.5.



Sumber: Kodoatie & Sjarief, 2006

Gambar 2.5 Diagram sederhana kejadian bencana

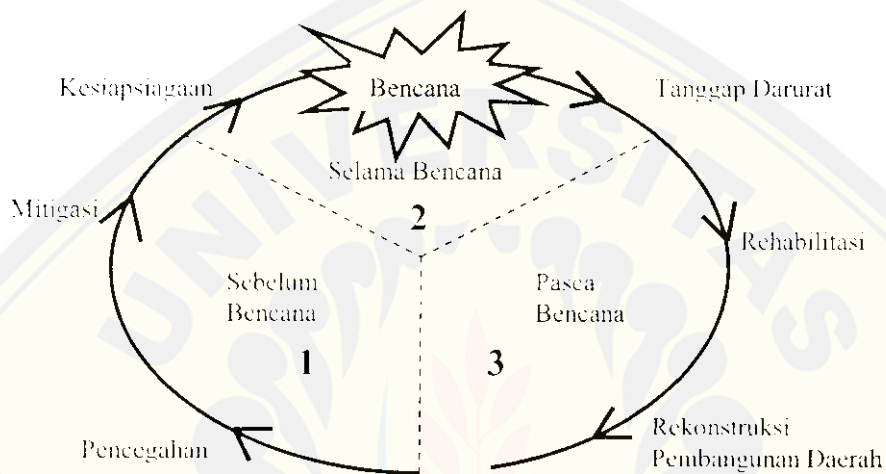
2.12 Disaster Management

Carter (dalam Kodoatie & Sjarief, 2006:69) mendefinisikan pengelolaan bencana (*disaster management*) sebagai suatu ilmu pengetahuan terapan (aplikatif) yang mencari, dengan observasi sistematis dan analisis bencana, untuk meningkatkan tindakan-tindakan (*measures*) terkait dengan preventif (pencegahan), mitigasi (pengurangan), persiapan, respon darurat, dan pemulihan. Dimana phase utama dan fungsi pengelolaan atau manajemen secara umum termasuk dalam pengelolaan bencana, meliputi: Perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan, penganggaran, keuangan.

Secara lebih spesifik pengelolaan bencana terpadu diartikan sebagai suatu proses yang mempromosikan koordinasi pengembangan dan pengelolaan bencana dan pengelolaan aspek lainnya yang terkait langsung maupun tidak langsung dalam rangka tujuan untuk mengoptimalkan resultan kepentingan ekonomi dan kesejahteraan sosial khususnya dalam kenyamanan dan keamanan terhadap bencana dalam sikap yang tepat tanpa mengganggu kestabilan dari ekosistem.

Pengelolaan bencana terpadu dapat dikelompokkan dalam 3 elemen penting, yaitu *the enabling environment*, peran-peran institusi (*institutional roles*), dan alat-alat manajemen (*management instruments*).

Secara siklus kegiatan pengelolaan bencana dapat diilustrasikan dalam Gambar 2.6.



Sumber: Radjiman, G. 2007:11

Gambar 2.6 Siklus kegiatan pengelolaan bencana

2.13 Proses Hirarki Analitik (*Analytical Hierarchy Process/AHP*)

AHP telah dikembangkan oleh Thomas L. Saaty, seorang ahli matematika dari Universitas Pittsburg, Amerika Serikat dan dipublikasikan dalam bukunya yang berjudul *The Analytic Hierarchy Process* pada tahun 1980. AHP pada dasarnya didesain untuk menangkap secara rasional persepsi orang yang berhubungan sangat erat dengan permasalahan tertentu melalui prosedur yang didesain untuk sampai pada suatu skala preferensi diantara berbagai set alternatif.

Analisis ini ditujukan untuk membuat suatu model permasalahan yang tidak mempunyai struktur, biasanya ditetapkan untuk memecahkan masalah yang terukur (kuantitatif), masalah yang memerlukan pendapat (*judgement*) maupun pada situasi yang kompleks atau tidak terkerangka, pada situasi dimana data, informasi statistik

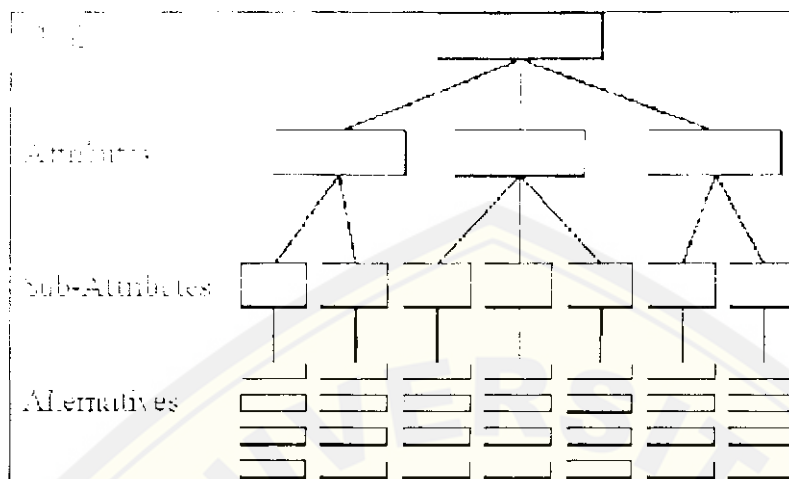
sangat minim atau tidak ada sama sekali dan hanya bersifat kualitatif yang didasari oleh persepsi, pengalaman ataupun intuisi. AHP ini juga banyak digunakan pada keputusan untuk banyak kriteria, perencanaan, alokasi sumberdaya dan penentuan prioritas dari strategi-strategi yang dimiliki pemain dalam situasi konflik (Saaty, 1991:03).

Ciri khas dari model proses analitis berjenjang ini adalah penentuan skala prioritas atas alternatif pilihan berdasarkan suatu proses analitis secara berjenjang, terstruktur atas variable keputusan. Adapun bangunan dasar konsep matematis yang dipakai adalah matriks (*matrix*).

Saaty (dalam Kristof:2005) menyatakan bahwa AHP memiliki beberapa aksioma yang mendasari penyusunan skala preferensi serta konsep dasar dalam penyusunan hirarki.

1. Resiprokal: Jika A adalah sebesar x lebih penting dari B, maka B adalah sebesar $1/x$ lebih penting daripada A.
2. Homogeniti: Hanya variabel setara yang bisa diperbandingkan. Kesetaraan merupakan hal yang sangat penting dalam melakukan perbandingan, kesalahan penilaian akan semakin besar ketika masing-masing variabel yang diperbandingkan memiliki perbedaan cukup besar.
3. Independensi: Masing-masing variabel adalah bersifat bebas/tidak terikat pada variabel yang berada pada level di bawahnya.
4. Ekspektasi: Struktur hirarki harus lengkap dan menunjukkan semua kriteria dan alternatif yang menjadi subjek kajian dalam penelitian.

Dalam studi AHP digunakan suatu hirarki untuk memudahkan dalam analisis dan pemetaan permasalahan. Berikut contoh hirarki sederhana dapat dilihat pada gambar 2.7.



Sumber: Demko, 2005

Gambar 2.7 Contoh penyusunan hirarki dalam studi AHP

Penyusunan hirarki AHP dimulai dengan mendefinisikan fokus/tujuan dari permasalahan. Kemudian mengidentifikasi alternatif secara berhirarki. Selanjutnya, melakukan pilihan prioritas tingkat kepentingan yang memengaruhi fokus/tujuan. Terakhir, alternatif terbaik akan diperoleh dari sejumlah alternatif yang telah dipetakan dalam model.

AHP merupakan analisis yang digunakan dalam pengambilan keputusan dengan pendekatan sistem, dimana pengambil keputusan berusaha memahami suatu kondisi sistem dan membantu melakukan prediksi dalam mengambil keputusan. Unsur terpenting dalam proses hierarki analitik adalah perbandingan berpasangan (*pairwise comparison*) Dalam menyelesaikan persoalan dengan AHP ada beberapa prinsip dasar yang harus dipahami antara lain:

1. Dekomposisi, setelah mendefinisikan permasalahan/persoalan, maka perlu dilakukan dekomposisi, yaitu: memecah persoalan yang utuh menjadi unsur-unsur, sampai yang sekecil-kecilnya.
2. *Comparative Judgement*, prinsip ini berarti membuat penilaian tentang kepentingan relatif dua elemen pada suatu tingkat tertentu dalam kaitannya dengan tingkatan di atasnya. Penilaian ini merupakan inti dari AHP, karena akan

berpemerataan terhadap prioritas elemen-elemen. Hasil dari penilaian ini lebih mudah disajikan dalam bentuk matriks *Pairwise Comparison*.

3. *Synthesis of Priority*, dari setiap matriks *pairwise comparison* vektor *eigen* (ciri)-nya untuk mendapatkan prioritas lokal, karena matriks *pairwise comparison* terdapat pada setiap tingkat, maka untuk melakukan global harus dilakukan sintesis diantara prioritas lokal. Prosedur melakukan sintesis berbeda menurut bentuk hierarki.
4. *Logical Consistency*, konsistensi memiliki dua makna. Pertama adalah bahwa obyek-obyek yang serupa dapat dikelompokkan sesuai keseragaman dan relevansinya. Kedua adalah tingkat hubungan antara obyek-obyek yang didasarkan pada kriteria tertentu. Pendekatan AHP menggunakan skala Saaty mulai dari nilai bobot 1 sampai dengan 9. Nilai bobot 1 menggambarkan "sama penting", ini berarti bahwa nilai atribut yang sama skalanya, nilai bobotnya 1, sedangkan nilai bobot 9 menggambarkan kasus atribut yang "penting absolut" dibandingkan dengan yang lainnya. Skala Saaty dapat dilihat pada Tabel 2.1

Tabel 2.1 Skala Banding Secara Berpasangan

Tingkat Keunggulan	Definisi	Penjelasan
1	Kedua elemen <u>sama penting</u>	Dua elemen mempunyai pengaruh yang sama besar terhadap tujuan
3	Elemen yang satu sedikit <u>lebih penting</u> daripada elemen yang lain	Pengalaman dan penilaian sedikit mendukung satu elemen dibanding elemen yang lainnya
5	Elemen yang satu lebih <u>penting</u> daripada elemen yang lain	Pengalaman dan penilaian sangat kuat mendukung satu elemen dibanding elemen yang lainnya
7	Satu elemen <u>telah lebih penting</u> dari elemen lainnya	Satu elemen dengan kuat didukung dan dominan terlihat dalam praktek
9	Satu elemen <u>melak lebih penting</u> daripada elemen yang lainnya	Bukti yang mendukung elemen yang satu terhadap elemen lain memiliki tingkat penegasan tertinggi yang mungkin menguatkan
2,4,6,8	Nilai-nilai antara dua nilai pertimbangan yang berdekatan	Nilai ini diberikan bila ada dua kompromi diantara dua pilihan
Kebalikan	Jika untuk aktivitas i mendapat satu angka bila dibandingkan dengan aktivitas j, maka i mempunyai nilai kebalikannya bila dibandingkan dengan j	

Sumber : Saaty, L.T (1991:85)

Beberapa keuntungan menggunakan AHP sebagai alat analisis adalah (Saaty, 1991:25):

1. Kesatuan: AHP memberi model tunggal yang mudah dimengerti, luwes untuk beragam persoalan yang tidak terstruktur.
2. Kompleksitas: AHP memadukan rancangan deduktif dan rancangan berdasarkan sistem dalam memecahkan persoalan kompleks.
3. Saling ketergantungan: AHP dapat menangani saling ketergantungan elemen-elemen dalam satu sistem dan tidak memaksakan pemikiran linier.
4. Penyusunan hirarki: AHP mencerminkan kecenderungan alami pikiran untuk memilah-milah elemen-elemen suatu sistem dalam berbagai tingkat berlainan dan mengelompokkan unsur yang serupa dalam setiap tingkat.

5. Pengukuran: AHP memberi suatu skala dalam mengukur hal-hal yang tidak terwujud untuk mendapatkan prioritas.
6. Konsistensi: AHP melacak konsistensi logis dari pertimbangan-pertimbangan yang digunakan dalam menetapkan berbagai prioritas.
7. Sintesis: AHP menuntun ke suatu taksiran menyeluruh tentang kebaikan setiap alternatif.
8. Tawar menawar: AHP mempertimbangkan prioritas-prioritas relatif dari berbagai faktor sistem dan memungkinkan orang memilih alternatif terbaik berdasarkan tujuan-tujuan mereka.
9. Penilaian dan konsensus: AHP tidak memaksakan konsensus tetapi mensintesis suatu hasil yang representatif dari penilaian yang berbeda-beda.
10. Pengulangan proses: AHP memungkinkan orang memperhalus definisi mereka pada suatu persoalan dan memperbaiki pertimbangan dan pengertian mereka melalui pengulangan. Di dalam AHP, penetapan prioritas kebijakan dilakukan dengan menangkap secara rasional persepsi orang, kemudian mengkonversi faktor-faktor yang *intangible* (yang tidak terukur) ke dalam aturan yang biasa, sehingga dapat dibandingkan.

Adapun tahapan dalam analisis data sebagai berikut (Saaty, 1991:56):

1. Identifikasi sistem, yaitu untuk mengidentifikasi permasalahan dan menentukan solusi yang diinginkan. Identifikasi sistem dilakukan dengan cara mempelajari referensi dan berdiskusi dengan para pakar yang memahami permasalahan, sehingga diperoleh konsep yang relevan dengan permasalahan yang dihadapi.
2. Penyusunan struktur hirarki yang diawali dengan tujuan umum, dilanjutkan dengan sub tujuan, kriteria dan kemungkinan alternatif-alternatif pada tingkatan kriteria yang paling bawah.
3. Perbandingan berpasangan, menggambarkan pengaruh relatif setiap elemen terhadap masing-masing tujuan atau kriteria yang setingkat di atasnya. Teknik perbandingan berpasangan yang digunakan dalam AHP berdasarkan "*judgement*" atau pendapat dari para responden yang dianggap sebagai "*key person*". Mereka

daya terdiri atas: 1) pengambil keputusan; 2) para pakar; 3) orang yang terlibat dan memahami permasalahan yang dihadapi.

4. Matriks pendapat individu, formulasinya dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 2.2 Contoh Matriks Perbandingan

		C_1	C_2	C_n
$A = (a_{ij}) =$	C_1	1	a_{12}	A_{1n}
	C_2	$1/a_{12}$	1	A_{2n}

	C_n	$1/a_{1n}$	$1/a_{2n}$	1

Sumber : Saaty, L.T (1991:84)

Dalam hal ini C_1, C_2, \dots, C_n adalah set elemen pada satu tingkat dalam hierarki. Kuantifikasi pendapat dari hasil perbandingan berpasangan membentuk matriks $n \times n$. Nilai a_{ij} merupakan nilai matriks pendapat hasil perbandingan yang mencerminkan nilai kepentingan C_i terhadap C_j .

5. Matriks pendapat gabungan, merupakan matriks baru yang elemen-elemennya berasal dari rata-rata geometrik elemen matriks pendapat individu yang nilai rasio inkonsistensinya memenuhi syarat.
6. Pengolahan horisontal, yaitu : a) Perkalian baris; b) Perhitungan vektor prioritas atau vektor ciri (*eigen vektor*); c) Perhitungan akar ciri (*eigen value*) maksimum, dan d) Perhitungan rasio inkonsistensi. Nilai pengukuran konsistensi diperlukan untuk menghitung konsistensi jawaban responden
7. Pengolahan vertikal, digunakan untuk menyusun prioritas pengaruh setiap elemen pada tingkat hierarki keputusan tertentu terhadap sasaran utama.
8. Revisi Pendapat, dapat dilakukan apabila nilai rasio inkonsistensi pendapat cukup tinggi ($>0,1$). Beberapa ahli berpendapat jika jumlah revisi terlalu besar, sebaiknya responden tersebut dihilangkan. Jadi penggunaan revisi ini sangat terbatas mengingat akan terjadinya penyimpangan dari jawaban yang sebenarnya.



BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Rancangan Penelitian

Jenis penelitian ini dari segi tujuan umum merupakan penelitian evaluasi kebijakan dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Secara garis besar hendak membuat gambaran atau mencandra suatu kebijakan atau fenomena secara sistematis, faktual dengan penyusunan yang akurat.

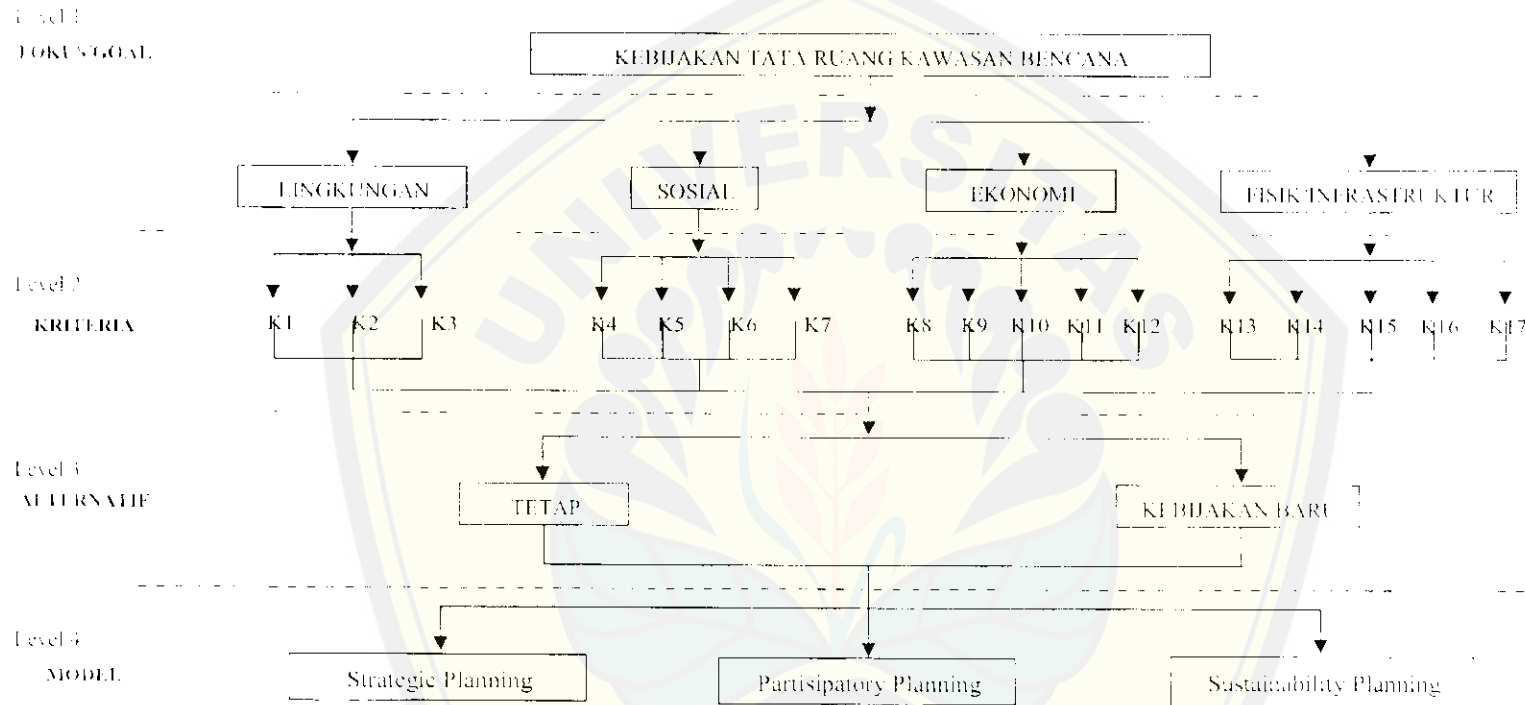
Penelitian ini dititik-beratkan pada analisis kebijakan tata ruang wilayah kecamatan Panti kabupaten Jember pascabencana alam banjir bandang dan tanah longsor. Dimana akan diketahui dari kacamata ahli dalam masalah tata ruang wilayah yang bersangkutan.

Dalam rangka pencapaian tujuan penelitian, dilakukan beberapa tahapan sebagai proses pendekatan masalah. Pertama, dilakukan identifikasi masalah dari berbagai aspek dengan metode pengumpulan data primer dan sekunder yang relevan dengan penelitian. Kedua, dilakukan penggalian pendapat dari kalangan pemerintah, pakar perencanaan kota dan wilayah, serta orang yang dianggap faham tentang perencanaan tata ruang kota/wilayah melalui teknik wawancara dan mengisi kuesioner AHP.

Adapun kerangka permasalahan dapat digambarkan secara skematik ditunjukkan oleh bagan hirarki kebijakan tata ruang kawasan bencana kecamatan Panti kabupaten Jember (Gambar 3.1).

3.2 Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian dilaksanakan pada bulan Mei hingga Oktober 2007. Merupakan interval waktu 1 tahun setelah bencana alam Panti terjadi. Lokasi/tempat penelitian mencakup kawasan bencana alam banjir bandang dan tanah longsor Panti khususnya di empat desa yang tertimpa bencana meliputi, Desa Kemiri, Desa Suci, Desa Glagahwero, dan Desa Panti, Kecamatan Panti Kabupaten Jember.



Gambar 3.1 Hirarki Kebijakan Tata Ruang Kawasan Bencana Kecamatan Panti Kabupaten Jember

3.3 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini diarahkan untuk mendapatkan data primer dan data sekunder. Dimana data primer mencakup: pendapat atau informasi dari kalangan aparat pemerintah, pakar perencanaan tata ruang wilayah, serta orang masyarakat yang dianggap paham dan terkena dampak langsung maupun tidak terkait dengan kebijakan tata ruang wilayah bencana kecamatan Panti kabupaten Jember.

Sedangkan data sekunder didapat dari berbagai sumber, seperti buku referensi, internet, media massa, dan dokumentasi informasi dari instansi terkait. Adapun tahapan pengumpulan data, sebagai berikut:

3.3.1 Wawancara

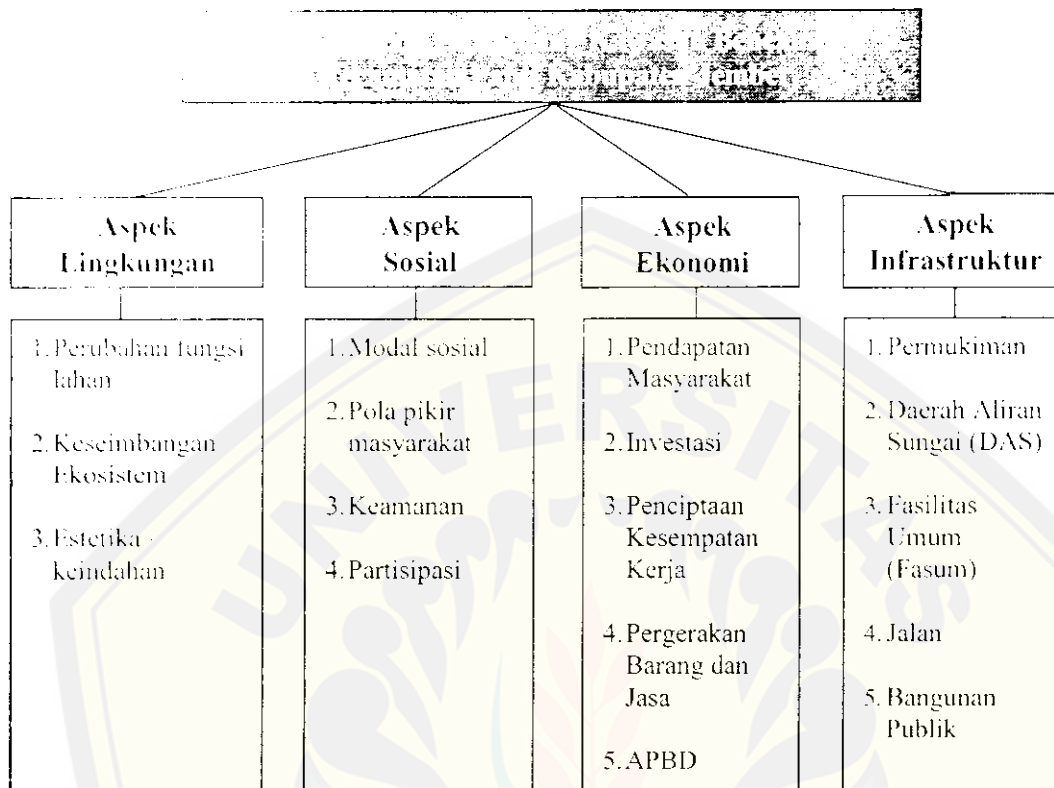
Wawancara (*interview*) dimasukkan sebagai tahapan awal penggalan data dari objek penelitian. Meski demikian dalam tahapan-tahapan lanjutan, observasi, masih tetap dimungkinkan untuk dilakukan wawancara tambahan.

3.3.2 Observasi

Yaitu pengumpulan data dengan cara mengadakan pengamatan langsung ke lokasi penelitian yaitu pada obyek penelitian dengan maksud untuk memperoleh gambaran nyata tentang kegiatan-kegiatan serta gejala-gejala yang ditemui pada obyek penelitian. Kemudian data hasil observasi tersebut dijadikan bahan analisis masalah yang diteliti.

3.3.3 Kuesioner

Tahapan pengumpulan juga diperoleh dari hasil kuesioner. Dalam hal ini peruntukannya dibagi menjadi dua, analisis deskriptif dan AHP. Guna memudahkan analisis maka secara bersama-sama digunakan desain penelitian sebagai berikut (gambar 3.2):



Gambar 3.2 Desain penelitian

Kuesioner disebar dan diisi oleh responden terpilih *expert*. Responden *expert* dipahami sebagai orang yang paham mengenai masalah ketataruangan wilayah kecamatan Panti pascabencana, meliputi pakar perencanaan tata ruang kota wilayah, aparat pemerintah yang terkait dengan bidang perencanaan tata ruang kota wilayah, dan orang yang dianggap faham dan terkena dampak langsung maupun tidak terkait dengan kebijakan tata ruang kecamatan Panti kabupaten Jember pascabencana alam banjir bandang dan tanah longsor.

Usaha penggalian persepsi pendapat ini dilakukan dengan menerapkan teori AHP (*Analytic Hierarchy Process*). Metode pengambilan sampel dalam penelitian AHP adalah *purposive sampling*.

3.3.4 Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara mereview dokumen-dokumen yang dianggap memiliki keterkaitan dengan aspek-aspek yang

Salah satu teknik pengumpulan ini memiliki dua maksud yaitu: Pertama adalah untuk memperoleh data-data tentang pedoman atau ketentuan yang telah ditetapkan tentang Kebijakan Publik (contoh RU TRK). Implementasi kebijakan dan analisis lingkungan kawasan bencana yang berbasis Kecamatan Panti. Kedua adalah sebagai bahan verifikasi terhadap data-data yang telah diperoleh dari wawancara.

Proses pengumpulan data diberhentikan setelah dianggap "Jenuh" yaitu setelah tidak ada jawaban baru lagi dilapangan. Dimana setelah peneliti memperoleh informasi atau jawaban yang sama atau sejenis dari informan-informan baru. Situasi ini ditandai dengan data yang terkumpul selalu menunjukkan hal yang sama dari berbagai situasi dan sumber yang berbeda.

Adapun penunjang lainnya dalam studi dokumentasi didapat dari data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber, meliputi:

1. Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten (BAPPEKAB) Jember;
2. Kantor kecamatan Panti kabupaten Jember;
3. Kantor desa Kemiri, Suci, Galgahwero, dan Panti;
4. Dinas Pekerjaan Umum (DPU) kabupaten Jember;
5. Dinas Kehutanan kabupaten Jember;
6. Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup (DKLH) kabupaten Jember;
7. Satuan Koordinasi Pelaksanaan Penanggulangan Bencana dan Penanganan Pengungsi (Satkorklak PBP) kabupaten Jember ;
8. Studi literatur pustaka, media massa, dan sumber lainnya yang menunjang terlaksanananya penelitian.

3.4 Metode Analisa Data

Untuk keperluan analisis evaluasi kebijakan tata ruang wilayah kecamatan Panti paseabencana alam banjir bandang dan tanah longsor, digunakan dua analisis data yaitu, analisis deskriptif dan AHP (*Analytic Hierarchy Process*).

3.4.1 Analisis Data Deskriptif

Dalam penelitian deskriptif data dianalisis secara kualitatif yaitu dengan menggambarkan atau menguraikan obyek penelitian berdasarkan hasil penelitian

yang dikemukakan. Maksudnya dari hasil penelitian yang di peroleh selanjutnya adalah untuk dijadikan informasi sebagai bahan dasar untuk di analisis serta dibahas secara kualitatif yang berbentuk catatan kemudian dianalisa untuk mendapatkan deskripsi dan klarifikasi yang jelas, tajam, dan komprehensif terhadap permasalahan yang diteliti, termasuk dalam menjelaskan hubungan konsep yang diteliti.

Adapun tahapan-tahapan yang dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan data, yaitu data dikumpulkan berasal dari hasil wawancara, observasi, dan studi dokumentasi.
- b. Mengklasifikasi materi data, langkah ini dimaksudkan untuk memilih data yang representatif dan dapat dipergunakan untuk penelitian selanjutnya. Mengklasifikasikan materi data dilakukan dengan mengelompokan data-data yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan studi dokumentasi.
- c. Editing, yaitu melakukan penelaahan terhadap data yang terkumpul melalui teknik-teknik yang dipergunakan, selanjutnya dilakukan penelitian dan pemeriksaan kebenaran serta perbaikan apabila terdapat kesalahan sehingga memudahkan proses penelitian lebih lanjut.
- d. Menyajikan data yaitu data yang telah ada dengan deskripsi secara verbal kemudian diberikan penjelasan dan uraian berdasarkan pemikiran logis serta memberikan argumentasi dan ditarik kesimpulan.

3.4.2 Analisis Data AHP

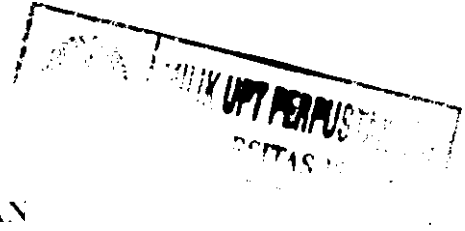
Analisis data AHP digunakan untuk menarik kesimpulan evaluatif tentang kebijakan tata ruang wilayah di Kecamatan Panti kabupaten Jember pascabencana alam banjir bandang dan tanah longsor. Hirarki keputusan dalam penelitian ini, terdiri dari tiga tingkatan. Tingkatan tertinggi sebagai *focus goal* menunjukkan keputusan keseluruhan: kebijakan tata ruang wilayah. Tingkatan tengah (kedua) menunjukkan faktor-faktor yang diperhitungkan, faktor-faktor yang menjadi standar penilaian kelayakan kebijakan: aspek lingkungan, sosial, ekonomi, dan infrastruktur. Tingkatan ketiga menunjukkan alternatif indikator dari variabel pada tingkatan kedua. Terakhir adalah model.

Utama secara lengkap setiap aspek dan kriteria yang menjadi dampak lingga alternatif dan proyeksi model perencanaan tata ruang tanggap bencana dalam analisis kebijakan tata ruang kawasan bencana Kecamatan Panti Kabupaten Jember selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 1.

Dari hasil kuesioner yang telah diisi oleh setiap responden, selanjutnya dianalisis untuk dilihat tingkat konsistensinya dalam menjawab setiap pertanyaan. Apabila nilai rasio inkonsistensinya (*inconsistency ratio*) lebih besar dari 0,1 maka dilakukan revisi pendapat. Namun jika nilai rasio inkonsistensinya sangat besar, maka responden tersebut dihilangkan.

Agar diperoleh analisis data AHP secara akurat dan runtut, maka tahapan-tahapan yang meski dilalui adalah sebagai berikut:

1. melakukan perhitungan data hasil kuesioner yang telah diisi;
2. membagi masing-masing kuesioner dalam beberapa kelompok responden;
3. melakukan analisis hasil perhitungan kuesioner menurut masing-masing kelompok responden, dan dilanjutkan analisis hasil secara keseluruhan.



BAB IV. PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

4.1.1 Kabupaten Jember

Kabupaten Jember mempunyai luas wilayah 3.293,34 km² berada di bagian timur dari wilayah Propinsi Jawa Timur tepatnya pada posisi 113° 25' 00" – 114° 12' 00" BT dan 7° 59' 6" – 8° 33' 56" LS. Batas-batas administrasi wilayah Kabupaten Jember adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah utara : Kabupaten Bondowoso dan Kabupaten Probolinggo
- b. Sebelah selatan : Samudera Indonesia
- c. Sebelah timur : Kabupaten Banyuwangi
- d. Sebelah barat : Kabupaten Lumajang

Dalam pembangunan wilayah Propinsi Jawa Timur, Kabupaten Jember termasuk dalam SWP 13.4. Kabupaten Jember merupakan pusat SWP dari Kabupaten Bondowoso dan Kabupaten Situbondo. Kegiatan utama yang dikembangkan pada SWP ini adalah kegiatan pertanian, industri, perhubungan, pariwisata, perdagangan, dan pendidikan. Sedangkan sub sektor industri kecil yang akan dikembangkan adalah sub sektor aneka industri dan industri kecil.

Menurut data tipologi wilayah, Kabupaten Jember yang terkenal dengan sebutan kota tembakau ini berada pada ketinggian antara 0 – 3.300 m dpl. Daerah yang memiliki kawasan terluas adalah daerah dengan ketinggian antara 100 – 500 m dpl yaitu, 1.240,77 km² (37,68%) dan yang tersempit adalah daerah dengan ketinggian lebih dari 2.000 m dpl yaitu, 31,34 km² (0,95%). Dengan demikian dapat diketahui bahwa wilayah Kabupaten Jember memiliki ketinggian yang bervariasi namun demikian dapat dikatakan bahwa sebagian besar wilayah Kabupaten Jember berada pada area dataran rendah.

4.1.2 Kecamatan Panti Kabupaten Jember

4.1.2.1 Batas Administrasi dan Letak Geografi

Jember merupakan kabupaten yang membawahi 31 kecamatan. Salah satu di antaranya adalah kecamatan Panti. Wilayah Panti terletak kurang lebih 12 km di bagian barat laut ibukota Kabupaten Jember dan mencakup wilayah 160.71 Km² dengan ketinggian rata-rata 71 m dari atas permukaan laut.

Batas Administratif daerah Kecamatan Panti, di sebelah utara berbatasan dengan Pegunungan Argopuro. Di sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Bangsalsari. Di sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Rambipuji. Sedangkan di sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Sukorambi.

Secara administratif Kecamatan Panti terdiri dari 7 desa dan 23 dusun. Desa tersebut meliputi, Panti, Serut, Suci, Kemiri, Pakis, Kemuningsari lor, dan Galagahwero. Kecamatan Panti dalam pengembangan wilayah masuk dalam sub satuan wilayah pengembangan (SSWP) IV Kabupaten Jember bagian Barat-Selatan dengan pusat pengembangan di Kecamatan Balung. Dimana sektor pertanian, tanaman pangan, industri kecil, pariwisata dan perdagangan menjadi prioritas wilayah.

4.1.2.2 Topografi, Geologi, dan Iklim

Data tahun 2005 menyebutkan wilayah Kecamatan Panti berada pada ketinggian antara 130 – 600 m dpl. Dimana Desa Kemiri merupakan daerah dengan area wilayah tertinggi yaitu, 600 m dpl dan Kemuningsari Lor menjadi desa terendah dengan tinggi 130 m dpl. Sedangkan daerah terluas adalah Pakis dengan luas wilayah 26,97 km². Dengan demikian meski beberapa wilayah desa termasuk area tinggi, secara keseluruhan wilayah Kecamatan Panti berada pada area dataran rendah.

Tanah di wilayah Kecamatan Panti sangatlah bervariasi, mulai 0° – lebih dari 40°. 12,44% wilayah memiliki kemiringan 0 – 2°, kemiringan 2 – 15° meliputi 36,28%, dan kemiringan 15 - 40° meliputi 14,83% dari luas wilayah. Wilayah yang berada pada kemiringan >40° meliputi 36,55%, dimana tiga desa, Pakis (26,97 km²).

Suci (22,80 km²), dan Kemiri (14,66 km²) menjadi wilayah yang mayoritas dalam posisi ini.

Kondisi kemiringan lahan yang bervariasi-lebih dari 30% wilayah berada pada kemiringan >40"-selanjutnya menjadi faktor pertimbangan penting perencanaan tata ruang yang akan ditetapkan, baik dipandang dari potensi, kendala lingkungan, maupun segi dampak lingkungan yang berkaitan dengan perubahannya. Disamping itu topografi juga berpengaruh dalam menentukan jenis dan arah penempatan aktivitas yang akan dikembangkan pada suatu daerah.

Morfologi wilayah Kecamatan Panti didominasi oleh kawasan perbukitan. Daerah dengan kemiringan antara 8–15° dimanfaatkan sebagai kawasan permukiman. Daerah dengan kemiringan diatas 40" merupakan daerah perbukitan yang terletak di sebagian utara cocok untuk kawasan lindung. Daerah sebelah timur-selatan-barat meski berbukit masih tergolong daerah landai, sehingga akan berpotensi untuk pengembangan kegiatan pertanian, peternakan, dan perkebunan.

Selanjutnya, dari faktor tanah daerah Panti didominasi oleh dua jenis tanah yaitu, andosol dan latosol. Dua jenis tanah memiliki kandungan organik tinggi dan bertekstur lempung, gembur. Sehingga dapat dipastikan Panti merupakan daerah subur. Selain itu juga karena curah hujan dimiliki cukup tinggi, berkisar >2.500 mm/tahun, dan adanya daerah aliran sungai Kali Putih yang cukup mendukung aktivitas pertanian daerah sekitar. Meski demikian curah hujan yang tinggi selanjutnya harus terus diwaspadai. Mengingat bencana banjir dan tanah longsor disebabkan salah satunya oleh adanya curah hujan yang tinggi dan terus-menerus.

4.1.2.3 Tata Guna Lahan

Sebagaimana layaknya wilayah pada umumnya, tata guna wilayah Panti meliputi berbagai sektor. Namun demikian mayoritas penggunaan lahan di wilayah Kecamatan Panti didominasi oleh lahan pertanian dan perkebunan. Hal ini disebabkan karena memang kondisi lahan pertanian dan perkebunan di Panti sangat subur.

Kondisi di atas sangat sesuai mengingat mata pencaharian utama penduduk Kecamatan Panti adalah sebagai petani yaitu, 59,67%. Adapun persebaran lahan pertanian dan perkebunan ini hampir merata di seluruh wilayah Kecamatan. Kawasan hutan produksi yang ada di Kecamatan Panti adalah berupa hutan jati dan hutan kayu lainnya. Kawasan hutan produksi ini berada di daerah Kemiri atas, masuk di area pegunungan Argopuro.

Sektor industri, di Kecamatan Panti tidak begitu banyak. Dari data penduduk menurut mata pencahariaannya hanya sekitar 1,72%. Industri yang ada meliputi industri rumah tangga seperti industri tahu-tempe, dan bambu. Persebaran lokasi industri hampir di semua desa, namun yang cukup besar berada di Desa Serut dan Glagahwero.

Tata guna lainnya adalah untuk kawasan permukiman, persebarannya merata di seluruh desa. Desa yang memiliki tingkat kepadatan tinggi meliputi, Serut, Suci, Panti, dan Kemiri. Sebagai wilayah kecamatan berordo V, tingkat kepadatan penduduk Panti tergolong rendah-sedang. Jumlah pemukiman hanya 718,4 ha atau sekitar 13% dari total luas wilayah.

4.1.2.4 Kependudukan dan Karakteristik Sosial

Sebagaimana terjadi di semua wilayah, Kecamatan Panti terus mengalami pertumbuhan penduduk dari tahun ketahun. Seperti terlihat pada tahun 2005, jumlah penduduk Kecamatan Panti 57.182 jiwa dengan komposisi laki-laki 27.932 jiwa dan perempuan 29.250 jiwa (sex rasio 95,49%). Meningkat 257 jiwa dari jumlah tahun sebelumnya, 2004, 28.993 jiwa. Namun demikian tingkat persebaran penduduk di Kecamatan Panti sangatlah merata.

Variabel-variabel yang berpengaruh langsung terhadap laju pertumbuhan penduduk, antara lain: kelahiran (fertilitas), kematian (mortalitas), dan migrasi penduduk, perlu adanya pengkajian secara terus-menerus, agar dapat dijadikan dasar dalam pengambilan kebijaksanaan dibidang kependudukan.

Sebagian besar penduduk Kecamatan Panti menjadikan sektor pertanian sebagai pencaharian utama. Menurut data BPS tahun 2005 komposisi penduduk menurut mata pencahariaanya meliputi, sektor pertanian sebanyak 10.142, industri kerajinan sebanyak 292, sektor konstruksi 451, sektor perdagangan 2.307, dan sektor angkutan sebanyak 171.

Tidak hanya tingkat pertumbuhan jumlah penduduk yang meningkat, jumlah peserta didik di Kecamatan Panti juga terus meningkat. Data Kecamatan Panti dalam angka tahun 2005 menunjukkan jumlah peserta didik dari TK hingga SMU baik yang dispendik ataupun non dispendik sebanyak 9669 murid. Komposisi peserta didik di tingkat TK dan dasar (7503 murid), tingkat SLTP (1793 murid), dan tingkat SMU (373 murid). Sedangkan jumlah peserta didik tahun 2004 hanya 9069 murid.

Dengan demikian aspek-aspek misalnya struktur kependudukan dilihat dari berbagai aspek di atas senantiasa penting. Di mana semuanya akan turut memengaruhi dan memiliki implikasi langsung terhadap tata ruang.

4.1.2.5 Keadaan Perekonomian Regional

Sebagaimana paparan singkat di atas bahwa sektor pertanian menjadi mata pencaharian mayoritas masyarakat Panti. Dari total luas wilayah sekitar 56 persennya (93,96 km²) diolah untuk sektor pertanian. Dengan demikian pantas kiranya jika setiap tahun sektor pertanian terus menjadi kontributor terbesar PDRB Kecamatan Panti sebanyak 37.593.053. Dalam hal ini tanaman bahan makanan dan tanaman perkebunan yang menjadi sub sektor paling besar sumbangsuhnya. Selanjutnya disusul sub sektor peternakan dan hasil-hasilnya, perikanan, dan kehutanan.

PDRB tidak hanya disumbang oleh sektor pertanian. Sektor lain pun turut memberikan kontribusi meski tidak sebesar sektor pertanian. Sektor perdagangan, hotel, dan restoran menduduki urutan kedua setelah pertanian dalam memberikan sumbangsuh terhadap PDRB. Menurut PDRB atas harga konstan tahun 2004 sektor perdagangan, hotel, dan restoran memberikan 10.238.717. Penulis beranggapan selain

perdagangan, sektor ini juga didukung dengan 1.216,30 ha luas kawasan hutan produksi dan 876,50 ha kawasan hutan wisata dari total luas hutan 3.734,80 ha.

Sektor pariwisata daerah juga merupakan salah satu aset yang menjadi perhatian khusus Kecamatan Panti dan Kabupaten Jember. Menurut jenis kawasan wisata, wisata air terjun Tancak yang ada di Desa Kemiri Kecamatan Panti ini adalah wisata alam dan pegunungan. Tentunya juga akan menghadirkan pemasukan bagi daerah Panti dan sekitarnya.

Sektor pertambangan dan penggalian menempati posisi buncit dengan total sumbangan 290.414. Hal ini lebih dikarenakan wilayah Panti bukan wilayah dengan sumberdaya tambang yang tinggi. Posisi kedua dari bawah ditempati sektor industri.

Namun demikian secara keseluruhan sektor yang ada terus mengalami peningkatan dalam menyumbang PDRB. Sehingga hal ini diharapkan menjadi sinyal positif terhadap laju perkembangan perekonomian Kecamatan Panti pada khususnya dan Kabupaten Jember pada umumnya.

4.1.2.6 Sistem Transportasi

Transportasi darat merupakan transportasi utama dan satu-satunya Kecamatan Panti. Jalan raya memiliki peran penting dalam menghubungkan akses dari pusat kota ke wilayah Panti atau pun sebaliknya. Meski demikian tidak semua jalan bisa di akses dengan nyaman mengingat hampir 23 km permukaan jalan masih berupa pasir-batu (sirtu) dan tanah.

Kondisi di atas nampaknya juga berpengaruh terhadap pola pergerakan barang di wilayah Kecamatan Panti. Panti tergolong wilayah ordo V yang merupakan daerah kecil dan pedesaan. Sehingga kondisi transportasi yang ada tidak jauh dari pada umumnya desa yang mempunyai tingkat aksesibilitas yang relatif lebih rendah dan struktur dan kondisi jalan yang rendah pula.

4.1.2.7 Lingkungan Permukiman

Kaitannya dengan kesejahteraan sosial masyarakat, keberadaan permukiman ini sangat penting. Selain relevansinya dengan motivasi penduduk untuk mendapatkan berbagai fasilitas pelayanan yang berkaitan dengan kegiatan yang dilakukan sehari-hari.

Penduduk dengan kegiatan jasa dan perdagangan, maupun kegiatan lain yang terkonsentrasi pada suatu pusat kegiatan akan berorientasi pada lokasi-lokasi yang dekat dan mempunyai aksesibilitas yang tinggi. Penduduk dengan kegiatan utamanya adalah pertanian tanaman pangan akan cenderung memiliki permukiman yang tidak jauh dari lokasi lahan pertaniannya.

Demikian pula halnya dengan keadaan permukiman di Kecamatan Panti, karakteristik permukiman yang ada memiliki kesamaan dengan karakteristik permukiman pedesaan. Lingkungan permukiman pedesaan mempunyai karakteristik sebagai berikut:

- a. Luas kavling jauh lebih besar dari pada di kota
- b. Cenderung mendekati dengan lahan pertanian yang dimilikinya
- c. Sifat dari sistem permukimannya adalah tersebar
- d. Fasilitas pelayanan dan utilitas lingkungan relatif kurang
- e. Kecenderungan perkembangan ekstensifikasi lahan
- f. Kecenderungan perkembangan menggeser lahan-lahan pertanian
- g. Lokasi lebih berorientasi kepada lahan kegiatan maupun jaringan jalan untuk menjangkau fasilitas pelayanan, sehingga umumnya pola persebaran rumahnya cenderung linier sepanjang jaringan jalan.

4.1.2.8 Fasilitas dan Pelayanan Sosial

Fasilitas pendidikan yang terdapat di Kecamatan Panti sedikit berbeda pada umumnya daerah. Di wilayah Panti fasilitas pendidikan hanya dari TK sampai SLTP. Meski tingkat SMU ada namun bukan dispendik (non dispendik). Jumlah fasilitas pendidikan secara keseluruhan 39 sekolah meliputi, TK sebanyak 23, SD dispendik

26 dan SD non dispendik sebanyak 13. SLTP dispendik 2 dan SLTP non dispendik sebanyak 6 sekolah. Tingkat SMU hanya disediakan SMU non dispendik dengan jumlah 4 sekolah.

Fasilitas sosial lainnya adalah fasilitas kesehatan dan peribadatan. Jumlah sarana fasilitas kesehatan menurut data Puskesmas 2005 terdapat 1 puskesmas, 3 puskesmas pembantu, 5 polides, dan posyandu sebanyak 70. Fasilitas peribadatan yang ada di Kecamatan Panti hanya dua, masjid dan vihara. Mengingat mayoritas masyarakat Panti adalah muslim, maka masjid dan musholla merupakan fasilitas peribadatan yang paling banyak dijumpai di wilayah ini. Dan juga terdapat 33 pondok pesantren dengan jumlah santri sebanyak 1.835 orang santri. Fasilitas sosial lain yang turut menunjang perekonomian daerah meliputi KUD, koperasi, dan Bank.

4.2 Isu Penataan Ruang Wilayah Kecamatan Panti Pascabencana

Ada beberapa isu penataan ruang wilayah Kecamatan Panti Kabupaten Jember yang diekstrak dari kondisi pascabencana banjir bandang dan tanah longsor dan beberapa peraturan serta kebijakan daerah yang diberlakukan. Pemetaan isu ini dijadikan pembuka kondisi eksisting Kecamatan Panti pascabencana. Selanjutnya dari hal tersebut akan dijawab dalam analisa kebijakan perubahan penataan ruang berikut rekomendasi model yang berdasarkan analisa ekspert. Isu tersebut adalah :

a. Eksploitasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan

Isu degradasi kualitas lingkungan sebagai akibat pemanfaatan sumber daya alam yang tidak terkendali dan tidak terencana dengan baik perlu segera diatasi. Eksploitasi sumber daya alam dan lingkungan ini terjadi di kawasan perbatasan dan di pegunungan Argopuro. Penurunan kualitas lingkungan ini terjadi akibat penebangan hutan secara liar (*illegal logging*) dan pengambilan hasil hutan lainnya. Selain hal di atas, degradasi kualitas lingkungan ini diakibatkan oleh maraknya konversi lahan lindung menjadi lahan budidaya tanam rakyat yang tidak terkendali dan terbukanya lahan-lahan eks tebangan yang belum ditanami dan menjadi lahan-

lahan kritis. Hal ini semua pada gilirannya akan mengurangi potensi sumber daya alam Kecamatan Panti khususnya dan Kabupaten Jember pada umumnya.

b. Perubahan Fungsi Lahan

Masyarakat Panti sebagian besar bermata pencaharian sebagai petani. Dalam hal ini yang paling dominan adalah sektor pertanian dan perkebunan. Sehingga tidak berlebihan jika dikatakan dua sektor tersebut, pertanian dan perkebunan, telah menjadi tombak kehidupan masyarakat Panti.

Ketergantungan masyarakat pun akhirnya terjadi pada dua sektor ini. Namun demikian karena wilayah Panti, khususnya desa Kemiri dan sebagian dusun Desa Suci, notabene berkontur bukit, ketergantungan akan pertanian menjadi masalah. Banyak lahan yang beralih fungsi, dari yang semula termasuk daerah aliran sungai berubah menjadi area tanam padi. Beberapa kawasan lindung pun sudah banyak yang berubah menjadi kawasan budi daya. Selain itu juga bergantinya jenis tanaman. Tanah yang seharusnya ditanami tanaman tahunan digantikan dengan tanaman musiman.

Memang kondisi sebagaimana disebutkan di atas berdampak positif terhadap peningkatan produktivitas pada kedua sektor tersebut. Namun berbagai perubahan yang ada juga menjadikan perubahan ketahanan alam. Area yang sebenarnya berfungsi sebagai penahan (*barrier*) ketika ada hujan tak lagi bisa menahan derasnya aliran air dari lereng gunung. Erosi pun semakin sulit untuk dihidari.

c. Area Relokasi Rawan Bencana

Area relokasi yang masih rawan bencana juga menjadi isu dalam penataan ruang wilayah Panti pascabencana. Kondisi eksisting menggambarkan beberapa tempat relokasi seperti relokasi AFD Gunung Pasang dan Gaplek timur masih berdekatan dengan daerah aliran sungai dan lahan rawan longsor.

Kondisi di atas memang menuntut penyikapan segera tentunya dari pihak pemerintah sebagai penentu kebijakan tata ruang wilayah. Karena jika dibiarkan, dapat dipastikan kerugian material semakin tinggi ketika terjadi bencana susulan. Selain juga adanya tingkat kerawanan di area relokasi nampaknya menjadi

kegelisahan penduduk yang selanjutnya berakibat pada menurunnya modal sosial dan pola pikir masyarakat.

d. Perubahan Pola Pikir Masyarakat

Perubahan yang sangat ekstrim adalah pola pikir masyarakat pascabencana cenderung konsumtif, tidak lagi produktif. Hal ini lebih dikarenakan berkurangnya lahan pertanian yang selama ini menjadi tumpuan hidupnya. Minimnya lahan garapan menjadikan berkurangnya tingkat produksi dan berdampak pada tingkat pendapatan yang rendah.

Memang perubahan pola pikir tidak mutlak seperti di atas. Beberapa penduduk pasca perubahan tata ruang justru semangat. Pola pikir *entrepreneurship* muncul dibuktikan dengan bermunculannya tempat transaksi jual beli seperti, ruko dan penjual mlajo.

4.3 Hasil dan Pembahasan

4.3.1 Analisis Deskriptif Tata Ruang Wilayah Kecamatan Panti

Berbicara tata ruang tidak terlepas dari tiga hal mendasar yaitu, perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian ruang wilayah yang bersangkutan. Sehingga ketepatan yang kemudian membawa dampak baik ataupun tidak tata ruang sangat ditentukan dari penataan ruang yang dilakukan. Begitu halnya dengan kebijakan perubahan tata ruang kawasan bencana Kecamatan Panti.

Dari beberapa isu di atas yang kebenarannya dapat dibuktikan melalui penyebaran kuesioner. Kuesioner dibagi pada 30 responden meliputi pihak masyarakat Panti, khususnya Desa Kemiri, Suci, Panti, dan Galgahwero, masyarakat umum, wartawan, akademisi, dan birokrasi. Keterbatasan beberapa responden dari pihak masyarakat Panti akan pemahaman bahasa kuesioner, membuat peneliti harus membacakan dan menjelaskan detail isi kuesioner. Kondisi ini dalam kajian penelitian kualitatif disebut dengan *emic* (perspektif yang berdasarkan pengetahuan penduduk lokal) dan *etic* (perspektif/pandangan dari orang luar/peneliti). Sehingga peneliti harus pandai dalam menjabarkan *etic* sesuai dengan daya tangkap *emic*.

Namun demikian hal ini membuat 30 kuesioner yang dibagikan dapat terisikan dan kembali dengan lengkap.

Dari hasil kuesioner tersebut kemudian dirangkum dalam analisis deskriptif yang merupakan alat utama penelitian. Analisis deskriptif yang dilakukan sesuai dengan variabel dan indikator dalam desain penelitian (bab III). Analisis deskriptif bertujuan memetakan dampak kebijakan perubahan tata ruang kawasan bencana Kecamatan Panti Kabupaten Jember melalui empat variabel aspek meliputi: (1) variabel lingkungan; (2) variabel sosial; (3) variabel ekonomi; serta (4) variabel infrastruktur. Hasil analisis deskriptif selengkapnya sebagai berikut:

A. Variabel Lingkungan

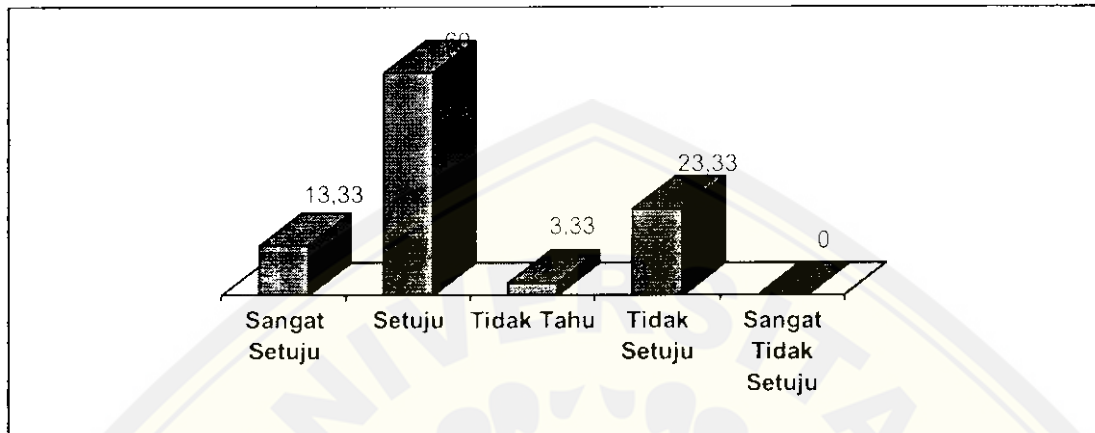
Dalam variabel lingkungan diajukan tiga pernyataan yang selanjutnya dijawab sesuai persepsi responden. Adapun tiga pernyataan tersebut yakni, kebijakan perubahan tata ruang kawasan bencana mengakibatkan perubahan fungsi lahan, penataan tata ruang Kecamatan Panti juga berdampak pada munculnya ketidakseimbangan ekosistem (*unbalance ecosystem*) yang ada, dan penataan tata ruang Kecamatan Panti meningkatkan fungsi keindahan yang dirasakan masyarakat.

Dari total 30 responden yang dihimpun, sebanyak 13,33 persen responden menilai sangat setuju dan 60 persen setuju dengan pernyataan "Kebijakan perubahan tata ruang kawasan bencana mengakibatkan perubahan fungsi lahan. Bahkan tidak jarang terjadi kesalahan pemakaian lahan sebagaimana fungsi sebenarnya."

"...runtutannya setelah bencana membawa kerusakan lahan dan itu membawa perubahan fungsi lahan. Selanjutnya dari lahan yang berubah fungsinya berubah lagi karena ada kebijakan pembangunan pascabencana. Jadi jelas pemakaian lahan yang salah itu ada...." pernyataan Kasun Gludengan, Bp. Sutrisno saat wawancara tanggal 10 November 2007.

Namun beberapa responden, sebanyak 23,33 persen menyatakan tidak setuju adanya kesalahan pemanfaatan lahan wilayah bencana Panti, serta sebanyak 3,33 persen lainnya menyatakan tidak tahu. "...tidak ada salah pemakaian fungsi lahan dalam tata ruang kecamatan Panti. Penataan yang dilakukan telah melalui pengujian

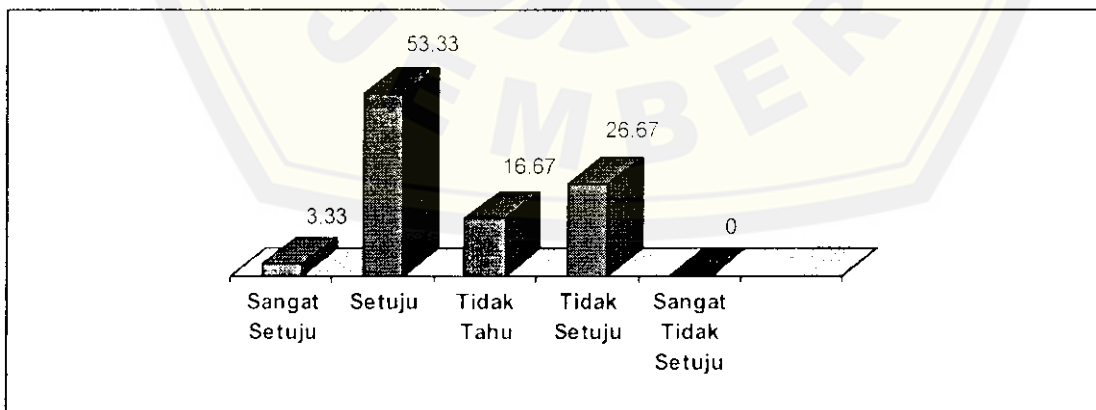
dari berbagai pihak” demikian ujar Suryadi, Camat Panti dalam wawancara tanggal 15 November di Kantor Kecamatan Panti. Jawaban selengkapnya dalam Gambar 4.1



Sumber: lampiran 2

Gambar 4.1 Kebijakan perubahan tata ruang kawasan bencana mengakibatkan perubahan fungsi lahan.

Sama halnya dengan pernyataan pertama, hampir setengah responden menyatakan penataan tata ruang Kecamatan Panti juga berdampak pada ketidakseimbangan ekosistem (*unbalance ecosystem*). Sebanyak 53.33 persen menyatakan kesetujuan dan 26.67 persen tidak setuju. Serta sebanyak 16.67 persen jawaban responden menyatakan tidak tahu. Jawaban responden selengkapnya disajikan pada Gambar 4.2

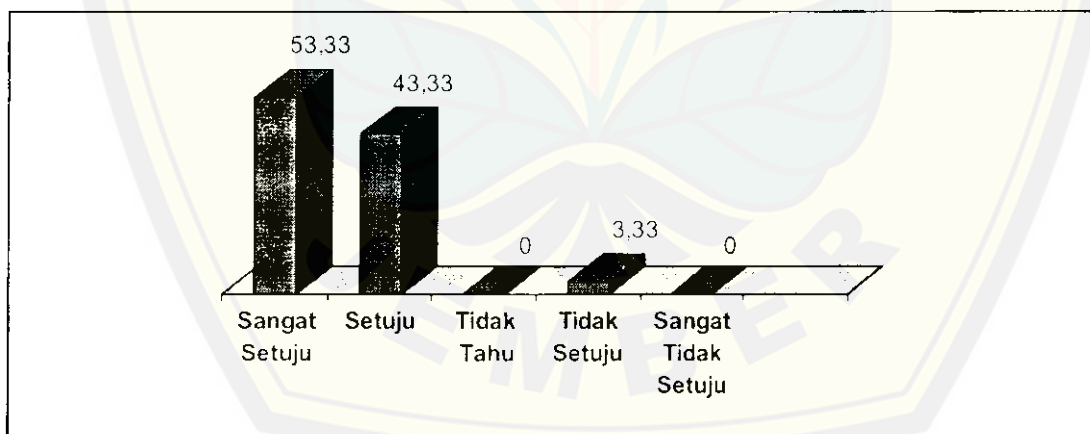


Sumber: lampiran 2

Gambar 4.2 Penataan tata ruang Kecamatan Panti juga berdampak pada munculnya ketidakseimbangan ekosistem (*unbalance ecosystem*) yang ada.

Pada pernyataan ketiga "penataan tata ruang Kecamatan Panti meningkatkan fungsi keindahan yang dirasakan masyarakat" sebanyak 53,33 persen responden menyatakan sangat setuju dan 43,33 persen setuju. Kesetujuan tersebut terlihat dari perkataan KH. Muzammil, Pengasuh Pondok Pesantren Al-Hasan dalam wawancara tanggal 12 November 2007 di kediamannya "...ya, sekarang kondisi desa (Kemiri dan Suci) lebih indah dari sebelumnya. Fasilitas publik sudah terbangun dan lebih tertata."

Namun demikian ada sebagian penduduk yang tetap mengatakan tidak setuju akan dampak keindahan setelah kebijakan. "...dampak kebijakan tidak membawa keindahan sama sekali, yang terjadi justru sebaliknya. Kebijakan hanya terfokus pada area tertentu (daerah relokasi)." ujar Tomas Dusun Gaplek Barat, H. Abd. Jamal. Pernyataan inilah yang mungkin mewakili sekitar 3,33 persen responden yang tidak setuju akan dampak keindahan dari penataan tata ruang. Jawaban responden selengkapnya disajikan pada gambar 4.3



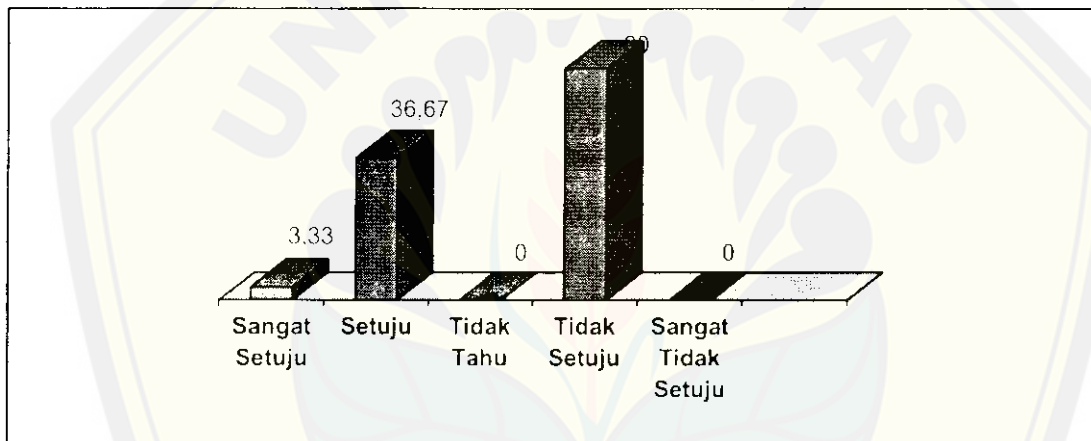
Sumber: lampiran 2

Gambar 4.3 Penataan tata ruang Kecamatan Panti meningkatkan fungsi keindahan yang dirasakan masyarakat

B. Variabel Sosial

Pada variabel sosial, disajikan sebanyak empat pernyataan yang harus ditanggapi responden. Pernyataan pertama "perubahan tata ruang menyebabkan

perubahan ke arah penurunan tingkat kualitas modal sosial masyarakat kawasan bencana Panti” ditanggapi negatif oleh 60 persen responden. Kondisi modal sosial masyarakat tidak mengalami perubahan. “...modal sosial masyarakat tetap, tidak mengalami perubahan sedikit pun, yang berubah justru pola pikir masyarakat pascabencana” ujar Sekretaris Desa Suci, Bp. Mashuri. Namun demikian 36,67 persen responden setuju terhadap perubahan ke arah penurunan modal sosial masyarakat sebagai dampak tata ruang kawasan bencana Panti. Jawaban responden selengkapnya disajikan pada Gambar 4.4.



Sumber: lampiran 2

Gambar 4.4 Perubahan tata ruang menyebabkan perubahan ke arah penurunan tingkat kualitas modal sosial masyarakat kawasan bencana Panti

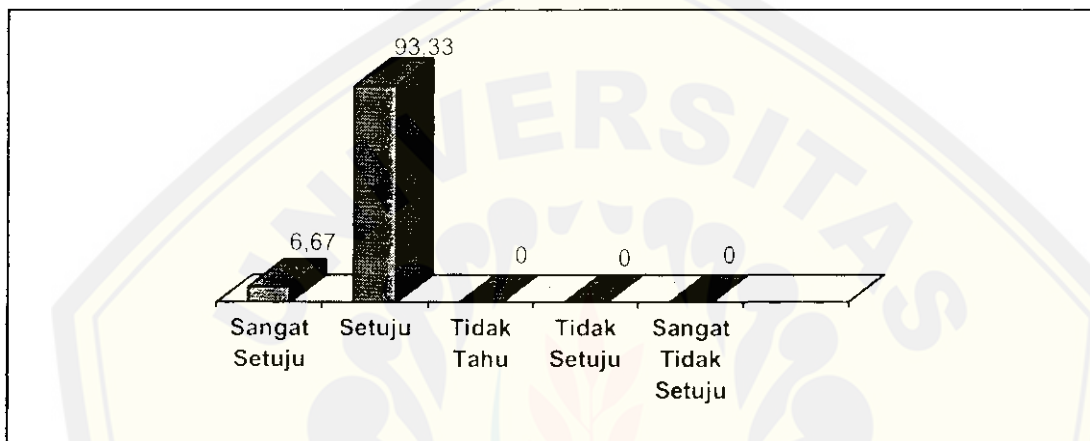
Berbeda dengan pernyataan pertama, pernyataan kedua terkait dampak penataan tata ruang kawasan bencana Kecamatan Panti terhadap perubahan pola pikir masyarakat ditanggapi positif. Hampir semua responden 93,33 persen menyatakan kesetujuannya. Beberapa penduduk mengiyakan pernyataan tersebut. Tokoh masyarakat Dusun Gaplek Barat, H.Abd. Jamal mengatakan

“Masyarakat di sini (Dusun Gaplek Barat) sudah banyak yang berubah. Dahulu mereka sangat produktif, seperti makan dari hasil produksi sendiri. Namun sekarang mereka justru lebih konsumtif di rumah relokasi yang baru.”

Pernyataan lain disampaikan oleh ketua RT 08 Dusun Krajan, Suci. Bp. Suwondo.

"...untuk mencukupi kebutuhan, penduduk banyak bergantung dari toko. Ya, karena banyak penduduk yang kehilangan mata pencaharian. Petani banyak yang kehilangan lahannya. Jadi semua akhirnya beli."

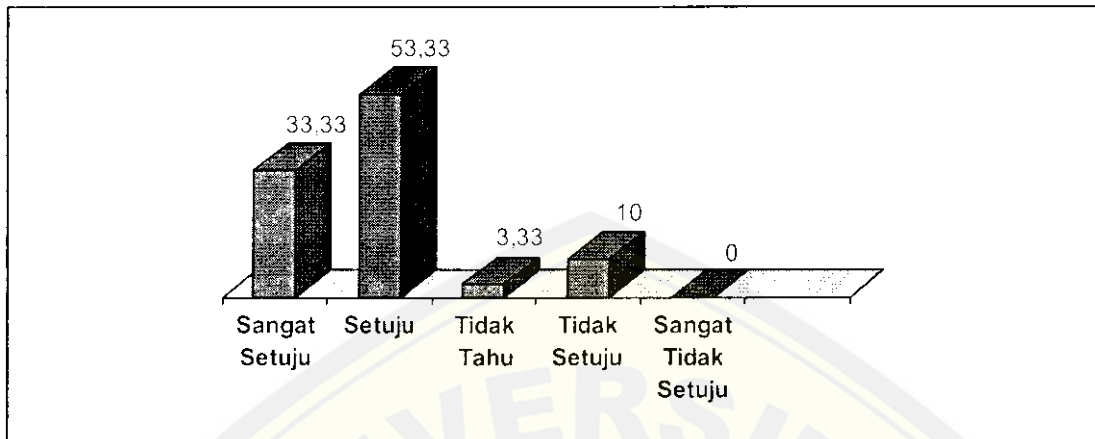
Grafis jawaban lengkap responden disajikan pada Gambar 4.5.



Sumber: lampiran 2

Gambar 4.5 Penataan tata ruang kawasan bencana Kecamatan Panti ternyata membawa perubahan pola pikir masyarakat sekitar.

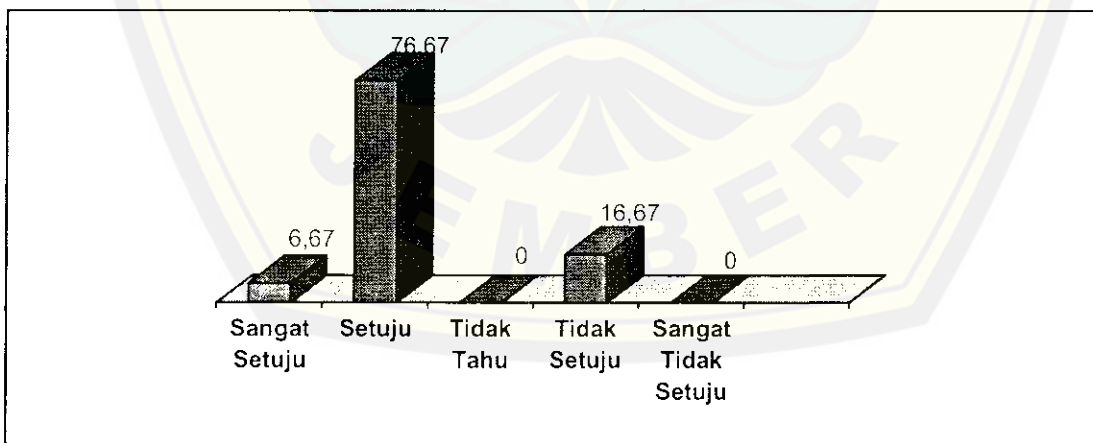
Indikator ketiga dari aspek sosial yaitu penataan kawasan bencana Panti belum berdampak pada peningkatan kualitas keamanan masyarakat. Dalam pernyataan ini sebanyak 33,33 persen responden merasakan ketidakamanan baik dari bencana alam dan kriminalitas. Dan 53,33 persen menyatakan setuju. Jawaban responden selengkapnya disajikan pada Gambar 4.6.



Sumber: lampiran 2

Gambar 4.6 Penataan kawasan bencana Pantai belum berdampak pada peningkatan kualitas keamanan masyarakat. Bahkan kecenderungan rasa tidak aman akan bencana susulan dan kriminalitas yang terus meningkat lebih dominan.

Pada pernyataan keempat "perubahan kebijakan tata ruang Pantai membawa pada tingkat partisipasi masyarakat yang lebih tinggi" 76,67 persen responden menyatakan setuju. Responden yang tidak setuju hanya 16,67 persen. Jawaban responden selengkapnya disajikan pada Gambar 4.7.



Sumber: lampiran 2

Gambar 4.7 Perubahan kebijakan tata ruang Pantai membawa pada tingkat partisipasi masyarakat yang lebih tinggi.

C. Variabel Ekonomi

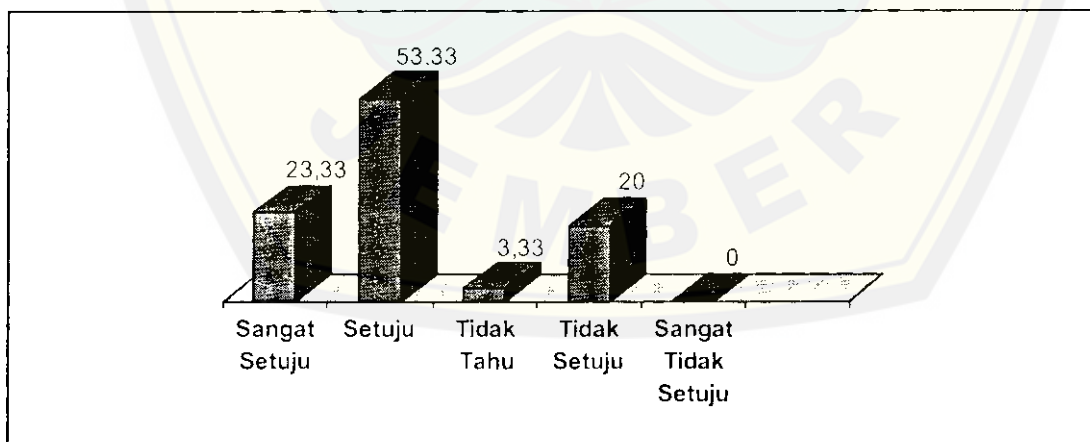
Dalam variabel ekonomi terdapat 8 pernyataan. Pernyataan pertama "kebijakan penataan ulang tata ruang Kecamatan Panti berakibat pada menurunnya tingkat pendapatan masyarakat kawasan bencana Panti" sebanyak 23,33 persen responden menyatakan sangat setuju. Sebanyak 53,33 persen menyatakan setuju.

"...*wah*, kalo masalah ekonomi (pendapatan masyarakat) jelas berkurang Mas. Banyak penduduk yang kehilangan sawah yang jadi tumpuan hidup mereka. Selain juga tempat relokasi yang sangat jauh dari lahan pekerjaan membuat penduduk malas bekerja." ungkap Misto, salah satu penduduk area relokasi Tenggililing, Kemiri.

Pernyataan senada juga diungkapkan penduduk relokasi daerah Glundengan, Kepiring, Bp. Karmin sekeluarga di rumah kediamannya.

"...dari uang yang diterima per bulan yang berkurang jauh. Sebelumnya dari hasil sawah dapat untuk hidup 3-5 bulan. Tapi sekarang sudah *ngga* punya sawah. Jadi ya. *gresek* (mencari pekerjaan seadanya)...."

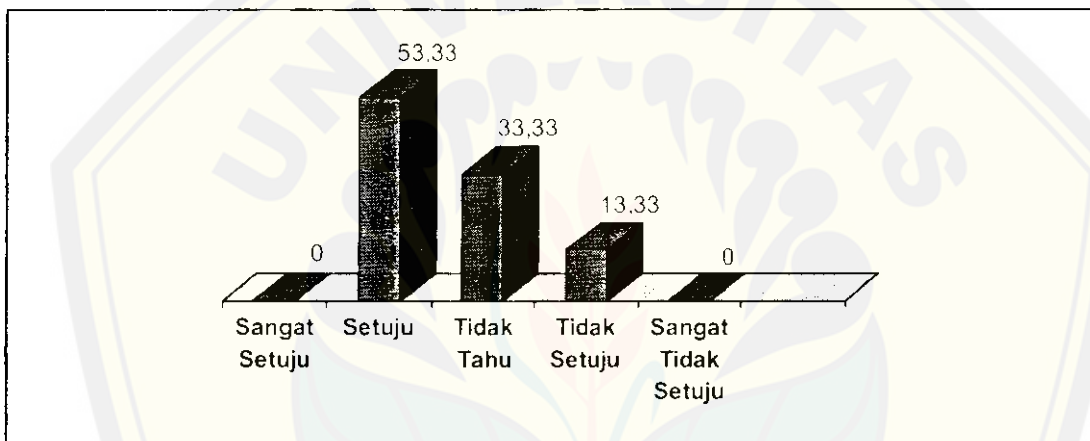
Meski demikian ada sebagian penduduk yang merasa tidak ada perubahan pendapat sama sekali. Sebanyak 20 persen menyatakan tidak setuju Hasil selengkapnya disajikan pada Gambar 4.8.



Sumber: lampiran 2

Gambar 4.8 Kebijakan penataan ulang tata ruang Kecamatan Panti berakibat pada menurunnya tingkat pendapatan masyarakat kawasan bencana Panti.

Sebanyak 53,33 persen responden setuju dengan pernyataan "kebijakan perubahan tata ruang membawa dampak lanjutan terciptanya ruang investasi" dan 13,33 persen menyatakan ketidaksetujuan. Sedangkan 33,33 persen responden menyatakan tidak tahu akan dampak kebijakan tata ruang terhadap terciptanya ruang investasi. Dari hasil wawancara dengan beberapa penduduk tidak paham mengenai investasi. Bahkan beberapa pamong desa hanya mengerti bahwa pembangunan di wilayahnya itu semua adalah dilakukan oleh pemerintah daerah. Berikut hasil selengkapnya pada gambar 4.9.



Sumber: lampiran 2

Gambar 4.9 Kebijakan perubahan tata ruang membawa dampak lanjutan terciptanya ruang investasi.

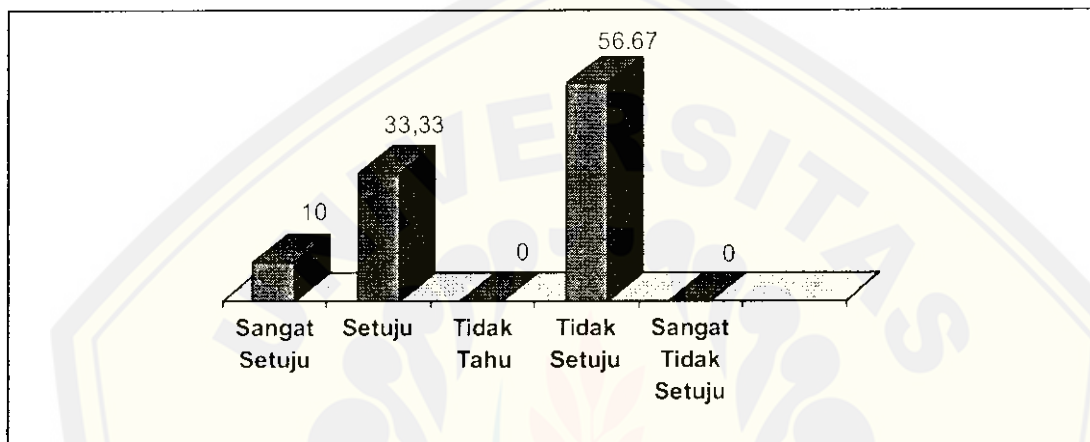
Sebanyak 56,67 persen responden menyatakan tidak setuju dengan pernyataan "Penataan ulang ruang Kecamatan Panti menciptakan beragam kesempatan kerja baru masyarakat kawasan bencana."

Ada yang unik dalam jawaban dari pernyataan di atas. Sewajarnya dan menurut kajian teori ekonomi, yang namanya kebijakan atau pembangunan pasti akan membawa *multiplier effect* sekitarnya. Namun yang terjadi di kawasan bencana Panti tidak seperti itu. Sebagaimana diungkapkan Bp. Rofik, salah satu tomas daerah Gaplek Timur dalam wawancara tanggal 11 November 2007,

"...pembangunan di sini tidak membuka kesempatan kerja penduduk. Persoalannya seluruh pembangunan diborongkan kepada oran luar. Bahkan

yang membuat kami tidak habis pikir, sampai tukang bangunan yang menata bata itu orang Banyuwangi.”

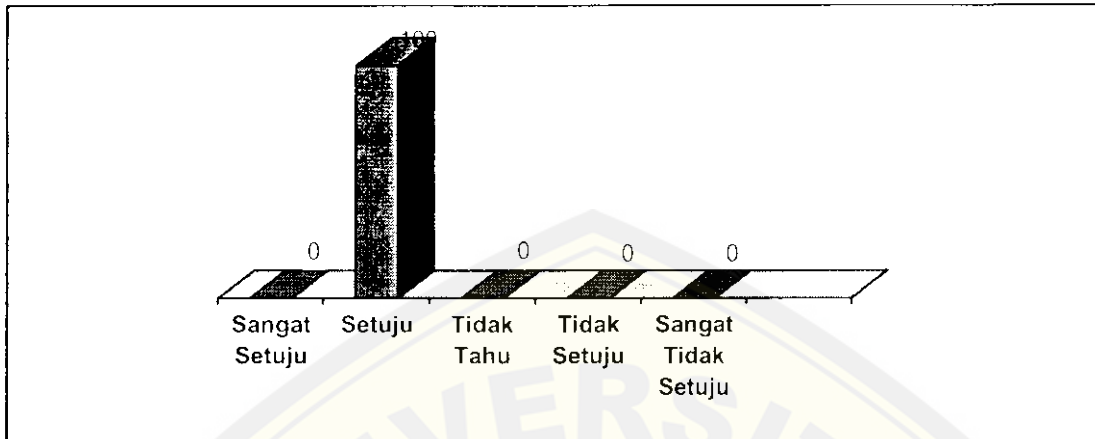
Sebanyak 33,33 persen menyatakan setuju, serta sebanyak 10 persen menyatakan sangat setuju. Jawaban responden selengkapnya disajikan pada Gambar 4.10.



Sumber: lampiran 2

Gambar 4.10 Penataan ulang ruang Kecamatan Panti menciptakan beragam kesempatan kerja baru masyarakat kawasan bencana.

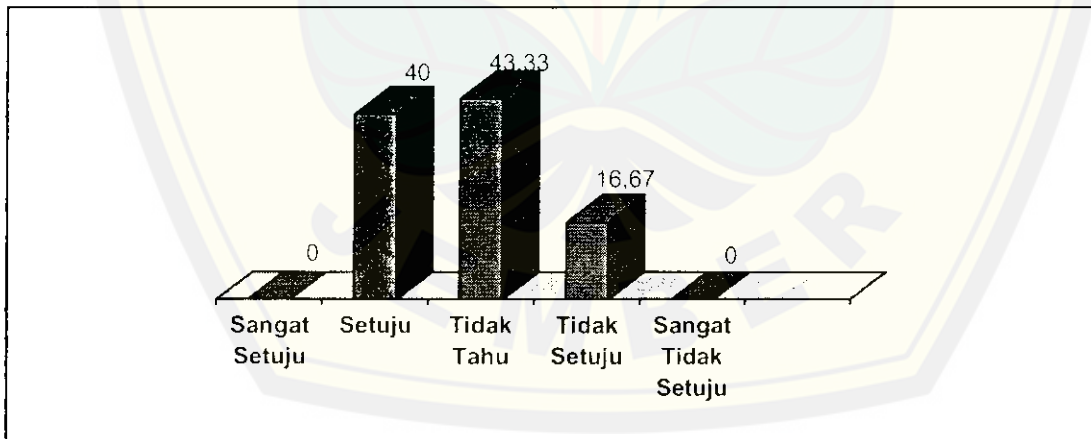
Selanjutnya, seluruh responden menyatakan kesetujuannya terhadap pernyataan “Kebijakan perubahan tata ruang kawasan bencana Panti berakibat pada pergerakan barang dan jasa.” Hasil Jawaban responden selengkapnya disajikan pada Gambar 4.11.



Sumber: lampiran 2

Gambar 4.11 Kebijakan perubahan tata ruang kawasan bencana Panti berakibat pada pergerakan barang dan jasa.

Sebanyak 43.33 persen responden menyatakan tidak tahu terhadap pernyataan "Kebijakan perubahan tata ruang Kecamatan Panti berdampak pada berkurangnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Jawaban responden selengkapnya disajikan pada Gambar 4.12.



Sumber: lampiran 2

Gambar 4.12 Kebijakan perubahan tata ruang Kecamatan Panti berdampak pada berkurangnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

D. Variabel Infrastruktur

Pada variabel infrastruktur, disajikan sebanyak lima pernyataan yang harus ditanggapi para responden. Pernyataan pertama "Kebijakan perubahan tata ruang kawasan bencana Panti belum optimal dalam pembangunan permukiman yang berkualitas. Beberapa permukiman masih berada pada area rawan bencana" dinyatakan benar oleh hampir seluruh responden. Terbukti sebanyak 43,33 persen sangat setuju dan 50 persen responden menyatakan setuju.

Memang beberapa area relokasi permukiman masih terhitung rawan bencana. Kondisi eksisting wilayah relokasi sangat dekat dengan aliran sungai dan area longsor. Menurut Sekdes Suci, Bp. Mashuri dalam wawancara tanggal 13 November 2007 menyatakan

"...dari semua desa yang terkena bencana, hanya dua tempat relokasi di Desa Suci yang masih rawan bencana. Daerah AFD. Gunung Pasang dan Dusun Kepiring."

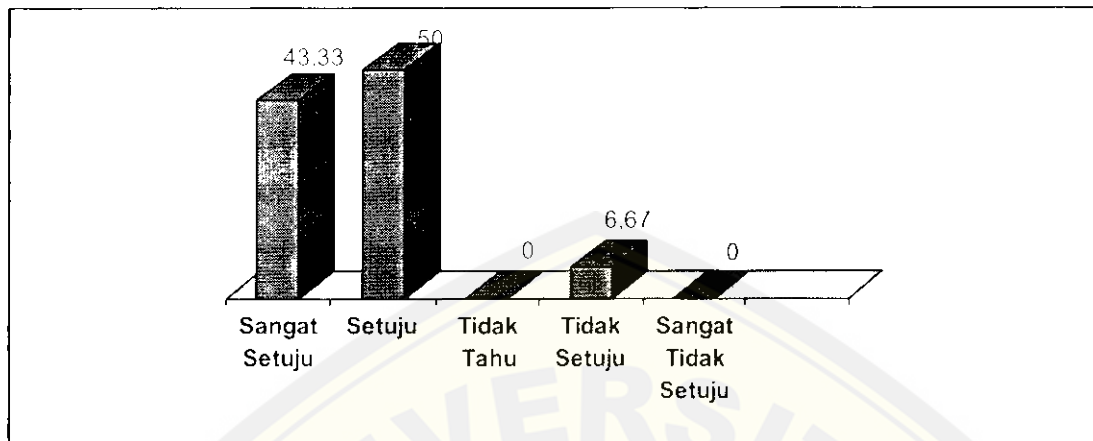
Hal senada diungkapkan salah satu penduduk AFD. Gunung Pasang, Bp. Suda'i yang juga Mandor Besar AFD. Gunung Pasang

"...kalau tempat ini (daerah relokasi AFD. Gn. Pasang) ya masih rawan. Tapi gimana lagi Mas, kita *kan* hanya buruh kebun. Jadi ya harus menerima apa pun kondisinya."

Pembangunan permukiman yang jauh dari optimal tidak berlaku di semua tempat. Di daerah Kemiri misalnya, area relokasi sudah jauh lebih baik dari sebelum bencana.

"Secara keseluruhan tempat relokasi di Desa Kemiri jauh dari pusat air (bencana). Kalaupun sampai ada banjir, air akan mati sebelum nyampai ke tempat relokasi penduduk (Blok A, B,C,D berada di pinggiran Jl. Kemiri)" ujar Bp. Mursadi, Sekdes Kemiri.

Representasi kenyataan tersebut dibuktikan dari sekitar 6,67 persen responden tidak setuju bahwa lokasi permukiman yang baru belum optimal dan cenderung rawan dari bencana. Jawaban responden selengkapnya disajikan pada Gambar 4.13.



Sumber: lampiran 2

Gambar 4.13 Kebijakan perubahan tata ruang kawasan bencana Panti belum optimal dalam pembangunan permukiman yang berkualitas. Beberapa permukiman masih berada pada area rawan bencana.

Persoalan infrastruktur ternyata tidak selesai dalam pembangunan permukiman yang berkualitas. Pembangunan DAS yang berkualitas pun harus menjadi persoalan penting. Baik tidaknya daerah aliran sungai sangat erat hubungannya dengan tingkat kerawanan akan bencana yang terjadi. Dalam konteks tata ruang kawasan bencana Panti, sebanyak 53.33 persen responden menyatakan sangat setuju dengan pernyataan "Penataan ulang ruang Kecamatan Panti kurang memperhatikan penataan daerah aliran sungai (DAS)." 30 persen responden juga masih setuju dengan pernyataan tersebut. Hal tersebut menjadi bukti bahwa kebijakan tata ruang belum berdampak positif bagi terbangunnya DAS yang baik.

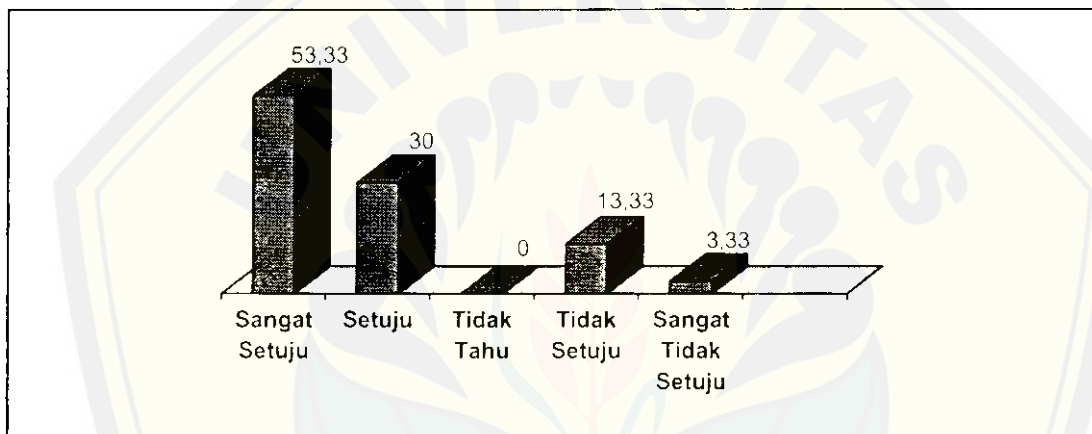
Terkait dengan persoalan tersebut, dalam wawancara tanggal 14 November 2007, Bp. H. Abdul Jamal mengutarakan,

"...secara umum kondisi daerah aliran sungai (DAS) masih memprihatinkan. Coba *sampeyan* lihat (sambil menunjuk daerah aliran sungai Kali Putih di samping rumahnya) batu-batu longsor belum dibersihkan dan ditata. Jadi kalau hujan datang, banjir ya ikut datang."

Pernyataan senada lainnya diungkapkan Sinder AFD Gunung Pasang, Bp. Sudarmin. Sebagai penduduk di area relokasi Gunung Pasang, Suci, dia mengatakan,

"...aliran sungai Dinoyo memang tidak sebegitu parah dibanding aliran sungai Kali putih, tapi masalah penataan memang belum maksimal. Memang sudah dibangun jembatan. Tapi seperti *sampeyan* lihat, jembatan sangat pendek dan dekat air. Jadi kalau banjir datang yang hilang jembatannya."

Namun demikian 13,33 persen responden tidak setuju dan 3,33 persen sangat tidak setuju. Pernyataan mereka merupakan gambaran dari kondisi pribadi responden yang memang berada pada daerah jauh dari aliran sungai. Hasil lengkap jawaban responden disajikan pada Gambar 4.14.



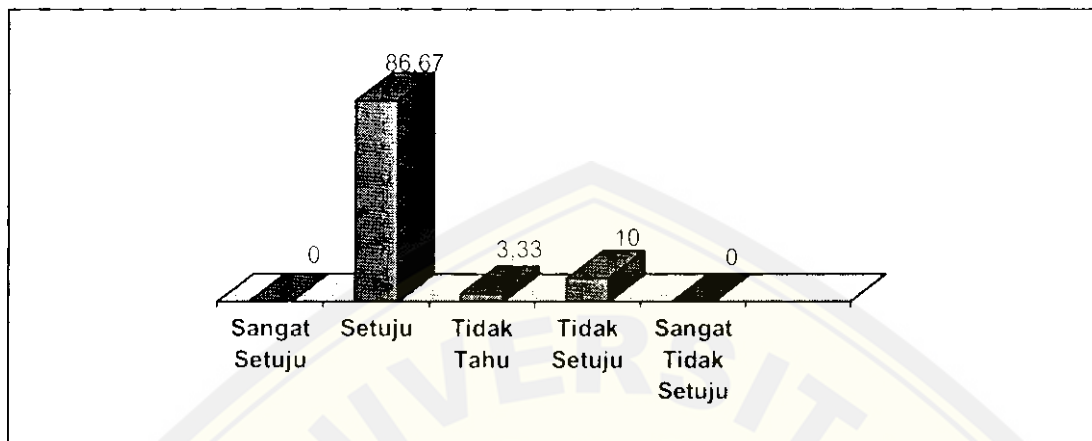
Sumber: lampiran 2

Gambar 4.14 Penataan ulang ruang Kecamatan Panti kurang memerhatikan penataan daerah aliran sungai (DAS)

Pada pernyataan ke tiga "Kebijakan perubahan tata ruang kawasan bencana Kecamatan Panti membawa dampak tersedianya fasilitas umum. Meski cenderung jauh dari standar kelayakan." 86,67 persen responden menyatakan setuju dengan pernyataan tersebut dan hanya 10 persen responden cenderung tidak setuju. Pernyataan ini dibenarkan oleh Camat Panti, Drs. Suryadi.

"Fasilitas umum seperti ketersediaan air, jaringan listrik, tempat ibadah, sudah tersedia dengan baik. Memang ada beberapa yang jauh dari standar layak. Namun secara bertahap dan pasti akan terus kami lakukan perbaikan."

Persentase lengkap jawaban responden disajikan dalam Gambar 4.15.



Sumber: lampiran 2

Gambar 4.15 Kebijakan perubahan tata ruang kawasan bencana Kecamatan Panti membawa dampak tersedianya fasilitas umum. Meski cenderung jauh dari standar kelayakan.

Dampak kebijakan tata ruang tidak semua negatif atau kalau pun ada yang positif cenderung tidak optimal. Terdapat dampak kebijakan yang sangat positif dan optimal seperti terbangunnya ruas jalan. Hal ini terlihat dari apresiasi responden yang tinggi terhadap pernyataan "Kebijakan perubahan tata ruang kawasan bencana Panti memberikan dampak terbangun dan tertatanya beberapa ruas jalan Kecamatan Panti." Sebanyak 76,67 persen menyatakan sangat setuju dan 13,33 persen responden setuju.

Hal ini selaras dengan pendapat Bp. Suwaji, Pengamat Teknik DPU Kec. Panti Cab. Dinas Wilayah Jember Tengah dalam wawancara tanggal 17 November di kantornya,

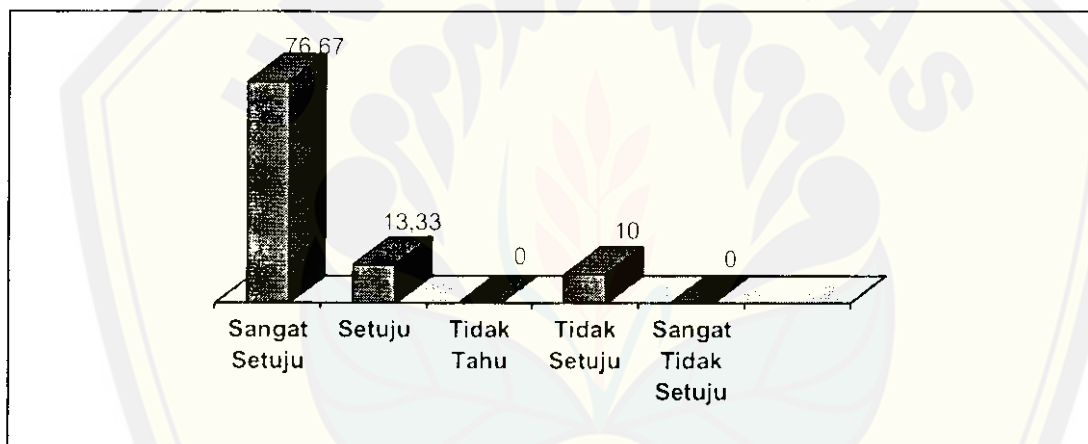
"...dampak positif kebijakan bisa Anda lihat dari terbangunnya ruas jalan sampai daerah terpencil. Jalan lingkungan terbangun baik. Bahkan hampir 85 persen jalan yang menghubungkan antardesa dan dusun di Kecamatan Panti sudah diaspal *hotmix*."

Meski demikian ada kritik menarik terkait fenomena di atas, dampak positif pembangunan jalan dari kebijakan perubahan tata ruang. Direktur Walhi Jawa Timur,

Ridho Syaiful Ashadi, dalam sebuah halaqah lingkungan yang digelar PPMI Cabang Jember tanggal 24 November 2007 menyatakan,

“...dimana-mana, khususnya daerah pegunungan yang terdapat hutan di dalamnya, selalu yang terbangun dengan baik adalah jalan. Hal ini dikarenakan akan tercipta kelancaran mobilitas barang dan jasa. Dalam konteks ini ruang mobilisasi kayu ke kota sebagai bentuk eksploitasi akan lebih mudah.”

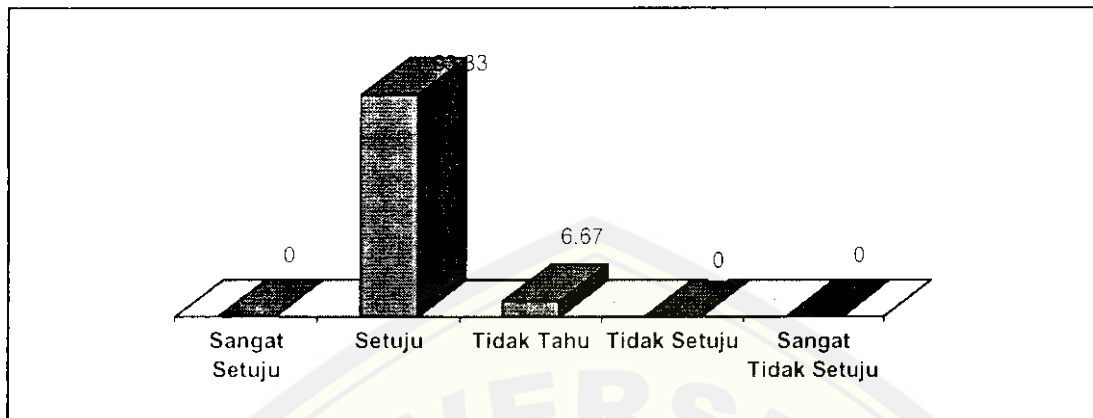
Dari pernyataan di atas terkait dampak kebijakan terhadap jalan, hanya 10 persen responden yang tidak setuju dengan pernyataan tersebut. Jawaban responden selengkapnya disajikan pada Gambar 4.16.



Sumber: lampiran 2

Gambar 4.16 Kebijakan perubahan tata ruang kawasan bencana Panti memberikan dampak terbangun dan tertatanya beberapa ruas jalan Kecamatan Panti.

Sama halnya dengan tanggapan responden terhadap pernyataan bahwa penataan ruang kawasan Panti yang berdampak pada terbangunnya beberapa ruas jalan, 93,33 persen responden juga menyatakan kesetujuannya dengan “Dampak lain dari kebijakan perubahan tata ruang kawasan bencana Panti adalah terbangunnya bangunan publik yang baik secara kualitas dan kuantitas.” Hasil selengkapnya disajikan pada Gambar 4.17.



Sumber: lampiran 2

Gambar 4.17 Dampak lain dari kebijakan Perubahan tata ruang kawasan bencana Panti adalah terbangunnya bangunan publik yang baik secara kualitas dan kuantitas.

4.3.2 Analisis Hasil Studi AHP

AHP menjadi pisau analisis utama penelitian ini. Pertimbangan yang mendasarinya, alat analisis ini sangat luwes, dapat memasukkan baik aspek kuantitatif maupun kualitatif pikiran manusia. Namun demikian tidak melupakan validasi data dengan lapangan.

Pada penelitian ini penggalian data *expert choise* menggunakan medium kuesioner. Dimana pemberian jawaban melalui acuan perbandingan berpasangan (*pairwise comparison*). Hasil dari kumulatif jawaban kemudian dirata-rata secara geometris untuk mendapatkan prioritas di setiap level. Selanjutnya hasil akhir disampaikan dalam pembahasan deskriptif yang ditunjang dengan grafis data analisis.

Sebagai tambahan penjelasan Hasil kuesioner penelitian ini merupakan isian dari perspektif 11 responden ahli. Awal sebenarnya kuesioner dibagikan kepada 12 responden, namun, karena permasalahan kesibukan, salah satu responden tidak mengembalikan kuesioner.

Respoden ahli dikelompokkan menjadi 3 unsur, meliputi ahli dari unsur birokrat pemerintah, akademisi termasuk LSM, dan tokoh masyarakat (tomas). Adapun daftar lengkap dari kesebelas respodnen ahli, antara lain:

1. unsur birokrat pemerintahan sebanyak 5 responden antaranya: Drs. H. Fadallah, M.Si (Asisten II Pemkab Jember, Wakil Ketua Pelaksana Harian Satlak PBP Kab. Jember), Drs. Rahmad (Tata Ruang, Bappekab Jember), Didik Mulyanto, ST (Kasi Tata Ruang dan Permukiman Dinas Pekerjaan Umum Kab. Jember), Drs. Moh. Suryadi, M.Si (Camat Panti); Bp. Suwaji (Pengamat Teknik DPU Kec. Panti Cab. Dinas Wilayah Jember Tengah)
2. unsur akademisi di antaranya: Dr. Cahyoadi Wibowo, ST (Kapuslit Lingkungan Unej), M. Nur Hasan (Koordinator Aliansi Masyarakat Peduli Bencana (AMPB) Jember, Abd. Qadim, HS (Manajer Program GNKL-PCNU Jember), M. Eri Irawan (Wartawan Jawa Pos dan Penulis laporan 100 hari pascabencana Panti).
3. unsur tokoh masyarakat meliputi, KH. Muzammil (Pengasuh Pondok Pesantren Al-Hasan, Kemiri, Panti), Bp. Mashuri (Sekdes Suci).

A. Dampak kebijakan perubahan tata ruang Kecamatan Panti Kabupaten Jember

Pada level 1 kebijakan perubahan tata ruang kawasan bencana Kecamatan Panti dilihat dari empat aspek, yaitu lingkungan, sosial, ekonomi, dan infrastruktur. Hasil kumulatif dari analisis hirarki proses level 1, menunjukkan bahwa aspek/variabel lingkungan mendapat porsi yang paling besar daripada aspek lain sebanyak 0,38. Berikutnya disusul aspek kedua, sosial, dengan bobot nilai 0,29, aspek ekonomi sebanyak 0,20, dan terakhir aspek infrastruktur dengan bobot nilai 0,14. Hasil selengkapnya disajikan pada Tabel 4.1

Tabel 4.1 Hasil pembobotan jawaban prioritas aspek level 1

Aspek	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	Rata-rata
Lingkungan	0,63	0,46	0,27	0,29	0,29	0,38	0,47	0,15	0,69	0,35	0,15	0,38
Sosial	0,14	0,27	0,46	0,23	0,38	0,30	0,30	0,33	0,20	0,40	0,15	0,29
Ekonomi	0,05	0,17	0,17	0,10	0,23	0,23	0,14	0,46	0,06	0,21	0,34	0,20
Infrastruktur	0,18	0,10	0,10	0,38	0,10	0,09	0,08	0,06	0,06	0,05	0,37	0,14
CR	0,24	0,17	0,17	0,08	0,05	0,18	0,29	0,66	0,14	0,53	0,56	0,28

Sumber: data primer diolah

Nampaknya perkiraan selama ini akan dampak dominan dari pembangunan terhadap lingkungan juga terjadi pada penelitian ini. Hal ini terbukti dari bobot nilai angka yang relatif tinggi hampir mendekati angka 50 persen. Sehingga aspek lingkungan sebagai aspek paling besar terkena dampak kebijakan perubahan tata ruang kawasan bencana Kecamatan Panti meminta perhatian lebih dalam kebijakan pemerintah Kabupaten Jember.

Pada level kedua disajikan 17 kriteria yang bertujuan memetakan secara lebih detail dan spesifik prioritas dampak dari masing-masing aspek pada level satu. Hasil dan pembahasan studi AHP level dua selengkapnya sebagai berikut:

Tabel 4.2 Hasil pembobotan jawaban prioritas kriteria level 2

Lingkungan	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	Rata-rata
K1	0,63	0,39	0,14	0,24	0,41	0,29	0,25	0,13	0,44	0,21	0,44	0,32
K2	0,26	0,51	0,29	0,48	0,48	0,14	0,66	0,12	0,49	0,72	0,24	0,40
K3	0,06	0,10	0,57	0,28	0,11	0,57	0,09	0,75	0,08	0,07	0,32	0,27
CR	0,25	0,06	0,11	0,78	0,02	0,11	0,27	0,01	0,01	0,26	0,49	0,22

Sosial	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	Rata-rata
K4	0,54	0,19	0,33	0,07	0,24	0,33	0,32	0,33	0,29	0,26	0,11	0,27
K5	0,22	0,32	0,22	0,29	0,31	0,22	0,30	0,19	0,32	0,59	0,47	0,31
K6	0,14	0,14	0,17	0,55	0,14	0,17	0,05	0,24	0,15	0,04	0,15	0,18
K7	0,09	0,35	0,28	0,09	0,31	0,28	0,32	0,24	0,24	0,11	0,27	0,23
CR	0,19	0,62	0,66	0,30	0,06	0,66	0,58	0,06	0,18	0,34	0,40	0,37

Ekonomi	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	Rata-rata
K8	0,39	0,17	0,29	0,42	0,23	0,42	0,28	0,19	0,36	0,32	0,08	0,29
K9	0,25	0,21	0,22	0,24	0,23	0,12	0,09	0,23	0,18	0,03	0,08	0,17
K10	0,17	0,17	0,13	0,16	0,23	0,21	0,27	0,14	0,18	0,14	0,13	0,18
K11	0,12	0,24	0,11	0,12	0,10	0,14	0,32	0,29	0,14	0,25	0,40	0,20
K12	0,07	0,22	0,25	0,07	0,20	0,12	0,04	0,16	0,14	0,26	0,31	0,17
CR	0,11	0,27	0,44	0,13	0,03	0,17	0,32	0,29	0,10	0,64	0,08	0,23

Infrastruktur	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	Rata-rata
K13	0,55	0,16	0,06	0,03	0,24	0,04	0,21	0,20	0,26	0,21	0,13	0,19
K14	0,24	0,25	0,41	0,14	0,35	0,14	0,53	0,20	0,44	0,53	0,04	0,30
K15	0,10	0,14	0,13	0,13	0,15	0,12	0,10	0,20	0,12	0,14	0,31	0,15

K16		0,07	0,37	0,24	0,53	0,15	0,53	0,09	0,20	0,14	0,08	0,29	0,24
K17		0,04	0,08	0,16	0,16	0,12	0,17	0,08	0,20	0,04	0,04	0,23	0,12
CR		0,15	0,10	0,12	0,05	0,04	0,06	0,37	0,00	0,37	0,27	0,09	0,15

Sumber: data primer diolah

Berdasarkan Tabel 4.2 di atas, pada aspek lingkungan terdapat tiga indikator kriteria antara lain: (1) perubahan fungsi lahan; (2) keseimbangan ekosistem; (3) estetika keindahan. Indikator kriteria dari aspek lingkungan, keseimbangan ekosistem memiliki nilai 0,40, disusul perubahan fungsi lahan dengan nilai 0,32, dan indikator estetika keindahan dengan bobot nilai sebanyak 0,27.

Kebijakan perubahan tata ruang kawasan bencana Kecamatan Panti juga berdampak pada aspek sosial. Dari hasil AHP terlihat bobot nilai dari aspek sosial 0,29 (lihat pada Gambar 4.19). Aspek sosial dalam hierarki penelitian ini terdiri dari empat indikator kriteria. Indikator kriteria yang mendapat nilai tertinggi adalah pola pikir masyarakat dengan nilai 0,31. Kemudian secara berturut-turut dari yang paling besar, kriteria modal sosial dengan nilai 0,27, partisipasi dengan 0,23 dan kriteria keamanan dengan bobot 0,18.

Aspek ketiga yang mendapat dampak kebijakan perubahan tata ruang kawasan bencana Kecamatan Panti Kabupaten Jember adalah aspek ekonomi. Dalam aspek ekonomi, kriteria yang mendapat porsi nilai besar prioritas adalah pendapatan masyarakat dengan nilai bobot 0,29. Nilai indikator kriteria lainnya dalam aspek ini sangat variatif. Secara keseluruhan ada kesamaan rata-rata. Kriteria penciptaan kesempatan kerja memperoleh bobot sebanyak 0,18. Kriteria lain aspek ini adalah pergerakan barang dan jasa mendapat nilai 0,20 dan investasi mendapat nilai 0,17. Sama halnya dengan kriteria investasi, kriteria APBD juga mendapat nilai 0,17.

Aspek infrastruktur menjadi aspek terakhir yang menjadi dampak dari kebijakan perubahan tata ruang kawasan bencana Kecamatan Panti Kabupaten Jember. Dalam aspek infrastruktur, kriteria yang memiliki prioritas tertinggi hingga terendah berturut-turut: Daerah Aliran Sungai (DAS) dengan nilai bobot 0,30, kriteria

Jalan dengan nilai bobot 0,24, dan sebanyak 0,19 diperoleh kriteria permukiman. Nilai terendah didapat kriteria bangunan publik.

B. Alternatif Kebijakan

Berdasarkan dari hierarki kebijakan perubahan tata ruang kawasan bencana Kecamatan Panti Kabupaten Jember, setelah kriteria (level 2) selesai, maka masuk pada tahapan alternatif (level 3). Namun demikian pertimbangan setiap aspek dan kriteria yang telah dikemukakan sebelumnya, menjadi titik pijak untuk penentuan kebijakan yang harus dilakukan selanjutnya.

Terkait dengan hal tersebut, terdapat dua analisis yang dimunculkan dalam hierarki penelitian ini. Alternatif pertama, kebijakan dibiarkan tetap sebagaimana adanya. Alternatif kedua, perlu kebijakan baru. Hasil dan pembahasan studi AHP level ketiga disajikan selengkapnya sebagai berikut:

Tabel 4.3 Hasil pembobotan jawaban prioritas alternatif level 3

Kebijakan	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	Rata-rata
Tetap	0,23	0,44	0,60	0,21	0,10	0,32	0,29	0,55	0,21	0,18	0,15	0,30
Baru	0,77	0,56	0,40	0,79	0,90	0,68	0,71	0,45	0,79	0,82	0,85	0,70

Sumber: data primer diolah

Secara kumulatif kriteria dan aspek pada level 2 dan level 1, tersimpulkan bahwa alternatif yang memungkinkan untuk dipilih adalah perlunya kebijakan baru yang lebih baik dari sebelumnya (bobot nilai 0,70). Akan tetapi secara lebih detail per kriteria dari empat aspek yang dimunculkan dapat disimak sebagai berikut:

Tabel 4.4 Hasil pembobotan jawaban prioritas alternatif per kriteria level 3

Kebijakan	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	Rata-rata
Lingkungan												
k1 (tetap)	0,12	0,75	0,75	0,12	0,10	0,17	0,12	0,75	0,10	0,12	0,12	0,29
(baru)	0,88	0,25	0,25	0,88	0,90	0,83	0,88	0,25	0,90	0,88	0,88	0,71
k2 (tetap)	0,12	0,75	0,75	0,17	0,10	0,25	0,17	0,83	0,10	0,12	0,12	0,32
(baru)	0,88	0,25	0,25	0,83	0,90	0,75	0,83	0,17	0,90	0,88	0,88	0,68
k3 (tetap)	0,75	0,50	0,75	0,24	0,10	0,25	0,25	0,83	0,50	0,12	0,17	0,41
(baru)	0,25	0,50	0,25	0,76	0,90	0,75	0,75	0,17	0,50	0,88	0,83	0,59

Sosial												
k4 (tetap)	0,25	0,75	0,75	0,12	0,10	0,25	0,25	0,75	0,12	0,12	0,17	0,33
(baru)	0,75	0,25	0,25	0,88	0,90	0,75	0,75	0,25	0,88	0,88	0,83	0,67
k5 (tetap)	0,17	0,25	0,75	0,17	0,10	0,17	0,10	0,75	0,12	0,12	0,12	0,26
(baru)	0,83	0,75	0,25	0,83	0,90	0,83	0,90	0,25	0,88	0,88	0,88	0,74
k6 (tetap)	0,17	0,50	0,75	0,12	0,10	0,25	0,25	0,75	0,12	0,12	0,17	0,30
(baru)	0,83	0,50	0,25	0,88	0,90	0,75	0,75	0,25	0,88	0,88	0,83	0,70
k7 (tetap)	0,17	0,50	0,25	0,12	0,10	0,17	0,12	0,75	0,12	0,12	0,12	0,23
(baru)	0,83	0,50	0,75	0,88	0,90	0,83	0,88	0,25	0,88	0,88	0,88	0,77
Ekonomi												
k8 (tetap)	0,17	0,17	0,75	0,10	0,10	0,12	0,17	0,25	0,12	0,12	0,12	0,20
(baru)	0,83	0,83	0,25	0,90	0,90	0,88	0,83	0,75	0,88	0,88	0,88	0,80
k9 (tetap)	0,17	0,75	0,75	0,88	0,10	0,25	0,25	0,25	0,50	0,83	0,12	0,44
(baru)	0,83	0,25	0,25	0,12	0,90	0,75	0,75	0,75	0,50	0,17	0,88	0,56
k10 (tetap)	0,75	0,25	0,75	0,10	0,10	0,17	0,12	0,25	0,17	0,12	0,12	0,26
(baru)	0,25	0,75	0,25	0,90	0,90	0,83	0,88	0,75	0,83	0,88	0,88	0,74
k11 (tetap)	0,17	0,25	0,25	0,17	0,10	0,25	0,25	0,25	0,50	0,17	0,25	0,24
(baru)	0,83	0,75	0,75	0,83	0,90	0,75	0,75	0,75	0,50	0,83	0,75	0,76
k12 (tetap)	0,17	0,25	0,25	0,25	0,10	0,50	0,25	0,25	0,17	0,12	0,17	0,23
(baru)	0,83	0,75	0,75	0,75	0,90	0,50	0,75	0,75	0,83	0,88	0,83	0,77
infrastruktur												
k13 (tetap)	0,12	0,25	0,75	0,10	0,10	0,75	0,75	0,75	0,12	0,17	0,12	0,36
(baru)	0,88	0,75	0,25	0,90	0,90	0,25	0,25	0,25	0,88	0,83	0,88	0,64
k14 (tetap)	0,12	0,25	0,75	0,12	0,10	0,12	0,10	0,17	0,12	0,10	0,10	0,19
(baru)	0,88	0,75	0,25	0,88	0,90	0,88	0,90	0,83	0,88	0,90	0,90	0,81
k15 (tetap)	0,17	0,25	0,25	0,12	0,10	0,75	0,75	0,75	0,25	0,17	0,25	0,35
(baru)	0,83	0,75	0,75	0,88	0,90	0,25	0,25	0,25	0,75	0,83	0,75	0,65
k16 (tetap)	0,12	0,50	0,75	0,12	0,10	0,83	0,75	0,75	0,25	0,17	0,17	0,41
(baru)	0,88	0,50	0,25	0,88	0,90	0,17	0,25	0,25	0,75	0,83	0,83	0,59
k17 (tetap)	0,17	0,50	0,25	0,50	0,10	0,25	0,25	0,25	0,25	0,17	0,17	0,26
(baru)	0,83	0,50	0,75	0,50	0,90	0,75	0,75	0,75	0,75	0,83	0,83	0,74

Sumber: data primer diolah

a. Alternatif kebijakan berdasarkan perubahan fungsi lahan

Berdasarkan dampaknya dalam kriteria perubahan fungsi lahan, secara kumulatif responden menilai alternatif kebijakan yang merupakan prioritas utama adalah perlu adanya kebijakan baru yang lebih baik (nilai bobot 0.71).

b. Alternatif kebijakan berdasarkan kriteria keseimbangan ekosistem

Berdasarkan dampaknya dalam kriteria keseimbangan ekosistem, responden menilai alternatif kebijakan yang merupakan prioritas utama adalah perlu adanya kebijakan baru (nilai bobot 0.68).

c. Alternatif kebijakan berdasarkan kriteria estetika keindahan

Berdasarkan dampaknya dalam kriteria estetika keindahan, responden menilai alternatif kebijakan yang merupakan prioritas utama adalah perlu adanya kebijakan baru yang lebih baik (nilai bobot 0.59).

d. Alternatif kebijakan berdasarkan kriteria modal sosial

Berdasarkan dampaknya dalam kriteria modal sosial, responden menilai alternatif kebijakan yang menjadi prioritas utama adalah perlu adanya kebijakan baru yang lebih baik (nilai bobot 0.67).

e. Alternatif kebijakan berdasarkan kriteria pola pikir masyarakat

Berdasarkan dampaknya dalam kriteria pola pikir masyarakat, dengan selisih sedikit, responden menilai alternatif kebijakan yang merupakan prioritas utama adalah perlu adanya kebijakan baru yang lebih baik (nilai bobot 0.74).

f. Alternatif kebijakan berdasarkan kriteria keamanan

Berdasarkan dampaknya dalam kriteria keamanan, responden menilai alternatif kebijakan yang merupakan prioritas utama adalah perlu adanya kebijakan baru yang lebih baik (nilai bobot 0.70).

g. Alternatif kebijakan berdasarkan kriteria partisipasi

Berdasarkan dampaknya dalam kriteria partisipasi, responden menilai alternatif kebijakan yang menjadi prioritas utama adalah perlu adanya kebijakan baru yang lebih baik (nilai bobot 0.77).

h. Alternatif kebijakan berdasarkan kriteria pendapatan masyarakat

Berdasarkan dampaknya dalam kriteria pendapatan masyarakat, responden menilai alternatif kebijakan yang merupakan prioritas utama adalah perlu adanya kebijakan baru (nilai bobot 0.80).

i. Alternatif kebijakan berdasarkan kriteria investasi

Berdasarkan dampaknya dalam kriteria investasi, dengan selisih bobot nilai cukup kecil, responden menilai alternatif kebijakan yang merupakan prioritas utama dalam kebijakan perubahan tata ruang kawasan bencana Kecamatan Panti adalah perlu adanya kebijakan baru yang lebih baik (nilai bobot 0.56).

j. Alternatif kebijakan berdasarkan kriteria penciptaan kesempatan kerja

Berdasarkan dampaknya dalam kriteria penciptaan kesempatan kerja, responden menilai alternatif kebijakan yang merupakan prioritas utama dalam kebijakan perubahan tata ruang kawasan bencana Kecamatan Panti adalah perlu adanya kebijakan baru yang lebih baik (nilai bobot 0.74).

k. Alternatif kebijakan berdasarkan kriteria pergerakan barang dan jasa

Berdasarkan dampaknya dalam kriteria pergerakan barang dan jasa, responden menilai alternatif kebijakan yang merupakan prioritas utama adalah perlu adanya kebijakan baru yang lebih baik (nilai bobot 0.76).

l. Alternatif kebijakan berdasarkan kriteria APBD

Berdasarkan dampaknya dalam kriteria APBD, responden menilai alternatif kebijakan yang merupakan prioritas utama adalah perlu adanya kebijakan baru yang lebih baik (nilai bobot 0.77).

m. Alternatif kebijakan berdasarkan kriteria permukiman

Berdasarkan dampaknya dalam kriteria permukiman, responden menilai alternatif kebijakan perubahan tata ruang kawasan bencana Kecamatan Panti yang merupakan prioritas utama adalah perlu adanya kebijakan baru (nilai bobot 0.64).

n. Alternatif kebijakan berdasarkan kriteria Daerah Aliran Sungai (DAS)

Berdasarkan dampaknya dalam kriteria Daerah Aliran Sungai (DAS), responden menilai alternatif kebijakan yang merupakan prioritas utama dalam kebijakan perubahan tata ruang kawasan bencana Kecamatan Panti adalah perlu adanya kebijakan baru yang lebih baik (nilai bobot 0.81).

o. Alternatif kebijakan berdasarkan kriteria fasilitas umum (fasum)

Berdasarkan dampaknya dalam kriteria fasilitas umum (fasum), responden menilai alternatif kebijakan yang merupakan prioritas utama dalam kebijakan perubahan tata ruang kawasan bencana Kecamatan Panti Kabupaten Jember adalah perlu adanya kebijakan baru yang lebih baik (nilai bobot 0.65).

p. Alternatif kebijakan berdasarkan kriteria jalan

Berdasarkan dampaknya dalam kriteria jalan, responden menilai alternatif kebijakan yang merupakan prioritas utama adalah perlu adanya kebijakan baru yang lebih baik (nilai bobot 0.59).

q. Alternatif kebijakan berdasarkan kriteria bangunan publik

Berdasarkan dampaknya dalam kriteria bangunan publik, responden menilai alternatif kebijakan yang merupakan prioritas utama dalam kebijakan perubahan tata ruang kawasan bencana Kecamatan Panti Kabupaten Jember adalah perlu adanya kebijakan baru yang lebih baik (nilai bobot 0.74).

C. Model perencanaan tata ruang tanggap bencana

Dilihat dari empat aspek, lingkungan, sosial, ekonomi, dan infrastruktur dalam analisis AHP dengan berbagai kriteria berdasarkan masing-masing aspek, serta dihasilkan proyeksi alternatif kebijakan yang menjadi prioritas utama pada level 3. selanjutnya pada level 4 akan menjawab konsep tata ruang tanggap bencana yang paling mungkin dilakukan di kawasan bencana Kecamatan Panti Kabupaten Jember.

Hasil studi yang dilakukan menyimpulkan bahwa konsep tata ruang tanggap bencana menurut *expert choise* harus mengedepankan *participatory planning* (nilai bobot 0,45). Selanjutnya baru *sustainability planning* (nilai bobot 0,33) dan *strategic planning* (nilai bobot 0,22). Grafis data lengkap dapat dilihat pada Tabel 4.5.

Tabel 4.5 Hasil pembobotan jawaban prioritas model level 4

Model	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	Rata-rata
Strategic	0,08	0,33	0,29	0,23	0,16	0,24	0,16	0,44	0,13	0,05	0,33	0,22
Participatory	0,44	0,33	0,57	0,32	0,66	0,32	0,66	0,32	0,75	0,22	0,33	0,45
Sustainability	0,49	0,33	0,14	0,45	0,19	0,44	0,19	0,24	0,12	0,73	0,33	0,33
CR	0,01	0,00	0,11	0,12	0,02	0,49	0,02	0,49	0,01	0,00	0,00	0,12

Sumber: data primer diolah

Simpulan *expert choise* menegaskan pentingnya partisipasi dalam kebijakan tata ruang kewilayahan. Konsep *participatory planning* oleh seluruh rakyat memang harus menjadi unsur pertama dalam perencanaan pembangunan. Ada tiga alasan mengapa partisipasi dianggap penting, yaitu (Conyers, 1994: 154, dalam Sirajudin, dkk, 2006: 78):

1. partisipasi rakyat merupakan suatu alat guna memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan dan sikap rakyat setempat, yang tanpa kehadirannya program pembangunan serta proyek-proyek akan gagal;
2. rakyat akan lebih mempercayai proyek atau program pembangunan jika merasa dilibatkan dalam proses persiapan dan perencanaannya, karena akan mempunyai rasa memiliki terhadap proyek tersebut;
3. yang mendorong adanya partisipasi umum di banyak negara karena timbul anggapan bahwa merupakan suatu hak demokrasi bila rakyat dilibatkan dalam pembangunan rakyat mereka sendiri.



BAB V. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini dibuat berdasarkan fenomena bencana alam yang akhir-akhir ini menimpa bangsa Indonesia. Secara khusus penelitian memilih kecamatan Panti, yang pada awal tahun 2006 dilanda bencana banjir bandang dan tanah longsor, sebagai studi kasus (*case study*).

Telah menjadi pemahaman umum setiap bencana selalu berimplikasi terhadap perubahan yang membawa pada terbitnya sebuah kebijakan. Termasuk di dalamnya implikasi bencana terhadap perubahan fungsi ruang yang membawa kebijakan tata ruang sebuah wilayah.

Berdasarkan hasil dan pembahasan dari penelitian yang tergolong *post ante* (penelitian evaluasi terhadap kebijakan yang sudah terjadi), dengan melalui analisis deskriptif dan AHP, dapat disimpulkan dari beberapa hal. Analisis pertama, deskriptif, yang melibatkan 30 responden diperoleh simpulan melalui empat tinjauan aspek, yaitu lingkungan, sosial, ekonomi, dan infrastruktur. *Pertama*, pada aspek lingkungan bahwasanya kebijakan tata ruang pascabencana Panti berdampak signifikan pada aspek keindahan. Kemudian disusul dampak pada perubahan fungsi lahan dan ketidakseimbangan ekosistem. *Kedua*, pada aspek sosial dampak kebijakan tata ruang paling besar pada perubahan pola pikir masyarakat. Dampak selanjutnya adalah pergeseran tingkat keamanan baik keamanana akan terjadinya bencana susulan atau pun kriminalitas. *Ketiga*, adalah dampak kebijakan pada aspek lingkungan. Pergerakan barang dan jasa dan perubahan tingkat pendapatan masyarakat menjadi dua variabel paling signifikan pada aspek ekonomi. Dan pada aspek terakhir, aspek infrastruktur masih menjadikan permukiman yang berkualitas yang bebas dari area bencana, tetap menjadi variabel utama pilihan responden. Selain itu sebagaimana umumnya dampak kebijakan pascabencana pada suatu daerah adalah terbangunnya beberapa ruas jalan.

Selanjutnya analisis kedua, AHP (*Analytic Hierarchy Process*) diperoleh simpulan bahwa kebijakan tata ruang kawasan bencana Kecamatan Panti Kabupaten Jember secara kumulatif memiliki dampak terhadap empat aspek dalam masyarakat wilayah bencana, secara berurutan dari yang terbesar, yaitu aspek lingkungan, sosial, ekonomi, dan infrastruktur.

Dampak paling signifikan dari kebijakan diperoleh aspek lingkungan. Dalam aspek lingkungan kriteria ketidakseimbangan ekosistem (*unbalance ecosystem*) menjadi kriteria dengan skala prioritas dampak tertinggi. Selanjutnya, dalam aspek sosial, kriteria pola pikir masyarakat memiliki nilai tertinggi sebagai dampak kebijakan tata ruang. Perubahan pola pikir masyarakat pascabencana terlihat dari pola masyarakat yang cenderung konsumtif dalam kehidupan sehari-hari. Berbeda dengan kondisi sebelum kebijakan, yang lebih produktif.

Pendapatan masyarakat yang notabene adalah petani dan buruh perkebunan AFD Gunung Pasang, AFD Gentong, dan AFD. Puskopad Brawijaya V, turut menjadi dampak kebijakan tata ruang kawasan bencana. Tempat relokasi permukiman yang jauh dari area lahan pertanian menjadi penyebab utamanya. Selain juga lahan pertanian yang merupakan lahan pendapatan masyarakat telah berubah menjadi area permukiman.

Aspek infrastruktur menempatkan kriteria Daerah Aliran Sungai (DAS) yang masih belum tertata dengan baik menjadi variabel dengan prioritas tertinggi. Namun demikian terdapat dampak positif pada aspek infrastruktur, yaitu terbangunnya jalan sebagai medium mobilitas barang dan jasa. Selanjutnya dari sekian dampak yang diberikan kebijakan kepada empat aspek di atas, responden *expert* memberikan simpulan pada level ketiga bahwa kebijakan tata ruang kawasan bencana Kecamatan Panti Kabupaten Jember harus diganti dengan kebijakan baru yang lebih baik.

Terakhir pada level model, dari sekian dampak dan persoalan dari kebijakan tata ruang di kawasan bencana mengharuskan perlunya dikedepankan aspek *participatory planning* sebagai lokus dari konsep tata ruang tanggap bencana.

5.2 Rekomendasi

Berdasarkan hasil temuan dari penelitian di atas, maka selanjutnya perlu diberikan beberapa rekomendasi untuk ditindaklanjuti sebagai perbaikan, yaitu:

1. perlunya memasukkan indikator bencana dalam setiap kebijakan penataan ruang wilayah. Mengingat hampir seluruh wilayah Indonesia, terlebih Kecamatan Panti Kabupaten Jember memiliki potensi bencana yang tinggi;
2. selain indikator bencana, perlu juga dimasukkan unsur partisipasi publik (*participatory planning*) dalam setiap pengambilan kebijakan, khususnya terkait kebijakan tata ruang wilayah. Karena sejatinya masyarakat wilayah kebijakan setempat yang lebih mengetahui kondisi *eksisting* kewilayahan tersebut. Dalam hal ini pengoptimalan fungsi program pembangunan yang sudah mengakomodir aspek partisipasi seperti musrenbangdes harus dilakukan. Sehingga medium yang telah ada tidak hanya terbatas untuk pemenuhan agenda partisipasi secara administratif tapi lebih pada proses partisipasi yang substantif;
3. pentingnya pembumian program penciptaan kesadaran lingkungan (*ecological awareness*) bagi masyarakat dan birokrasi. Sehingga diharapkan tidak hanya masyarakat yang menjadi peduli akan kondisi lingkungan sekitarnya, pemerintah pun menjadikan faktor ekologi sebagai pertimbangan utama dan penting dalam setiap kebijakan pembangunan yang diambil;
4. Terlebih dari tiga hal di atas, perlu direkomendasikan adanya kebijakan yang dapat mengintegrasikan semua *stakeholders* (Pemerintah Kabupaten dan Desa, Perhutani, PTPN, dan Masyarakat). Tentunya dengan kesadaran penuh bahwasanya kebijakan bersama yang terintegrasi hanya tercapai dengan penanggalkan kepentingan masing-masing pihak menjadi kepentingan bersama.

DAFTAR PUSTAKA

- Abe, Alexander. 2001. *Perencanaan Daerah: Memperkuat Prakarsa Rakyat dalam Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Lapera Pustaka Utama.
- Anderson, J.E. 1969. *Public Policy Making*. 2nd Edition. New York: Holt, Rinehart and Winston.
- Anharuddin. 2007. *Memahami Analisis Proses Pengambilan Kebijakan Publik: Interpretasi Terhadap Pemikiran William N Dunn*.
- Arsyad, L. 2005. *Pengantar Pembangunan Ekonomi Daerah Edisi Kedua*. Yogyakarta: BPFE.
- Banjarmasin Post. 2004. *Banjarmasin: Kota Seribu Sungai, Seribu Masalah*. Senin, 4 (Oktober 2004).
- Bappekab. 1991. *Rencana Umum Tata Ruang Kota: Ibu Kota Kecamatan Panti Tahun 1991/1992-2013-2014*. Jember: Pemerintah Daerah Tingkat II Jember.
- Badan Pusat Statistik. 2006. *Jember dalam Angka*. Jember: Badan Pusat Statistik Kabupaten Jember.
- _____. 2005. *Kecamatan Panti dalam Angka Tahun 2005*. Jember: Badan Pusat Statistik Kabupaten Jember.
- Catanese, A. J & Syner, J. C. (ed). 1988. *Perencanaan Kota*. Edisi kedua. Terjemah: Penerbit Erlangga.
- Demko, D. 2006. *Tools for Multi-objective and multi-disciplinary Optimization in Naval Ship Design. Thesis Master of Science*. Blacksburg-Virginia: Virginia Polytechnic Institute. http://scholar.lib.vt.edu/theses/available/etd/ unrestricted/Demko_Thesis_Final.pdf [21 Desember 2006].
- Djunaedi, A. Tanpa Tahun. *Proses Perencanaan Strategis untuk Perkotaan (Kasus-kasus di Luar Negeri)*. Working Papers: Program Magister Perencanaan Kota dan Daerah (MPKD) UGM. <http://intranet.ugm.ac.id/~a-djunaedi/pdf>.
- Dunn, W.N. 2000. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik: edisi kedua*. Cetakan ketiga. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Dye, T.R. 1978. *Understanding Public Policy*. Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice Hall.

- Islamy, I.M. 2000. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Jones, C.O. 1996. *Pengantar Kebijakan Publik (Public Policy)*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Kodoatie, R.J. & Sjarief, R. 2006. *Pengelolaan Bencana Terpadu: Banjir, Longsor, Kekeringan, dan Tsunami*. Jakarta: Yarsif Watampone.
- Kompas. 2005. *Bangsa yang Hidup Bersama Bencana*. Kolom Bencana Nasional hal. 6. Sabtu, 1 (Januari 2005).
- ——. 2007. *Saat Ego Kewilayahan Masih Mendominasi*. Sorotan Manggarai Tata Ruang hal. 61. Jumat, 30 (Maret 2007).
- Kristof, G. M. 2005. *Planning business improvement using Analytic Hierarchy Process (AHP) and Design Structure Matrix (DSM)*. Tesis Master of Science: Bozeman-Montana: Industrial and Management Engineering Montana State University. <http://www.montana.edu.etc.available.unrestricted/kristof.html>. [26 November 2006].
- Mega, V. 1998. *The participatory City: Innovations in the European Union*. Working Papers: Management of Social Transformations (MOST)-United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. <http://unesco.unesdoc.org/html>. [3 April 2007].
- Nasir, M. 2003. *Metode Penelitian*. Cetakan kelima. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Radjiman, G. 2007. *Disaster Risk Management Information System*. Yogyakarta: Lecture Material Double Degree Master Program Geoinformation for Spatial Planning and Risk Management Faculty of Geography UGM-ITC. (Diktat kuliah tidak dipublikasikan).
- Ritonga, R. 2006. *Peta Wilayah Rawan Bencana*. Tempo Interaktif. <http://www.tempointeraktif.com>. [1 April 2007].
- Saaty, L. T. 1991. *Pengambilan Keputusan Bagi Para Pemimpin: Proses Hirarki Analitik untuk pengambilan keputusan dalam situasi yang kompleks*. Terjemah: Pustaka Binawan Pressindo.
- Samuelson, P. 1994. *Ekonomi: Edisi ke dua belas jilid 2*. Jakarta: Erlangga.
- Setyawan, A. et al. 2006. *Mengenal Bencana Alam Tanah Longsor dan Mitigasinya*. Inovasi Online vol. 8/XVIII/November/2006.

Sirajudin, dkk. 2006. *Hak Rakyat Mengontrol Negara: Membangun Model Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah*. Malang: MCW

Sughandi, A. 2002. *Peran penataan ruang bagi keterpaduan pembangunan berkelanjutan di era otonomi dan globalisasi*. Bandung: Jurnal Departemen Teknik Planologi ITB. hal. 103 – 111.

Sughandi, A. 2002. *Peran penataan ruang bagi keterpaduan pembangunan berkelanjutan di era otonomi dan globalisasi*. Bandung: Jurnal Departemen Teknik Planologi ITB. hlm 103 – 111.

Sunarto & Rahayu, Lies. WF. 2006. "Fenomena Bencana Alam di Indonesia." *Jurnal Pusat Studi Bencana UGM*, hal. 1-5.

Tarigan, R. 2005. *Perencanaan Pembangunan Wilayah*. Edisi Revisi. Medan: Bumi Aksara.

Warta Kebijakan. 2002. *Tata Ruang dan Proses Penataan Ruang*. Bogor : Centre For International Forestry Research (CIFOR). <http://www.cifor.cgiar.org/aem/download/pub/wk/warta05.pdf>. [1 April 2007].

Widodo, Tri. 2006. *Perencanaan Pembangunan: Aplikasi Komputer (Era Otonomi Daerah)*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

www.bakornaspbp.go.id/new/ [14 November 2006]

www.lapanrs.com/SMBA/smba.php. [10 Januari 2007].